

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Vol. 9 No. 01 September - Desember 2019

ISSN 2089 - 0338
E-ISSN 2502-7921

Akreditasi
Kemenristekdikti Nomor
21/E/KPT/2018

- PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA MELALUI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DI SURABAYA

Soetji Andari

- KEBERFUNGSIAN SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA PASCA REHABILITASI SOSIAL DI BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA GALIH PAKUAN DI BOGOR

Ruaida Murni

- URGENSI SINERGI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI BANJAR

Muhtar

- DINAMIKA PSIKOLOGIS PEMANFAATAN DATA TERPADU DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI DELI SERDANG

Togiaratua Nainggolan

- PERAN PEKERJA SOSIAL SEKOLAH DALAM MENANGANI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH-SEKOLAH DI BANDUNG

Sakroni

- ANALISIS SWOT PEMBERDAYAAN SUKU BONAI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI ROKAN HULU

Mayliza dan Adianto

- MENDORONG KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS *DEMOCRATIC GOVERNANCE*: PELAJARAN DARI KOTA KUPANG

Laurensius Petrus Sayrani dan Lasarus Jehamat

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Vol. 9 No. 01 September - Desember 2019

ISSN 2089 - 0338
E-ISSN 2502-7921

Akreditasi
Kemenristekdikti Nomor
21/E/KPT/2018

Sebuah Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial menyajikan karangan ilmiah dalam bentuk hasil penelitian lapangan bidang kesejahteraan sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember.

SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari “Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial” yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei - Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 Jurnal Ilmiah "SOSIO KONSEPSIA" menggunakan *Open Journal System (OJS)*. Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di Sosio Konsepsia melakukan pengiriman naskah melalui *Open Journal System (OJS)*: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

Penyunting Ahli / Mitra Bestari

1. Prof. Adi Fahrudin, Ph.D. *Praktek dan Pendidikan Pekerjaan Sosial, Psikososial, dan Disaster Management (Universitas Muhammadiyah Jakarta)*
2. Prof. Irwanto, Ph.D. *Psikologi, Perkembangan Anak dan Studi Keluarga, HIV/AIDS, Disabilitas (Universitas Atmajaya Jakarta)*
3. Prof. Isbandi Rukminto Adi, M.Kes., Ph.D *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (Universitas Indonesia)*
4. Binahayati Rusyidi, Ph.D *Program dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial, Gender Based Violence, Perlindungan Anak, Etika Praktek Kesejahteraan Sosial, Etika Penelitian (Universitas Padjajaran)*
5. DR. Bambang Rudito *Antropologi, Interkultural, Corporate Social Responsibility (Institut Teknologi Bandung)*
6. DR. Santoso Tri Raharjo *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Sosiologi (Universitas Pajajaran, Bandung)*
7. Makmur Sunusi Ph.D *Pekerjaan Sosial (Universitas Muhammadiyah, Jakarta)*

Pengarah : Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial

Pembina : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penelitian Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial

Editor Bagian

1. Drs. Suradi, M.Si
2. Drs. Setyo Sumarno, M.Si
3. Badrun Susantyo, Ph.D
4. DR. Hari Harjanto Setiawan
5. Drs. B. Mujiyadi, M.SW
6. Drs. Muhtar, M.Si
7. Sugiyanto, S.Pd, M.Si
8. Nyi R Irmayani, SH, M.Si
9. Habibullah, S.Sos, M.Kesos

Diterbitkan oleh **Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial**



Alamat

Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang III Jakarta Timur 13630 Telp. (021) 8017146, Fax (021) 8017126

Email : sosiokonsepsia@gmail.com Website: puslit.kemsos.go.id

Ejournal: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

Percetakan: CV. Multi Inovasi Mandiri (isi diluar tanggungjawab percetakan)

Villa Inti Persada Blok A.12/6 Pamulang Kota, Tangerang Selatan. Email: inovasiku_99@yahoo.com

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Volume 9, No. 01, September - Desember 2019

ISSN 2089-0338
E-ISSN 2502-7921

Akreditasi
Kemenristekdikti Nomor:
21/E/KPT/2018

DAFTAR ISI

HALAMAN

■ PENGANTAR REDAKSI	iii
■ PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA MELALUI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DI SURABAYA Soetji Andari	1 - 16
■ KEBERFUNGSIAN SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA PASCA REHABILITASI SOSIAL DI BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA GALIH PAKUAN DI BOGOR Ruaida Murni	17 - 36
■ URGENSI SINERGI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI BANJAR Muhtar	37 - 48
■ DINAMIKA PSIKOLOGIS PEMANFAATAN DATA TERPADU DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI DELI SERDANG Togiaratua Nainggolan	49 - 62
■ PERAN PEKERJA SOSIAL SEKOLAH DALAM MENANGANI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH-SEKOLAH DI BANDUNG Sakroni	63 - 76
■ ANALISIS SWOT PEMBERDAYAAN SUKU BONAI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI ROKAN HULU Mayliza dan Adianto	77 - 98
■ MENDORONG KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS <i>DEMOCRATIC GOVERNANCE</i> : PELAJARAN DARI KOTA KUPANG Laurensius Petrus Sayrani dan Lasarus Jehamat	99 - 112

PENGANTAR REDAKSI

SOSIO KONSEPSIA Vol 9 No 01, September – Desember 2019 menyajikan artikel yang menarik untuk dibaca dan menjadi referensi dalam menyusun kebijakan sosial yang adaptif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain (Napza) masuk menjadi isu utama dalam pembangunan sosial di Indonesia. Penyalahgunaan Napza bersifat multidimensional, baik dari sisi penyebab maupun dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu penanganan terhadap penyalahgunaan Napza ini memerlukan multi pendekatan, multi disiplin dan multi sektor. Pemerintah perlu membangun kolaborasi dengan organisasi non pemerintah, agar elemen masyarakat berperan aktif dan memberikan kontribusi yang nyata dalam menangani penyalahgunaan Napza. Soetji Andari mencermati pengetahuan masyarakat tentang rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza melalui Institusi Penerima Wajib Laporkan, dan Ruaida Murni mencermati keberfungsian sosial korban setelah direhabilitasi di dalam Balai Rehabilitasi Sosial.

Kemiskinan masih menarik perhatian banyak pihak, karena masalah sosial ini berdampak luas dan kompleks. Meskipun pemerintah sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit, tetapi populasi orang miskin masih cukup besar dengan sifat kemiskinan kronis. Kemiskinan sebagai masalah sosial yang kompleks, memerlukan penanganan secara sinergis dan kolaboratif. Selain itu juga diperlukan sinergi program internal K/L maupun lintas K/L. Muhtar mencermati urgensi sinergi program ini dalam penanganan kemiskinan. Kemudian selain sinergi program, yang tidak kalah penting adalah data kemiskinan yang menjadi basis kebijakan. Data kemiskinan yang dikelola pusat dengan melibatkan pemerintah daerah memerlukan kesamaan pemahaman dan tindakan, sehingga diperoleh data yang valid dan kredibel sebagai basis kebijakan.

Tindak kekerasan di kalangan anak-anak sekolah, salah satu isu yang memerlukan perhatian semua pihak, bukan saja di kalangan pendidik dan orang tua murid. Tindak kekerasan dalam bentuk perundungan harus dapat dicegah karena akan berdampak terhadap psikologis anak dan perkembangan selanjutnya. Sakroni mencermati masalah ini dan mencoba menawarkan gagasan menempatkan pekerja sosial di sekolah-sekolah guna mencegah terjadinya perundungan di sekolah.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) ditentukan oleh kesiapan Dinas Sosial di daerah. Dinas Sosial diharapkan memiliki kekuatan atau potensi untuk mengambil peluang sebesar-besarnya, menghadapi tantangan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Mayliza dan Adianto menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kesiapan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dalam pemberdayaan Suku Bonai. Melalui analisis ini dipetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan menentukan kinerja instansi sosial tersebut dalam pemberdayaan Suku Bonai.

Kelemahan, peluang dan ancaman pada konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial menghendaki sebuah pendekatan yang holistik, integratif dan kolaboratif. Kompleksitas

permasalahan sosial dengan segala dampaknya akan menguras banyak energi apabila tidak ditangani secara kolaboratif antar aktor. Laurensius Petrus Sayrani dan Lasarus Jehamat menawarkan pemikiran tentang *democratic governance* yaitu konsep yang mengedepankan kolaborasi antaraktor sebagai basis kebijakan sosial di Indonesia.

Redaksi

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

Soetji Andari (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS Yogyakarta))

PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNAAN NAPZA MELALUI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DI SURABAYA

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.01, Desember 2018, hal: 1-16.

Abstrak

Pengetahuan masyarakat tentang Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) berhasil apabila pemerintah memberikan informasi yang jelas mengenai dampak Napza melalui sosialisasi di lingkungan masyarakat. Sosialisasi IPWL di lingkungan masyarakat sebagian sudah dilaksanakan, termasuk proses rehabilitasi dan edukasi tentang Napza oleh konselor atau *volunteer*. Masyarakat ikut membantu pemerintah mensosialisasikan hal tersebut, diharapkan memberikan perubahan positif bagi sebagian masyarakat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui masyarakat tentang IPWL sebagai tempat wajib lapor bagi pengguna Napza, menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Karakteristik responden sampel yang diambil dari tokoh masyarakat yang tinggal di sekitar IPWL merupakan tokoh masyarakat, tokoh agama maupun aparat kelurahan sebanyak 60 orang. Hasil penelitian pengetahuan masyarakat tentang IPWL 75,3 persen responden tidak mengetahui IPWL sebagai tempat wajib lapor dan rehabilitasi bagi pengguna Napza. 54 persen responden tidak mengetahui dampak penggunaan Napza mengakibatkan terganggu fungsi otak dan perkembangan moral pemakainya, intoksikasi (keracunan), *overdosis* (OD) yang menyebabkan kematian, 78,3 persen responden tidak mengetahui prosedur pelayanan yang diberikan IPWL. Pengetahuan masyarakat tentang peredaran Napza 63,3 persen responden tidak mengetahui karena tidak mampu menjelaskan peredaran Napza di sekitar lingkungan. Pengetahuan masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam memberi rangsangan untuk berpartisipasi dalam pencegahan peredaran Napza. IPWL sangat berperan dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban Napza melalui kerjasama dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba serta mendapat dukungan masyarakat, pemerintah, maupun lembaga swasta.

Kata Kunci: *pengetahuan, masyarakat, Napza, wajib lapor.*

COMMUNITY UNDERSTANDING OF THE SOCIAL REHABILITATION FOR DRUG ABUSE IN INSTITUTION OF MANDATORY RECIPIENTS IN SURABAYA

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.01, December 2018, page: 1-16.

Abstract

Public knowledge of the institution of mandatory recipients (IPWL) is successful if the government provides clear information about the impact of drugs through socialization in the community. Some socialization of IPWL in the community has been carried out, including the process of rehabilitation and education about drugs by counselors or volunteers. The community will help the government to socialize this, it is

hoped that it will bring positive change for some people. The aim of this research is to find out the public about IPWL as a mandatory place to report for drug users, using quantitative descriptive research methods with purposive sampling as a sampling technique with special consideration so that it is suitable to be sampled. Characteristics of the sample respondents taken from community leaders who live around IPWL are community leaders, religious leaders and village officials as many as 60 people. The results of public knowledge research about IPWL 75.3 percent of respondents did not know IPWL as a mandatory place for reporting and rehabilitation for drug users. 54 percent of respondents did not know the effects of drug use resulting in impaired brain function and the moral development of the wearer; intoxication (poisoning), overdose (OD) which causes death. 78.3 percent of respondents did not know the service procedures provided by IPWL. Public knowledge about drug trafficking 63.3 percent of respondents did not know because they were unable to explain drug trafficking around the environment. Public knowledge has a great influence in providing stimuli to participate in preventing drug trafficking. IPWL is very instrumental in carrying out rehabilitation of drug victims through collaboration with medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics addicts and has the support of the community, government, and private institutions.

Keywords: knowledge, community, drugs, compulsory reporting.

Ruaida Murni (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)
KEBERFUNGSIAN SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN Napza PASCA REHABILITASI
SOSIAL DI BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA GALIH
PAKUAN DI BOGOR

SOCIAL FUNCTIONING OF VICTIMS OF DRUG USE POST SOCIAL REHABILITATION IN
THE SOCIAL REHABILITATION CENTER OF VICTIMS OF DRUG ABUSE GALIH PAKUAN IN
BOGOR

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.01, Desember 2018, hal: 17-36.

Abstrak

Masalah penyalahgunaan Napza merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian khusus pemerintah, karena peredarannya sudah menyebar di semua kalangan masyarakat. Penyalahgunaan Napza memicu terhambatnya keberfungsian sosial bagi pelakunya. Korban penyalahgunaan Napza baik pada tahap pengguna coba-coba ataupun sudah menjadi pecandu, perlu tindakan agar terlepas dari jerat Napza, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Rehabilitasi sosial merupakan salah satu solusinya. Penelitian ini bertujuan mengetahui keberfungsian sosial korban penyalahgunaan Napza yang diperoleh setelah melakukan rehabilitasi sosial. Metode yang digunakan kualitatif didukung data kuantitatif. Responden terdiri dari korban penyalahgunaan Napza dan informan petugas panti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (77,7 persen) responden memiliki keberfungsian sosial dengan kategori tinggi dan sebagian kecil kategori sedang, artinya masih ada item-item dari variabel yang mendukung keberfungsian sosial yang belum mampu dilaksanakan secara maksimal. Untuk lebih memaksimalkan keberfungsian sosial korban penyalahgunaan Napza setelah direhabilitasi, pihak panti perlu mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, secara bersamaan dapat memberikan motivasi dan dukungan moril terhadap eks penerima manfaat sehingga dapat memaksimalkan keberfungsian sosialnya, serta memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat, agar keluarga dan masyarakat memahami pentingnya keberfungsian sosial bagi korban penyalahgunaan Napza setelah di rehabilitasi.

Kata Kunci: korban penyalahgunaan Napza, keberfungsian sosial, rehabilitasi sosial, balai rehabilitasi sosial.

SOCIAL FUNCTIONING OF VICTIMS OF DRUG USE POST SOCIAL REHABILITATION IN THE SOCIAL REHABILITATION CENTER OF VICTIMS OF DRUG ABUSE GALIH PAKUAN IN BOGOR

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.01, December 2018, page: 17-36.

Abstract

The problem of drug abuse is one of various issues that concerned to the government, because its circulation has spread in all elements of life. Drug abuse triggers the obstruction of social functioning of the perpetrators. Drug abuse either at the user stage or already an addict, action needs to be released from the trap of drugs, so that they are able to carry out their social functions well. Social rehabilitation is one solution. The purpose of this research is identifying the social functioning of drug users who are obtained after conducting social rehabilitation. The method used is qualitative supported by quantitative data. The respondents consisted of victims of drug abuse and informants from the BRSPN Galih Pakuan. The results shows that the majority (77.7 percent) of respondents had social functioning with a high category and a small proportion of the medium category. It means that there are still items of variables that support social functioning that have not been able to be implemented optimally. To further maximize the social functioning of victims of drug abuse after being rehabilitated, the institution needs to optimize the implementation of monitoring and evaluation, simultaneously can provide motivation and moral support to former beneficiaries so as to maximize their social functioning, and giving counseling to families and communities, so that families and communities understand the importance of social functioning for victims of drug abuse after rehabilitation.

Keywords: *victims of drug abuse, social functioning, social rehabilitation, social rehabilitation center*

Muhtar (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

URGENSI SINERGI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI BANJAR

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.01, Desember 2018, hal: 37-48.

Abstrak

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan urgensi sinergi program penanggulangan kemiskinan. Kompleksitas permasalahan penduduk miskin, menuntut dilakukannya sinergitas program dari para pihak, pusat dan daerah. Kajian dilaksanakan di Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan April 2018. Jenis dan pendekatan kajian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan Program Rastra. Untuk memperkaya informasi, dilakukan *focus group discussion* dengan unsur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Hasil kajian menunjukkan, sungguhpun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar rendah (2,96 persen), jauh di bawah angka kemiskinan nasional (9,82 persen), namun kenyataan menunjukkan bahwa warga Desa Pemurus belum dapat mengakses air bersih sebagai salah satu kebutuhan dasar. Guna memenuhi kebutuhan dasar tersebut —untuk keperluan minum dan masak nasi— khususnya, dilakukan dengan cara sederhana, di mana mereka mengendapkan air sungai yang ada di dekat rumahnya dalam sebuah wadah, dan baru memanfaatkannya ketika air tersebut telah terlihat jernih. Ketika musim hujan, warga Desa Pemurus menjadikan air hujan sebagai alternatif sumber air bersih. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan pangan, warga Desa Pemurus sudah dapat mengakses bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan, Program Rastra, Program Indonesia Sehat, dan Program Indonesia Pintar, meskipun masih banyak terjadi *exclusion* dan *inclusion error* dari sisi data. Untuk itu, sinergi program penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi bagi keluarga miskin, krusial dan mendesak dilakukan, dengan dilakukannya peningkatan koordinasi ditingkat pusat, sekurangnya antara Kementerian

Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terlebih dulu, yang kemudian diikuti di tingkat daerah.

Kata Kunci: *sinergi; program; penanggulangan kemiskinan.*

THE URGENCY OF SYNERGIZING POVERTY REDUCTION PROGRAMES IN BANJAR

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.01, December 2018, page: 37-48.

Abstract

The purpose of this study is describing the urgency of synergy on poverty reduction programmes. The complexities of the poor citizen problems, needed a synergy of programmes by stakeholders in the center level and the regions. The study, held in Pemurus Village, Aluh-Aluh, Banjar, South Kalimantan Province on April 2018. The type and approach of the study, descriptive-qualitative, through data collecting interviews with beneficiaries of family hope program, prosperous rice programmes, Indonesia of health programmes, and Indonesia of education programmes. In order to collect data and information, has used focus group discussion with elements of the Regional Poverty Reduction Coordination Team. The results shows, that even though the number of poor people in Banjar Regency low (2.96 percent), far below the national poverty rate (9.82 percent), in fact, citizens access to clean water as a basic needs at Pemurus village is not available. To fulfilling their basic needs: for drinking and cooking, particularly, the villagers, in a simple way by purifying water from the river near their house in a container. And during the rainy season, they use rainwater as an alternative source of clean water. Meanwhile, basic needs: education, health, and food, villagers have been able to access social assistance through Hope Family Program and prosperous rice programs, although there are still many exclusion and inclusion errors in data. Hence, it suggested, the synergy of poverty alleviation programmes, especially clean water and proper sanitation, urgently, with the first increasing coordination at the central level between the Ministry of Social Affairs and the Ministry of Public Works and Public citizens, then followed at the regional level.

Keywords: *synergy; programs; poverty reduction.*

Togiaratua Nainggolan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

DINAMIKA PSIKOLOGIS PEMANFAATAN DATA TERPADU DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI DELI SERDANG

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.01, Desember 2018, hal: 49-62.

Abstrak

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu untuk penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang?. Sejalan dengan rumusan masalah ini, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu untuk penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang-Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan Focuss Group Discussion (FGD) terhadap informan dari pengelola data terpadu dan Organisasi Perangkat Daerah pengelola program penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu diawali dengan respon atas penugasan pengelolaan data terpadu dari pemerintah pusat dalam bentuk respon kognitif, respon afektif, dan respon konatif. Tiga respon ini berlangsung saling mempengaruhi, namun secara kognitif belum sejalan untuk saling menguatkan untuk membangun persepsi atau citra positif. Secara afektif validitasnya dinilai belum meyakinkan, hingga secara konatif hal itu membatasi pemanfaatan data terpadu. Muncul efek domino berupa keragu-ruguan pengelola dalam mempromosikan data terpadu kepada pihak terkait. Bahkan di internal Dinas Sosial Deli

Serdang pun belum sepenuhnya menggunakan data ini. Untuk meningkatkan pemanfaatan data terpadu, selain perbaikan manajemen umum, pihak pengelola di tingkat pemerintah pusat dan daerah hendaknya mempertimbangkan dinamika psikologis yang berkembang sehingga tercipta harmonisasi. Harmonisasi ini diharapkan menghilangkan situasi disonansi kognitif sekaligus mempercepat pemanfaatan data terpadu hingga peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat miskin.

Kata Kunci: *dinamika psikologis; pemanfaatan; data terpadu.*

PSYCHOLOGICAL DYNAMICS USING INTEGRATED DATA ON POVERTY ALEVIATION IN DELI SERDANG

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.01, December 2018, page: 49-62.

Abstract

The problem discussed in this study is how the psychological dynamics of the use of integrated data for handling poverty in the Deli Serdang District Government? In line with the formulation of this problem, the purpose of this research is to describe the psychological dynamics of the use of integrated data for handling poverty in the Deli Serdang District Government in North Sumatra Province. For this reason, research is conducted using a qualitative approach. Data collection uses observation techniques, in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD) of informants from integrated data managers and Regional Organization Organizers managing poverty programs in the Deli Serdang District Government, to be further analyzed descriptively qualitatively according to the research objectives. The results showed the psychological dynamics of integrated data utilization begins with the response to the assignment of integrated data management from the central government in the form of cognitive responses, affective responses, and conative responses. These three responses take place mutually influencing, but cognitively not yet in line to strengthen each other to build positive perception or image. Effectively the validity is considered not convincing, so it conatively limits the use of integrated data. The domino effect appears in the form of manager's hesitation in promoting integrated data to related parties. Even internal Deli Serdang Social Service has not fully used this data. To improve the use of integrated data, in addition to improving general management, managers at the central and regional government levels should consider the evolving psychological dynamics so as to create harmonization. This harmonization is expected to eliminate the situation of cognitive dissonance while simultaneously accelerating the use of integrated data to improve the social welfare of the poor.

Keywords: *psychological dynamics; utilization; integrated data.*

Sakroni (Politeknik Kesejahteraan Sosial)

PERAN PEKERJA SOSIAL SEKOLAH DALAM MENANGANI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH-SEKOLAH DI BANDUNG

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.01, Desember 2018, hal: 63-76.

Abstrak

Maraknya kasus kekerasan pada siswa sekolah sangat mengkhawatirkan orang tua dan para pendidik. Sekolah dituntut untuk membentuk karakter positif serta mencegah terjadinya perundungan. Indonesia sejak lama sudah memperhatikan kesejahteraan anak-anak di sekolah, termasuk memperhatikan siswa yang tidak mampu memperbaiki tingkatan kelas mereka. Secara bertahap, perhatian ini harus ditingkatkan karena kurikulum menjadi lebih sering berubah. Selain itu, pekerja sosial sekolah harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti ruang lingkup misi sekolah yang menjadi lebih luas dan lebih inklusif untuk memastikan rasa hormat siswa. Karena sekolah harus mengutamakan perlindungan terhadap siswa, masalah perundungan di lingkungan sekolah harus menjadi perhatian utama bagi administrator sekolah dan regulator pendidikan. Penelitian kualitatif ini telah mengumpulkan data melalui sumber deskriptif dan metode studi kasus di Sekolah Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memperluas pengetahuan

tentang peran pekerja sosial di lingkungan sekolah untuk mencegah perundungan dan mendidik para korban, pelaku, serta orang tua siswa. Studi ini menggali kontribusi yang diberikan oleh pekerja sosial sekolah dalam membantu sekolah untuk mencegah intimidasi dan perundungan di lingkungan sekolah di Bandung. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah peran pekerja sosial di lingkungan sekolah untuk mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa sekolah yang berpartisipasi dalam penelitian ini sangat membutuhkan pekerja sosial yang dapat mengisi posisi kosong dalam proses pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk mencegah peristiwa perundungan.

Kata kunci: pekerja sosial sekolah, perundungan, intimidasi, konseling.

ROLE OF SCHOOL SOCIAL WORKER IN DEALING WITH BULLYING IN SCHOOL IN BANDUNG

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.01, December 2018, page: 63-76.

Abstract

The rise of violence cases on students is very worrying for parents and educators. School has been challenged to shape the character of a positive person and prevent bullying event. Indonesia have long been concerned about the children prosperity in school. They also pay attention to students who are not able to improve the class degree. Gradually these concerns become more important as curriculum are changing more frequently. In addition, school social worker must consider other factors such as the school has expanded the mission scope and become more inclusive to ensure student respects. As school must consider the student protection as more important, then, the bullying issues in school environment become main attention by school administrator and education regulator. This study is qualitative that collecting the data through descriptive source and study cases method in schools Bandung. The purpose of this research is to expand the knowledge about the role of social workers in schools environment to prevent bullying and educate victims and perpetrators as well as student parents. This study explore the contribution given by school social worker to help school to prevent intimidation and bullying in school environment in Bandung. The main research question is the role of social worker in the school environment to prevent bullying prevention in school environment. Our analysis result concluded that the social worker is an urgent need for the school participating in this study. The social workers can fill the void position in the educational process which they must stay as school social workers to deal with the bullying event prevention.

Keywords: school social workers, bullying, intimidation, counseling.

Mayliza dan Adianto (Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau Jalan H.R. Soebrantas KM 12,5 Simpang Baru Kampus Bina Widya Panam Pekanbaru, Riau)

ANALISIS SWOT PEMBERDAYAAN SUKU BONAI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI ROKAN HULU

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.01, Desember 2018, hal: 77-98.

Abstrak

Suku Bonai adalah masyarakat pedalaman di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang juga disebut sebagai komunitas adat terpencil (KAT) oleh Kementerian Sosial. Suku Bonai merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang juga membutuhkan dan diharapkan merasakan pembangunan dalam berbagai sektor, salah satunya pembangunan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat Suku Bonai di Kabupaten Rokan Hulu sangat membutuhkan pemberdayaan dan pembinaan. Seperti masyarakat pada umumnya, komunitas adat terpencil suku bonai membutuhkan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pakaian dan tempat tinggal. Karena pola pikir mereka yang masih tertutup, tentunya membutuhkan keterbukaan akses dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat Suku Bonai untuk bisa berkembang dan berinteraksi dengan masyarakat luar. Oleh karenanya perlu dilakukan analisis swot yang merupakan sebuah alat yang digunakan untuk meneliti kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya pemberdayaan Suku Bonai untuk meningkatkan kesejahteraannya. Penelitian ini dirancang dengan jenis kualitatif dan pendekatan studi kasus. Informan penelitian ini adalah pihak pemberdaya yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dan pihak yang diberdayakan yaitu Suku Bonai. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, kemudian setelah data terkumpul peneliti menggunakan analisis AFAS dan EFAS dalam Analisis SWOT. Penelitian ini ingin menemukan strategi SO dimana kekuatan dan peluang kuat dan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Situasi ini sangat menguntungkan, karena kekuatan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk peluang yang ada.

Kata Kunci: analisis swot, pemberdayaan KAT dan kesejahteraan.

SWOT ANALYSIS ON EMPOWERING SUKU BONAI IN IMPROVING WELFARE IN OF ROKAN HULU

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.01, December 2018, page: 77-98.

Abstract

Bonai community is an inland society in the Bonai Darussalam District of Rokan Hulu Regency which is also referred to as a Komunitas Adat Terpencil (KAT) by the Ministry of Social Affairs. Bonai community is part of the people of Rokan Hulu Regency who also need and experience development in various sectors, one of which is community development in efforts to improve economic welfare. Bonai community in Rokan Hulu Regency needs empowerment and guidance. Like the other societies, Bonai community needs basic needs such as clothing, food, clothing and shelter. Because of their mindset is still closed, of course, it requires open access to provide information to the Bonai people to be able to develop and interact with outside communities. Therefore it is necessary to do a swot analysis which is a tool used to scrutinize their strength, weakness, opportunities and challenges owned by Social Service for Women Empowerment and Child Protection, Rokan Hulu Regency to empower Bonai community to improve their welfare. This research was designed with a qualitative type and case study approach. The informants of this research are the empowerment agency, the Social Service for Women Empowerment and Child Protection, Rokan Hulu Regency and the empowered party, the Bonai community. Data collection was carried out by observation and interview, then after the data was collected researchers used AFAS and EFAS analysis in the SWOT Analysis. This study wants to find a SO strategy where strengths and opportunities are strong and large. The recommended strategy is progressive, meaning that the organization is in prime and stable condition so that it is possible to continue to expand, increase growth and achieve maximum progress. This situation is very beneficial because the power that is owned can be utilized for the opportunities that exist.

Keywords: empowerment, SWOT analysis, welfare

Laurensius Petrus Sayrani dan Lasarus Jehamat (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur)

MENDORONG KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS DEMOCRATIC GOVERNANCE: PELAJARAN DARI KOTA KUPANG

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.01, Desember 2018, hal: 99-112.

Abstrak

Artikel ini didasarkan pada perdebatan konseptual dalam menempatkan dan memposisikan negara (pemerintah) dalam berbagai urusan sosial yang kian berkembang baik bentuk dan kedalamnya. Posisi itu berkisar dua hal yaitu peran negara yang dominan ataupun sebaliknya. Debat semacam ini cenderung dikotomis yang pada aras praksis juga masih menimbulkan persoalan. Oleh karena itu, melalui artikel ini, penulis menawarkan gagasan *democratic governance* yang bertumpu pada manajemen kolaborasi.

Melalui upaya literatur review dan elaborasi hasil penelitian lapangan penulis, artikel ini diarahkan untuk menunjukkan kemandekan model kebijakan sosial yang cenderung “*state oriented*” sekaligus menunjukkan kemungkinan secara paradigmatis mengenai cara pikir dan cara kerja kebijakan sosial yang lebih efektif dalam konteks Indonesia saat ini. “*State oriented*” memiliki karakter hirarkis yang menempatkan persoalan sosial menjadi sangat institusionalis dimana negara menjadi dominan dalam menentukan apa dan bagaimana masalah sosial dipecahkan. Di saat yang bersamaan, aktor nonnegara juga mengalami pelemahan kapasitas menghasilkan “kebijakan komunitas”. *Democratic governance* sebagaimana yang ditawarkan dalam artikel ini sejatinya adalah gagasan yang mengedepankan kolaborasi antaraktor sebagai basis kebijakan sosial di Indonesia. Model ini bertumpu pada beberapa hal dasar yaitu *resource exchange*, *interdependence*, *trust*, *negosiasi* dan *reciprocity*.

Kata Kunci: *residual institutional model, developmental model of social welfare state, democratic governance model, social policy.*

ENCOURAGING SOCIAL POLICYBASED ON DEMOCRACY GOVERNANCE: LESSONS FROM KUPANG CITY

SOSIO KONSEPSIA Vol.9, No.01, December 2018, page: 99-112.

Abstract

This article is based on a conceptual debate in placing and positioning the state (government) in various social affairs that are increasingly developing in both form and shape. The position revolves around two things, namely the role of the dominant state or vice versa. Such debates tend to be dichotomous which at the practical level also raises problems. Therefore, through this article, the writer offers the idea of democratic governance which is based on collaborative management. Through the literature review effort and the exploration of the results of the author's field research, this article is directed to show the stagnation of social policy models that tend to be “state oriented” while simultaneously showing paradigmatic possibilities about ways of thinking and ways of working social policies more effectively in the current Indonesian context. “State oriented” has a hierarchical character which places social problems into a very institutionalist where the state becomes dominant in determining what and how social problems are solved. At the same time, non-state actors also experienced a weakening of the capacity to produce “community policies”. Democratic governance as offered in this article is actually an idea that promotes collaboration between factors as the basis of social policy in Indonesia. This model relies on several basic things, namely resource exchange, interdependence, trust, negotiation and reciprocity.

Keywords: *residual institutional model, developmental model of social welfare state, democratic governance model, social policy.*

PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNAAN NAPZA MELALUI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DI SURABAYA

COMMUNITY UNDERSTANDING OF THE SOCIAL REHABILITATION FOR DRUG ABUSE IN INSTITUTION OF MANDATORY RECIPIENTS IN SURABAYA

Soetji Andari

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS Yogyakarta)
Jl. Kesejahteraan Sosial No 1, Yogyakarta
Email: soetjiandari@gmail.com

diterima: 21 Juni 2019; 6 Oktober 2019; Disetujui: 29 Nopember 2019

Abstrak

Pengetahuan masyarakat tentang Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) berhasil apabila pemerintah memberikan informasi yang jelas mengenai dampak Napza melalui sosialisasi di lingkungan masyarakat. Sosialisasi IPWL di lingkungan masyarakat sebagian sudah dilaksanakan, termasuk proses rehabilitasi dan edukasi tentang Napza oleh konselor atau *volunteer*. Masyarakat ikut membantu pemerintah mensosialisasikan hal tersebut, diharapkan memberikan perubahan positif bagi sebagian masyarakat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui masyarakat tentang IPWL sebagai tempat wajib lapor bagi pengguna Napza, menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Karakteristik responden sampel yang diambil dari tokoh masyarakat yang tinggal di sekitar IPWL merupakan tokoh masyarakat, tokoh agama maupun aparat kelurahan sebanyak 60 orang. Hasil penelitian pengetahuan masyarakat tentang IPWL 75,3 persen responden tidak mengetahui IPWL sebagai tempat wajib lapor dan rehabilitasi bagi pengguna Napza. 54 persen responden tidak mengetahui dampak penggunaan Napza mengakibatkan terganggu fungsi otak dan perkembangan moral pemakainya, intoksikasi (keracunan), *overdosis* (OD) yang menyebabkan kematian, 78,3 persen responden tidak mengetahui prosedur pelayanan yang diberikan IPWL. Pengetahuan masyarakat tentang peredaran Napza 63,3 persen responden tidak mengetahui karena tidak mampu menjelaskan peredaran Napza di sekitar lingkungan. Pengetahuan masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam memberi rangsangan untuk berpartisipasi dalam pencegahan peredaran Napza. IPWL sangat berperan dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban Napza melalui kerjasama dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba serta mendapat dukungan masyarakat, pemerintah, maupun lembaga swasta.

Kata Kunci: *pengetahuan, masyarakat, Napza, wajib lapor*

Abstract

Public knowledge of the institution of mandatory recipients (IPWL) is successful if the government provides clear information about the impact of drugs through socialization in the community. Some socialization of IPWL in the community has been carried out, including the process of rehabilitation and education about drugs by counselors or volunteers. The community will help the government to socialize this, it is hoped that it will bring positive change for some people. The aim of this research is to find out the public about IPWL as a mandatory place to report for drug users, using quantitative descriptive research methods with purposive sampling as a sampling technique with special consideration so that it is suitable to be sampled. Characteristics of the sample respondents taken from community leaders who live around IPWL are community leaders, religious leaders and village officials as many as 60 people. The results of public knowledge research about IPWL 75.3 percent of respondents did not know IPWL as a mandatory place for reporting and rehabilitation for drug users. 54 percent of respondents did not know the effects of drug use resulting in impaired brain function and the moral development of the wearer, intoxication (poisoning),

overdose (OD) which causes death. 78.3 percent of respondents did not know the service procedures provided by IPWL. Public knowledge about drug trafficking 63.3 percent of respondents did not know because they were unable to explain drug trafficking around the environment. Public knowledge has a great influence in providing stimuli to participate in preventing drug trafficking. IPWL is very instrumental in carrying out rehabilitation of drug victims through collaboration with medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics addicts and has the support of the community, government, and private institutions.

Keywords: *knowledge, community, drugs, compulsory reporting*

PENDAHULUAN

Masyarakat khususnya pengguna Napza masih banyak yang tidak mengetahui Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). IPWL merupakan institusi yang merehabilitasi pecandu melalui sinergi kepolisian dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Upaya pencegahan peredaran narkotika dengan cara rehabilitasi di Indonesia tidak akan berhasil jika kementerian dan lembaga terkait tidak memiliki sinergitas yang sama melalui Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). IPWL dibentuk berdasarkan Keputusan Menkes RI No.18/Menkes/SK/VII/2012. IPWL bertujuan merangkul pengguna atau pecandu narkoba, sebagai proses rehabilitasi. Dengan melapor ke IPWL, maka pecandu narkoba bisa terhindar dari jeratan hukum. Misalnya, dalam razia salah seorang pecandu kedapatan sedang menggunakan narkoba, maka ketika belum pernah melapor ke IPWL, pecandu akan terancam hukuman penjara maksimal 6 bulan.

Namun keberadaan IPWL tidak menyurutkan peredaran narkoba di Surabaya Berdasarkan data pada 2018 Anak pengguna narkotika dan zat adiktif (Napza) di Jawa Timur tahun ini meningkat hingga empat kali lipat dibanding 2017. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim mencatat ada peningkatan 400 persen kasus usia anak terlibat penggunaan Napza ini (Tribunjatim, 2018). Para pelajar terdeteksi setelah BNNK Surabaya melakukan tes urine dikalangan pelajar secara acak. Jawa Timur merupakan daerah dengan intensitas penyalahgunaan narkoba yang besar dengan

kondisi gawat darurat narkoba, oleh karenanya peran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur selaku institusi hukum khusus masalah narkoba harusnya intens dalam memberantas terhadap tindak pidana narkoba mengingat jumlah penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Timur sebanyak 608.520 (Putra, 2017)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh tentang rehabilitasi Napza adalah rehabilitasi yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para mantan pengguna Napza agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pelayanan rehabilitasi dirancang untuk meningkatkan proses perbaikan klien yang mengalami gangguan mental dalam mengontrol gejala yang ditimbulkan, beberapa faktor yang mempengaruhi koping seperti dukungan keluarga, dukungan konselor dan dukungan orang lain serta lingkungan sekitarnya. Mekanisme koping yang digunakan partisipan yaitu denial dan proyeksi. Hal ini terlihat dari penolakan dan rasa marah saat pertama kali berada di wisma dan setelah proses rehabilitasi berjalan ketiga partisipan mampu menjalani proses rehabilitasi. Dukungan keluarga, konselor, orang lain dan lingkungan, akan menciptakan koping yang adaptif, sehingga selama partisipan menjalani rehabilitasi semakin efektif dan efisien (Rahmawati, 2016).

Pecandu Napza adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika

dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (Anggreni, 2015). Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengaruh faktor penyalahgunaan Napza pada remaja akibat dari faktor lingkungan keluarga yaitu keharmonisan keluarga, kesibukan orang tua, orang tua permisif. Faktor yang paling dominan dalam penyadaran remaja penyalahguna adalah ibadah dalam keluarga. Artinya Orang tua perlu menciptakan ikatan keluarga yang kuat melalui hubungan emosional dan rasa empati pada anak (Oktavia, Asmoro, & Melaniani, 2016).

Pada kenyataannya beberapa kasus penangkapan pecandu Napza, mereka terbukti tidak terlibat dalam pengedaran barang tersebut, dengan kata lain mereka hanya sebagai pengguna. Kasus yang berkaitan dengan setelah diputuskan dan diatuhkan vonis pengadilan maka para pengguna tersebut dapat diajukan untuk menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Beberapa kasus Napza terkendala pada saat pengguna, baru menyadari pentingnya rehabilitasi setelah terjerat hukum.

Padahal seharusnya, dalam kondisi terjerat hukum atau tidak setiap pengguna Napza perlu segera mendapatkan pertolongan melalui proses rehabilitasi. Keterlibatan keluarga dan lingkungan terdekat dibutuhkan untuk menangani penggunaan obat terlarang. Keluarga segera bertindak dengan mulai mencari suatu lembaga rehabilitasi bagi para pecandu Napza. Apabila kondisinya demikian, maka para penyalahguna Napza segera mendapatkan layanan rehabilitasi. Peran strategis keluarga dalam upaya membentengi anggotanya dari perilaku penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza).

Penyalahgunaan Napza pada individu, umumnya disebabkan selain adanya keterikatan secara intim terhadap kelompok pengguna narkoba. Selain itu disebabkan proses pembelajaran yang diperoleh dari lingkungan sosial terdekat. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab individu menyalahgunakan Napza dan menjadi ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika. Faktor lingkungan pengguna Napza berperan dalam penyalahgunaan Napza karena faktor kepribadian anti sosial dan psikopatik, kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi. Kondisi keluarga yang berkaitan dengan keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak dan kelompok teman sebaya, berpengaruh terhadap penyalahgunaan Napza. Pengguna Napza mudah diperoleh dan tersedianya pasaran secara resmi maupun tidak resmi. Faktor pendorong penyalahgunaan Napza bagi pengguna antarlain akibat faktor dalam diri sendiri seperti kepribadian, fisik, dan faktor dari luar seperti faktor permasalahan keluarga, faktor sosial dengan lingkungan atau pergaulan dengan teman sebaya (Anggreni, 2015).

Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan, bahwa setiap pengguna Napza yang setelah vonis pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi Napza, dalam hal ini hanya sebatas pengguna saja, maka mereka berhak mengajukan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Dengan demikian, regulasi ini memberi kesempatan bagi para pecandu yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan Napza dapat direhabilitasi agar terbebas dari kondisi tersebut sehingga mampu kembali melaksanakan peran dan fungsi dalam hidup bermasyarakat.

Secara garis besar yang dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, sebagai berikut:

1. Pengguna, korban Penyalahguna, Pecandu Narkotika mendatangi Lembaga/Institusi Kesehatan atau Sosial yang ditunjuk untuk melakukan lapori diri
2. Mekanisme pertama adalah dilaksanakannya skrining awal (identitas, sejarah singkat penggunaan, riwayat pengobatan)
3. Dilanjutkan dengan pelaksanaan asesmen (semi struktur wawancara dengan format khusus) yang bertujuan untuk melihat derajat keparahan pada klien bersangkutan
4. Hasil asesmen dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan terapi bagi klien bersangkutan. Terapi disini dapat berbentuk rawat jalan/ rawat inap. Catatan penting: perencanaan terapi merupakan sebuah kesepakatan antara Pihak penyedia layanan dengan klien bersangkutan
5. Penyerahan kartu lapori diri pada klien

Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) merupakan lembaga rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial yang ditunjuk oleh pemerintah, sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 31 tahun 2012 tentang

Penunjukan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori bagi Korban Penyalahgunaan Napza. Dalam hal ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) terus berupaya keras demi menyuksekkan kampanye pencegahan penyalahgunaan Napza melalui gerakan rehabilitasi bagi 100 ribu korban. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan tempat rehabilitasi baik milik pemerintah maupun komponen masyarakat. Para pengguna Napza yang menginginkan sembuh dan langsung melapor ke BNN tidak akan dipidana (dipenjara).

Kementerian Sosial dalam tahun 2015 mendapatkan mandat untuk melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap 100 ribu pecandu dan korban penyalahguna Napza. Mandat itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Rehabilitasi dilaksanakan selama enam bulan sejak diluncurkan pada Januari 2015, bertujuan untuk abstinens dan perubahan menuju perilaku normatif serta mandiri bagi para pecandu dan penyalahguna Napza. Dalam implementasinya, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Napza, Kementerian Sosial kemudian menetapkan 160 lembaga rehabilitasi sebagai IPWL untuk melaksanakan program rehabilitasi sosial 10 ribu pecandu dan penyalahguna Napza. Penetapan itu dilakukan berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 41/HUK/2015 pada 24 April tahun 2015.

Keberadaan IPWL diharapkan mampu menyelamatkan para pengguna narkotika dan tidak lagi menempatkan para pengguna sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku tindak kriminal. Pengguna narkotika tidak lagi Napza “bersembunyi” dan tidak takut dihukum,

untuk melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) agar mendapatkan rehabilitasi. Kedua, dapat memberikan Pengetahuan dan persepsi yang sama baik masyarakat maupun para penegak hukum bahwa pidana rehabilitasi adalah hukuman yang paling tepat dan bermanfaat bagi pengguna Napza dalam menyongsong kehidupan masa depannya. Ketiga, dalam rangka Lapas *Reform* agar Lapas tidak *over load*, dan terakhir dapat menurunkan prevalensi pengguna Napza sebagai indikator tingkat keberhasilan menangani masalah peredaran narkoba di Indonesia (BNN, 2016).

IPWL dituntut untuk memiliki kesiapan melakukan rehabilitasi sosial bagi korban Napza. Sebagai indikator keberhasilan rehabilitasi sosial bagi korban Napza, maka selayaknya IPWL mampu melakukan proses rehabilitasi sosial sesuai dengan standar yang berlaku (sebagaimana Permensos Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan standar rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza yang dikukuhkan melalui Permensos Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) sehingga hasilnya dapat memadai.

Semangat menurunkan prevalensi pengguna Napza oleh pemerintah, maka keberadaan IPWL menjadi bagian penting untuk mendukung hal tersebut. IPWL dituntut untuk memiliki kesiapan melakukan rehabilitasi sosial bagi korban Napza. Sebagai indikator keberhasilan rehabilitasi sosial bagi korban Napza, maka selayaknya IPWL mampu melakukan proses rehabilitasi sosial sesuai dengan standar yang berlaku Permensos Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan standar rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza yang dikukuhkan melalui Permensos Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penting melakukan penelitian untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang menangani korban Napza. Pada penelitian ini berupaya untuk mengetahui Pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Institusi Penerima Wajib Lapor sebagai salah satu lembaga yang menangani dan merehabilitasi pengguna Napza. Pada penelitian ini untuk menjawab bagaimanakah Pengetahuan masyarakat tentang Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) menangani korban Napza yang menjalani program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Penerima Wajib Lapor (IPWL) direhabilitasi?

METODE

Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk mengetahui Pengetahuan masyarakat tentang Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan purposive sampling, menyarankan tentang ukuran sampel untuk penelitian ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500 menurut Roscoe dalam Sugiono (2012). Responden adalah penduduk sekitar IPWL, berusia di atas 17 tahun, merupakan tokoh masyarakat maupun pengurus lembaga masyarakat dan layak dijadikan responden representatif (mewakili) sebanyak 60 orang merupakan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat kelurahan tepat IPWL berada. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan

masyarakat berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga, serta keberadaan Institusi Penerima Wajib Lapori sebagai salah satu lembaga yang menangani dan merehabilitasi pengguna Napza. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner tertutup yang dikumpulkan dari responden. Analisis data disajikan secara deskriptif dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Penelitian tentang Pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan lembaga penanganan Napza oleh IPWL. Lokasi penelitian di Kota Surabaya di beberapa IPWL seperti Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Surabaya, Yayasan Inabah XIX, dan Yayasan Orbit.

Peneliti mengumpulkan data menggunakan angket dan wawancara terstruktur, sehingga akan sangat memudahkan responden untuk menjawab, karena wawancara tersebut sudah terstruktur melalui instrumen, dan responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan pilihannya. Wawancara ditujukan responden penelitian yakni masyarakat yang tinggal berdekatan dengan beberapa IPWL di Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Wajib Lapori yang dilaksanakan setiap IPWL adalah: pengguna, atau korban penyalahgunaan Napza, pecandu Napza yang mendatangi Institusi kesehatan atau Sosial yang ditunjuk untuk melakukan lapori diri. Mekanisme awal dilaksanakannya skrining awal (identitas, sejarah singkat penggunaan, riwayat pengobatan). Pelaksanaan asesmen (semi struktur wawancara dengan format khusus) yang bertujuan untuk melihat derajat keparahan pada klien bersangkutan. Penyusunan perencanaan terapi bagi klien bersangkutan. Terapi disini dapat berbentuk rawat jalan/rawat inap. catatan penting: Perencanaan terapi merupakan sebuah kesepakatan antara Pihak penyedia layanan

dengan klien bersangkutan. Penyerahan kartu lapori diri pada klien.

Salah satu program kegiatan dikenalkan Kartu IPWL. Kartu ini sebagai identitas bagi seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi sosial korban tindak penyalahgunaan Napza. Pemegang kartu itu tidak bisa ditangkap karena sedang menjalani rehabilitasi. Hal ini berdasarkan pada PP Nomor 25 Tahun 2011 Pasal 10 tentang IPWL, disebutkan bahwa IPWL mengeluarkan kartu dan pemegangnya tidak boleh ditangkap. Maksimal penggunaan kartu ini adalah 2 kali. "Jadi apabila pengguna Napza ini sudah 3 kali tertangkap karena kasus penggunaan Napza, maka pengguna tersebut harus melalui proses hukum, baru di rehabilitasi.

1. PSPP Surabaya

Dari data surveilans nasional pada tahun 2009 dijumpai 42 persen siswa SLTA laki-laki dan 6 persen siswa perempuan pernah mencoba menggunakan Napza. Lebih parah lagi dari pengguna diatas telah menggunakan jarum suntik, yang sangat rentan terinfeksi HIV/AIDS dan Hepatitis C. Dinas Sosial melalui UPT Rehsos ANKN Surabaya memberikan bimbingan kepada para anak-anak nakal, eks Napza dan pecandu Napza. Khususnya untuk para eks pengguna Napza UPT Rehabilitasi Sosial berperan dalam memulihkan, membangkitkan dan mengembalikan kepercayaan diri klien agar dapat menjalani kegiatan seperti sedia kala.

Semua klien di berikan bimbingan mental atau yang sekarang dikenal *Character Building*, membangun disiplin diri dan kelompok, terbentuk kebiasaan positif, sehingga akan terbentuk pola pikir atau mindset pengguna Napza lebih baik. Upaya rehabilitasi dibina selama 6 bulan klien dapat mempunyai bahan dan semangat untuk membentuk dirinya lebih baik. Salah satu eks klien UPT ANKN mengatakan bahwa banyak

sekali manfaat yang di dapatkan pada waktu di asramakan di ANKN. Mereka sadar bahwa apa yang dulu mereka lakukan adalah suatu tindakan yang tidak bermanfaat dan merugikan orang lain. Selain bimbingan mental, di UPT ini juga diberikan bimbingan ketrampilan seperti ketrampilan service elektro, otomotif dan lain lain. Mantan Klien yang telah keluar atau telah menjalani bimbingan di panti selama 6 bulan diberikan bantuan stimulan sebagai modal awal pengembangan ketrampilan yang telah di dapatkan para eks klien semasa belajar di IPWL ANKN.

2. IPWL Orbit

Yayasan Orbit adalah organisasi non pemerintah yang berdiri pada Juli tahun 2005 dengan akte pendirian oleh notaris Joyce Sudarto, SH. Pembentukan yayasan ini berdasar atas kepedulian dan keprihatinan terhadap permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Yayasan Orbit digawangi oleh para aktivis Napza dan HIV/AIDS yang berasal dari komunitas Korban Napza di Surabaya dengan orientasi pada program pemberdayaan masyarakat.

Yayasan Orbit berupaya untuk mewujudkan insan pembangunan dan bebas dari Napza, mempunyai misi untuk melibatkan masyarakat sipil dalam menggunakan hak sipil dan politik; memfasilitasi masyarakat dalam berperan aktif di bidang sosial, ekonomi, dan budaya; dan mendorong masyarakat untuk mampu secara personal dan kelompok sebagai pelaku pembangunan di segala aspek. Dalam menjalankan visi dan misi, yayasan Orbit telah dan akan membangun kerjasama dengan semua lintas sektor yaitu pemerintah daerah, elemen masyarakat dan LSM. Prinsip organisasi ini memegang asas transparansi dan akuntabilitas, baik itu pada aspek pelaksanaan dan pendanaan.

Yayasan Orbit melaksanakan kegiatannya

memiliki strategi yaitu mengupayakan pendekatan lembaga pemerintah daerah *political will* yang representatif dan akomodatif dalam pembangunan; mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang relevan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; mendorong, memfasilitasi, meningkatkan dan mengembangkan kerjasama kemitraan secara efektif, efisien dan terbuka; penguatan kesadaran hukum dan HAM pada masyarakat sipil; dan membentuk komunitas agen perubahan masyarakat yang terpadu dan berdasar pada aspek pemberdayaan.

Pada tahun 2015, Yayasan Orbit memperoleh Penghargaan Inovasi Penanggulangan AIDS sebagai LSM terbaik dalam mengurangi dampak buruk Napza dalam Pertemuan Nasional AIDS V di Makassar. Penghargaan ini diberikan karena Orbit telah melakukan inovasi dalam penanganan Napza yaitu dalam bentuk inovasi sosial, kesehatan, dan hukum. Inovasi sosial yang dilakukan yaitu penjangkauan komunitas pengguna Napza baik komunitas yang berpotensi AIDS dari kelompok terpapar seperti sopir, waria, dan anak jalanan. Yayasan Orbit melakukan edukasi masyarakat sebagai kader yang mendeteksi dan mencegah pengembangan HIV/AIDS secara dini. Edukasi ini ditujukan untuk mengurangi penggunaan Napza suntik yang berisiko HIV/AIDS, menyadarkan pengguna Napza untuk peduli kesehatan, dan mendekatkan pengguna Napza dengan institusi kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit. Inovasi kesehatan yang dilakukan yaitu melalui panti rehabilitasi yang mampu menampung 30 orang kelayan. Inovasi hukum yang dilakukan yaitu pendampingan di pengadilan secara gratis bagi pengguna Napza dari keluarga miskin. Sepanjang tahun 2015, Orbit telah menangani 41 pengguna dengan 16 orang dikenai pasal 127 UU Narkotika, bahkan 11 dari 16 orang tersebut memperoleh vonis rehabilitasi dan kerja sosial

(Antara Jatim, 2015). Layanan bantuan hukum diberikan Orbit mulai dari persidangan hingga putusan pengadilan secara gratis dengan syarat keluarga pengguna mampu menunjukkan identitas keluarga tidak mampu, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kartu Keluarga Miskin (Gakin), atau Kartu Indonesia Sehat KIS).

Yayasan Orbit merencanakan kajian kebijakan untuk memecahkan masalah Napza agar menjadi pedoman implementasi para perencana dan pengambil keputusan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selain itu melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya. Yayasan melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan program kesehatan masyarakat dan HAM dan memberikan akses kegiatan dan pelayanan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

IPWL Yayasan Inabah XIX Surabaya, berada dalam lingkungan Pondok pesantren Inabah XIX Surabaya merupakan salah satu tempat rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan Napza. Dasar pemikiran yang bersifat religi dan menekankan pada pemulihan diri para korban agar lepas dari ketergantungan dari Napza melalui pendekatan secara islami. Suatu lembaga yang dinaungi oleh yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya ini, berseketariat di Jl. Sidotopo nomor 146 Surabaya. Sedangkan tempat rehabilitasinya sendiri bertempat di Jl. Raya Semampir nomor 46 Surabaya. Letaknya yang jauh dari hingar bingar kota ini tentu sangat mendukung dalam pemulihan para pecandu. Pembinaan dan upaya yang dilakukan untuk penyembuhan ditempuh dengan cara:

- a. Terapi penyadaran dengan Agama Islam menggunakan metode *Dzikrullah* Tarekat

Qadiriyyah dan Naqshabandiyah.

- b. Pendekatan medis bila diperlukan.

Dalam implementasinya, terapi pembinaan di Pondok Pesantren Inabah XIX Surabaya memiliki tiga aspek terapi pembinaan, yang antara lain;

- a. Terapi mandi taubat.
- b. Terapi *dzikir*.
- c. Terapi penegakan shalat.

IPWL Yayasan Inabah XIX Surabaya melaksanakan tiga terapi pembinaan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh demi keberhasilan terapi terhadap korban penyalahgunaan Napza:

- a. Terapi Mandi Taubat, Proses terapi pembinaan dengan bentuk terapi mandi yang berkaitan dengan upaya penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan Napza yang selama ini telah dilaksanakan di Pondok Pesantren Inabah XIX Surabaya disebut juga dengan “Mandi taubat”. Proses terapi mandi taubat ini diawali dengan cara anak bina harus berwudhu dahulu dilanjutkan dengan mandi taubat dengan bacaan yang telah ditentukan. Proses terapi mandi ini dilaksanakan setiap hari pada pukul 02.00 WIB. Yaitu pelaksanaannya selama anak bina masih mengikuti terapi Pembinaan. Hal ini biasanya dilakukan sebelum anak bina korban penyalahgunaan Napza melakukan sholat sunnah dan *dzikir*. Tujuan dari terapi mandi adalah untuk meredam atau mendinginkan gejala emosi yang ada dalam tubuh sebagai akibat pengaruh dari Napza.
- b. Terapi *Dzikir*, terapi dengan melakukan *dzikir*; dilakukan setelah menjalankan ibadah sholat, baik itu shalat wajib maupun sholat sunnah lainnya. Terapi *dzikir* bertujuan untuk menentramkan gejala-gejala jiwa anak bina yang tidak stabil agar sebagai akibat dari zat-zat adiktif daripada Napza.

- c. Terapi Penegakan Sholat, terapi dengan dasar/pondasi agama. Adapun pelaksanaannya meliputi shalat wajib dan sholat sunnah. Dalam usaha penegakan sholat ini anak bina dididik agar melaksanakan sholat sesuai dengan waktu jadwal yang ada. Terapi ini dilakukan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dalam kedisiplinan dalam melaksanakan sholat. Pelaksanaan sholat ini pada masing-masing waktu selalu dilaksanakan secara berjama'ah baik sholat wajib ataupun sholat sunnah.

3. IPWL Inabah

Pondok Pesantren Inabah XIX dalam memberikan pelayanan terhadap anak bina korban penyalahgunaan Napza melalui pembinaan, khususnya mereka yang menjadi pengurus harian selalu berusaha memantau, mengamati, mencatat, melayani seluruh aktivitas dan kebutuhan bagi anak bina. Hal inilah merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung atas keberhasilan terapi yang diberikan di Pondok Pesantren Inabah XIX Surabaya. Misalnya Pembina menganggap anak bina sebagai teman yang membutuhkan perhatian, pembina mengusahakan dan mengadakan ketrampilan, berupa ketrampilan tangan, musik, pelatihan bengkel dan kegiatan lainnya. Pembina sebagai terapis yang profesional berusaha membantu klien (anak bina) yang mana merupakan wujud terjadinya hubungan antara pembina dan anak bina yang harmonis, sehingga proses terapi yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Suryalaya Surabaya kepada korban penyalahgunaan Napza akan terstruktur dengan proses terapi yang ada.

Anak bina diberikan terapi berupa proses klinis melalui pemutusan dan penghilangan terhadap Napza. Proses klinis yang ditempuh dengan cara uji kadar Napza. Uji kadar Napza ini dilakukan lewat pemeriksaan medis. Proses

penghilangan atau pemutusan terhadap Napza dengan cara anak bina diberikan ruang dan tempat khusus sesuai dengan kadar Napza, misal terkena putaw, heroin, morfin, ganja dan lain-lain. Sehingga cara penghilangan atau pemutusan ini dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari pembina, meliputi; alat kerangkeng untuk anak bina yang berniat kabur, bangunan gedung yang tertutup rapat, adanya pagar besi yang kuat, dan sebagainya sehingga anak bina tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut. Dari awal masuk ke pembinaan anak bina langsung mengikuti terapi pembinaan yang berlaku di Pondok Pesantren Inabah XIX Surabaya.

Terapi lanjutan diberikan agar anak bina yang telah mendapatkan penyembuhan selama 3 bulan di Pondok Pesantren Inabah XIX Surabaya mendapatkan terapi yang lebih intensif, efektif dan efisien. Sehingga mereka yang mengikuti terapi lanjutan tersebut dapat terkontrol dengan baik aktivitas, perilaku dan perbuatan sehari-hari yang dijalaninya. Agar pelayanan terapi pembinaan berlangsung dengan intensif, efektif dan efisien, maka perlu adanya Pengetahuan mengenai terapi pembinaan yang diberikan oleh Pondok Pesantren Suryalaya Surabaya. Pengetahuan diberikan kepada anak bina (santri) juga diberikan kepada orang tua dan keluarga anak bina (santri). Upaya penyembuhan yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Inabah XIX Surabaya agar memberikan hasil yang diharapkan, maka Pengetahuan terhadap terapi perlu diperhatikan oleh orang tua dan keluarga anak bina. Pengguna narkotika setelah mendapatkan terapi pembinaan dan terapi lanjutan diharapkan orang tua dan keluarga masih terjadi hubungan dan kontak komunikasi atas pasca rehabilitasi agar diketahui perkembangan anak bina. Hal tersebut lembaga dapat diketahui bahwa peranan orang tua dalam perkembangan seorang anak sangat

penting mengubah perilaku anak bina kembali kepada jalan yang diharapkan. Bila kondisi anak bina, orang tua dan pembina selaku terapis terjadi komunikasi yang erat dalam upaya penyembuhan anak bina tersebut, maka terapi pembinaan yang dilakukan di IPWL menimbulkan dampak yang harmonis sehingga keberhasilan dalam terapi pembinaan ini akan mudah tercapai dengan baik.

Penyalahgunaan Napza pada individu, umumnya disebabkan adanya keterikatan secara intim terhadap kelompok pengguna narkoba, dan proses pembelajaran yang diperoleh dari lingkungan sosial terdekat. Beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab individu menyalahgunakan Napza dan menjadi ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika. Bahwa di antara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan Napza adalah faktor kepribadian anti sosial dan psikopatik, kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi, kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak, kelompok teman sebaya, dan Napza itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi. Faktor pendorong di antaranya faktor dari dalam diri sendiri seperti kepribadian, fisik, dan faktor dari luar seperti faktor permasalahan keluarga, faktor sosial dengan lingkungan atau pergaulan dan terakhir dengan sedikit penalaran peneliti faktor kemudahan memperoleh Napza, lingkungan (keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat), faktor individu itu sendiri. Pengetahuan perseptif prediktor psikososial dan perseptif belajar sosial dalam hal Perseptif belajar dinyatakan bahwa perilaku berhubungan dengan penyalahgunaan Napza adalah perilaku yang dipelajari. Problem penyalahgunaan Napza tidak dipandang sebagai simptom dari penyakit, tetapi lebih dilihat sebagai masalah

kebiasaan. Perspektif teori belajar dinyatakan bahwa perilaku yang berhubungan dengan penyalahgunaan Napza adalah perilaku yang dipelajari. Problem penyalahgunaan Napza tidak dipandang sebagai simptom dari penyakit, tetapi lebih dilihat sebagai masalah kebiasaan. Teori ini lebih menekankan peran belajar dan pemeliharaan perilaku bermasalah yaitu penyalahgunaan Napza (Anggreni, 2015).

Kondisi Masyarakat

Sosialisasi IPWL di lingkungan masyarakat sebagian sudah dilaksanakan, mengenai tempat dan proses rehabilitasi yang dan pelaksanaan edukasi tentang Napza secara lengkap dari para konselor atau *volunteer* yang diturunkan. Dengan ikut membantu pemerintah mensosialisasikan hal tersebut, diharapkan memberikan perubahan positif bagi sebagian masyarakat. Jika ada kemampuan, kerjakan dan cari yang dapat diajak kerjasama agar materi yang disosialisasikan dapat diterima masyarakat dengan baik dan dapat dicerna secara mudah sehingga *lost generation* dapat dicegah, dan tahun 2015 Indonesia bebas Napza dapat tercapai.

Masyarakat di sekitar IPWL masih banyak yang tidak mengetahui keberadaan IPWL sebagai institusi pertama yang harus diketahui bagi pengguna Napza yang masih enggan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Menurut salah satu aparat, “mereka tidak berani melaporkan ke IPWL, karena takut ditangkap polisi dan takut mendapatkan stigma negatif”. Pengguna narkotika merasa takut untuk melapor karena stigma negatif dan pengucilan masyarakat. Hal tersebut karena pengetahuan masyarakat tentang IPWL masih minim. Masyarakat yang tinggal di sekitar institusi belum mendapatkan informasi tentang cara melapor, persyaratan hingga pemanfaatan IPWL. Hal tersebut pernah

terjadi kasus, salah satu warga yang pulang dari rantau menderita sakit akibat narkoba dan tetap mengonsumsi barang terlarang agar bisa bertahan hidup. Warga sekitar mengetahui akan tetapi tidak peduli sehingga tidak dilaporkan ke IPWL setempat. Keluarganya tidak mengetahui cara menangani korban penyalahgunaan Napza. Hal ini berarti masih belum mengetahui tugas dan fungsi IPWL dalam menangani korban Napza.

Masyarakat memberi stigma terhadap korban atau pengguna Napza sehingga dijauhi dalam pergaulan karena dianggap memiliki penyakit menular (Putranawan: 2016). Masyarakat termasuk keluarga memiliki perasaan takut untuk melaporkan pengguna Napza dengan alasan takut dimasukkan dalam jeruji penjara. Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan, pasti akan melakukan segala cara untuk menghindari jeruji besi. Hukum di Indonesia memang mengatur penyalahgunaan Napza akan diproses dan diberi hukuman. Akan tetapi hukuman tidak selalu harus masuk penjara, karena juga dapat dimasukkan tempat rehabilitasi dengan syarat mau menyerahkan diri secara sukarela ke IPWL. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba secara komprehensif adalah melalui pendekatan *Harm Minimisation*, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga kegiatan utama yaitu *Supply control*, *Demand reduction* dan *Harm reduction*. IPWL sebagai institusi yang menangani pengguna Napza dilakukan secara terpadu oleh swadaya masyarakat lainnya, menyeluruh mulai dari upaya preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan secara berkesinambungan.

Masyarakat termasuk keluarga pengguna Napza masih meyakini kalau dilaporkan akan merusak alasan nama baik keluarga maupun lingkungan sekitar. Seseorang yang telah tejerat Napza bukan hanya dirinya sendiri yang hancur,

melainkan juga keluarga dan masyarakat. Hal tersebut karena tidak ingin merusak nama baik keluarga, maka para pecandu bersembunyi dan berusaha tidak melibatkan keluarga, meskipun pada akhirnya keluarga terseret juga. Korban Napza tidak bisa disembuhkan secara instan, tetapi membutuhkan waktu dan proses yang panjang dengan biaya yang tidak sedikit.

Pengguna Napza ketakutan akan kehilangan pekerjaan yang dapat merusak masa depan yang telah direncanakan akan menyulitkan mereka. Jadi tidak salah, Napza menjadi barang penghancur masa depan. Merusak pekerjaan yang selama ini telah dirintis dari awal. Tidak ada perusahaan yang mau menampung pekerja seorang pecandu, selain itu beberapa universitas mengeluarkan mahasiswa yang diketahui menjadi pecandu atau pengedar. Di lingkungan sekitarnya seorang pecandu tentu mendapat stigma negatif.

Pengetahuan Masyarakat tentang IPWL

Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) meliputi pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009). Pengetahuan Masyarakat Tentang Institusi Penerima

Berdasarkan usia, jumlah responden terbanyak berusia antara 17- 26 tahun, 29 persen, kemudian (27-36 tahun) 27 persen, kelompok usia (36-46 tahun) 22 persen, dan paling sedikit usia (57-66 tahun) 7 persen. Semua responden merupakan kelompok umur termasuk pertumbuhan fisiknya dewasa awal hingga usia 60 tahun adalah masa dewasa masa ini dibagi dalam 3 periode yaitu: Masa dewasa

awal dari umur 21 tahun sampai umur 40 tahun. Masa dewasa pertengahan, dari umur 40 tahun sampai umur 60 tahun dan masa akhir atau usia lanjut, dari umur 60 tahun sampai mati (Monks, 2014)

Pada usia antara 17-30 tahun merupakan masa peralihan dari masa remaja ke masa tua umumnya mengetahui tentang peredaran Napza. Pada masa ini seseorang tergolong pribadi yang benar-benar dewasa atau matang (*maturity*). Segala tindakannya sudah dapat dikenakan aturan hukum yang berlaku. Kelekatan adalah ikatan emosional yang mendalam antara satu individu dengan yang lain, yang dapat memberikan rasa aman, tergantung dari kualitas hubungan tersebut (Agusdwitanti & Retnaningsih, 2015). Artinya responden yang berusia di atas 17 tahun atau pada masa dewasa awal mengerti dan mengetahui tentang Napza. Kemampuan informasi mencapai puncak pada masa remaja dan tetap konstan pada permulaan dewasa awal, akan tetapi mulai mengalami penurunan pada akhir masa dewasa awal.

Jenis kelamin responden 67 persen laki-laki dan 33 persen perempuan. Lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki. Pengetahuan seseorang tidak dipengaruhi oleh jenis kelaminnya. Pengetahuan tentang Napza tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin seseorang, bila seseorang masih produktif, berpendidikan, atau berpengalaman maka ia akan cenderung mempunyai tingkat pengetahuan tentang Napza yang cukup tinggi. Penggunaan Napza sangat membahayakan bagi kesehatan baik mental maupun fisik penggunaannya. Pengguna Napza beresiko gangguan perkembangan otak, bunuh diri dan depresi kehilangan memori, risiko tinggi terhadap perilaku seksual, kecanduan, pengambilan keputusan terganggu, prestasi akademis yang buruk, kekerasan, dan kecelakaan kendaraan bermotor. Pengetahuan tentang Napza dan penyalahgunaannya

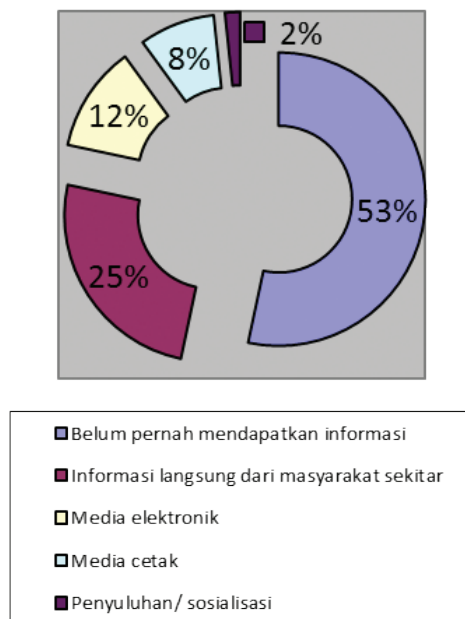
akan mengarahkan remaja untuk tidak pernah menggunakan bahkan mencoba zat berbahaya tersebut serta bersikap menolak ajakan teman maupun pengaruh lingkungan untuk menggunakannya (Firdaus & Hidayati, 2019). Pertambahan usia mempengaruhi cara berfikir karena dipengaruhi oleh lingkungan, pengetahuan yang diterima, menurut Singgih (1998) semakin tua usia seseorang maka proses perkembangan mental mengenai pengetahuan tentang Napza bertambah baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun. Daya ingat seseorang salah satunya dipengaruhi oleh umur. Dari uraian ini maka dapat kita simpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada pertambahan pengetahuan yang diperolehnya, akan tetapi pada umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pengetahuan akan berkurang.

Responden yang pernah mendapatkan informasi tentang institusi penerima wajib lapor, 62 persen belum pernah mendapatkan informasi tentang IPWL dan 38 persen sudah pernah mengetahui informasi tentang IPWL. Artinya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi dari IPWL sebagai lembaga yang menangani orang yang kecanduan Napza. Pengetahuan masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam memberi rangsangan untuk berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan termasuk terhadap keberadaan lembaga pencegahan Napza. Masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi menganggap penting nilai kesehatan. Kemudian jenis pekerjaan dan penghasilan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi karena masyarakat dengan tingkat pekerjaan tertentu tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu kegiatan

yang berkaitan dengan Napza. Selanjutnya faktor Lamanya Tinggal cukup berpengaruh bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan, karena semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya pada setiap kegiatan lingkungan (ARS, 2013). Pengetahuan responden tentang Napza, dapat diketahui sebagai berikut:

Pengetahuan responden tentang dampak penggunaan Napza 54 persen responden tidak mengetahui tentang dampak penggunaan Napza yang mengakibatkan terganggu fungsi otak dan perkembangan moral pemakainya, intoksikasi (keracunan), *overdosis* (OD) yang menyebabkan kematian karena terhentinya pernapasan dan perkembangan otak, gangguan perilaku (mental sosial), dan gangguan kesehatan. Dampak Napza merupakan bahaya terbesar yang merusak bukan hanya generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang ideal/baik dimasa datang kalau kita tidak mempersiapkannya sejak sekarang. 33 persen responden mengetahui dampak penggunaan Napza, karena mampu menjelaskan dampak penggunaan Napza, mereka mengetahui karena sebelumnya pernah mendapatkan pengetahuan tentang Napza melalui sosialisasi. 13 persen responden mengetahui Napza namun tidak mengetahui dampak dari penyalahgunaan Napza, karena belum pernah mendapatkan sosialisasi maupun informasi tentang bahaya Napza.

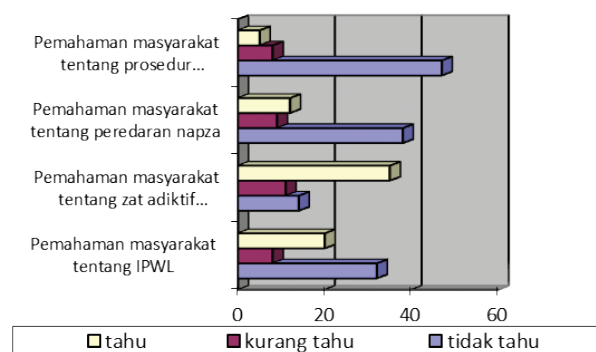
Pengetahuan responden tentang (IPWL) berdasarkan Sumber Informasi 53 persen masyarakat belum pernah mendapatkan informasi tentang institusi penerima wajib lapor, 23 persen responden mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar, 12 persen mendapatkan informasi melalui media elektronik, 8 persen



Grafik 1. Pengetahuan responden tentang (IPWL) berdasarkan Sumber Informasi

responden mendapatkan informasi dari media cetak, dan 2 persen mendapatkan informasi dari penyuluhan/ sosialisasi.

Hasil penelitian tentang Pengetahuan masyarakat tentang institusi penerima wajib lapor yang menangani korban napzsa dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik 2. Pengetahuan Masyarakat Tentang Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

Pengetahuan masyarakat tentang IPWL, dilihat dari peranan IPWL sebagai lembaga atau yayasan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh

Pemerintah. Pengetahuan masyarakat tentang IPWL yang tidak mengetahui 53 persen, artinya tidak mengetahui IPWL, keberadaan IPWL, termasuk fungsi dan tugasnya. 13,3 persen mengetahui tentang IPWL akan tetapi tidak mengetahui tugas dan fungsi lembaga tersebut. Sedangkan 33,33 persen mengetahui tugas dan fungsi namun tidak mengetahui keberadaan IPWL.

Pengetahuan masyarakat tentang zat adiktif terlarang, responden yang mengetahui tentang zat adiktif terlarang 58,33 persen, karena dapat menyebutkan beberapa zat adiktif terlarang seperti ganja, pil koplo, narkoba, dan zat adiktif berbahaya lainnya. 18,33 persen masyarakat mengetahui zat adiktif terlarang. Sedangkan 23,3 persen tidak mengetahui tentang zat adiktif terlarang, karena tidak dapat menyebutkan zat adiktif terlarang.

Pengetahuan masyarakat tentang peredaran Napza 63,3 persen tidak mengetahui karena tidak mampu menjelaskan peredaran Napza di sekitar lingkungan, tidak mengetahui permasalahan narkoba dan tidak mengenal lingkungan tempat tinggal yang berkaitan dengan peredaran Napza. 20 persen responden mengetahui peredaran Napza di lingkungan sekitar karena salah satu keluarga/kerabat sebagai pecandu, mengetahui ada teman atau tetangga ternyata terjerat kasus narkoba. 15 persen mengetahui lingkungan oleh peredaran Napza karena mampu menjawab daerah di lingkungan yang tercemar Napza. Agama dalam keluarga adalah yang paling berpengaruh dalam penyalahgunaan Napza sehingga orang tua perlu membuat ikatan keluarga yang kuat melalui hubungan emosional dan rasa empati kepada anak (Asmoro & Melaniani, 2017).

Pengetahuan masyarakat tentang prosedur pelayanan IPWL 78,3 persen tidak mengetahui lembaga IPWL, tugasnya yang terkait dengan

rehabilitasi adalah meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. sehingga tidak mengetahui cara mengakses pelayanan IPWL. 16,7 persen kurang mengetahui tentang IPWL namun pernah mendengar lembaga penanggulangan penyalahgunaan Napza khususnya dalam bidang rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza. 5 persen masyarakat tidak memahami tentang prosedur pelayanan IPWL karena baru pertama kali mendengar lembaga tersebut.

KESIMPULAN

Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) merupakan fasilitas masyarakat mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial dan mengakses rehabilitasi bagi pecandu Napza, baik dari segi informasi, jaminan hukum hingga keterjangkauan biaya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian baru 53 persen masyarakat mengetahui lembaga IPWL sebagai tempat rehabilitasi bagi pecandu Napza. 78,3 persen responden tidak mengetahui prosedur pelayanan yang diberikan IPWL. Pengetahuan masyarakat tentang peredaran Napza 63,3 persen responden tidak mengetahui karena tidak mampu menjelaskan peredaran Napza di sekitar lingkungan. Masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang tugas IPWL terkait dengan rehabilitasi Napza. Hal tersebut menyebabkan pengguna Napza yang tidak mengetahui IPWL sebagai tempat rujukan bagi para korban penyalahgunaan narkoba, langsung dijebloskan penjara. IPWL menerima korban Napza yang melaporkan atas inisiatif sendiri, hasil razia, atau pun hasil dari keputusan hukum. tujuan merangkul pengguna atau pecandu narkoba, sebagai proses rehabilitasi. Dengan melapor ke IPWL, maka pecandu narkoba bisa terhindar dari jeratan hukum. Misalnya,

dalam razia salah seorang pecandu kedapatan sedang menggunakan narkoba, maka ketika belum pernah melapor ke IPWL, pecandu akan terancam hukuman penjara maksimal 6 bulan.

SARAN

Hasil penelitian di PSPP Surabaya, IPWL Orbit dan IPWL Inabah XIX Surabaya tentang pengetahuan masyarakat tentang institusi penerima wajib lapor (IPWL) sebagai lembaga rehabilitasi Napza, belum seluruh masyarakat mengetahui IPWL sebagai tempat rehabilitasi dan tempat melapor pengguna Napza agar terhindar dari ancaman hukuman penjara. IPWL dituntut untuk terus menerus meningkatkan kualitas kemanfaatan pelayanan terhadap penggunaan Napza. IPWL harus menjadi bagian dari solusi strategis pemecahan masalah yang dialami para korban penyalahgunaan Napza. Upaya pemerintah dalam mempertahankan IPWL melalui sosialisasi kepada masyarakat dan menerangkan peran masyarakat atau keluarga untuk melaporkan diri bagi pengguna Napza. IPWL sebagai lembaga dikatakan efektif apabila SDM memadai, sarana dan prasarana terpenuhi, program yang konstruktif, solutif, dan tuntas dalam merehabilitasi pengguna Napza. Peran serta masyarakat, pendidikan sekolah sebagai alat kontrol dalam upaya mencegah Napza masuk dalam lingkungan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya yang telah membantu, mendampingi hingga pelaksanaan FGD dalam penelitian tentang Pengetahuan Masyarakat tentang Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang menangani korban Napza. Kami mengucapkan terimakasih kepada IPWL Surabaya, dan Yayasan Orbit, IPWL Yayasan Inabah XIX Surabaya, telah menerima kami untuk melakukan penelitian dan ngumpulan

data kepada residen, keluarga dan masyarakat yang membantu segala keperluan kami selama, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan penelitian tentang pengetahuan masyarakat mengenai IPWL yang menangani korban Napza di Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam S. (2012) Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport* 5(20): 1-8
- Agusdwitanti, H., & Retnaningsih, S. M. T. (2015). Kelekatan dan intimasi pada dewasa awal. *Jurnal Psikologi*, 8(1), 18–24.
- Anja, C., dkk.. (2010). Tobacco, Cannabis and Other Illicit Drug Use among Finish Adolescents Twins: Causal Relationship or Causal Liabilities. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, Vol. 71: 5-14.
- Anggreni, D. (2015). *Dampak bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 3(3), 37–51.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ARS, R. I. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir*. Universitas Terbuka Jakarta, 122.
- Asmoro, D. O. S., & Melaniani, S. (2017). Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Napza pada Remaja. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*. <https://doi.org/10.30605/biometrika.v3i1.12345>

- BNN, (2014) Penandatanganan Peraturan Bersama Paradigma Penanganan Pengguna Narkoba; Lebih Humanis, <https://bnn.go.id/penandatanganan-peraturan-bersama-aeoeparadigma-penanganan-pengguna-narkoba-lebih-humanisae%C2%9D/>
- Dewi Angreni. (2015). Dampak bagi pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif (Napza) di kelurahan gunung kelua samarinda ulu. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 3(3), 37–51.
- Ekasari, A., & Andriyani, Z. (2013). Pengaruh Peer Group Support Dan Selfesteem Terhadap Resilience Pada Siswa SMAN Tambun Utara Bekasi. *Jurnal FISIP: SOUL*, 6(1). Retrieved from <http://www.ejournalunisma.net/ojs/index.php/soul/article/view/734>.
- Felicia, E. (2015). Kendala Dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Retrived from <http://ejournal.uajy.ac.id/9034/1/JURNALHK10324.pdf>.
- Firdaus, A. M. yunanta, & Hidayati, E. (2019). Pengetahuan Dan Sikap Remaja Terhadap Penggunaan Napza Di Sekolah Menengah Atas Di Kota Semarang. *Jurnal Keperawatan Jiwa*. <https://doi.org/10.26714/jkj.6.1.2018.1-7>.
- Oktavia, D., Asmoro, S., & Melaniani, S. (2016). Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Napza pada Remaja. *Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Napza Pada Remaja*.
- Rahmawati. (2016). Mekanisme Koping Pecandu Napza Yang Menjalani Rehabilitasi Di Wisma Sirih Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

**KEBERFUNGSIAN SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA PASCA
REHABILITASI SOSIAL DI BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA GALIH PAKUAN DI BOGOR**

***SOCIAL FUNCTIONING OF VICTIMS OF DRUG USE POST SOCIAL REHABILITATION
IN THE SOCIAL REHABILITATION CENTER OF VICTIMS OF DRUG ABUSE GALIH
PAKUAN IN BOGOR***

Ruaida Murni

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jln. Dewi Sartika No 200 Cawang III, Jakarta Timur
E-mail: ruaidamurni@yahoo.com

Diterima: 5 Juli 2019; Direvisi: 1 Oktober 2019; Disetujui: 2 Desember 2019

Abstrak

Masalah penyalahgunaan Napza merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian khusus pemerintah, karena peredarannya sudah menyebar di semua kalangan masyarakat. Penyalahgunaan Napza memicu terhambatnya keberfungsian sosial bagi pelakunya. Korban penyalahgunaan Napza baik pada tahap pengguna coba-coba ataupun sudah menjadi pecandu, perlu tindakan agar terlepas dari jerat Napza, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Rehabilitasi sosial merupakan salah satu solusinya. Penelitian ini bertujuan mengetahui keberfungsian sosial korban penyalahgunaan Napza yang diperoleh setelah melakukan rehabilitasi sosial. Metode yang digunakan kualitatif didukung data kuantitatif. Responden terdiri dari korban penyalahgunaan Napza dan informan petugas panti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (77,7 persen) responden memiliki keberfungsian sosial dengan kategori tinggi dan sebagian kecil kategori sedang, artinya masih ada item-item dari variabel yang mendukung keberfungsian sosial yang belum mampu dilaksanakan secara maksimal. Untuk lebih memaksimalkan keberfungsian sosial korban penyalahgunaan Napza setelah direhabilitasi, pihak panti perlu mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, secara bersamaan dapat memberikan motivasi dan dukungan moril terhadap eks penerima manfaat sehingga dapat memaksimalkan keberfungsian sosialnya, serta memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat, agar keluarga dan masyarakat memahami pentingnya keberfungsian sosial bagi korban penyalahgunaan Napza setelah di rehabilitasi

Kata Kunci: *korban penyalahgunaan Napza, keberfungsian sosial, rehabilitasi sosial, balai rehabilitasi sosial*

Abstract

The problem of drug abuse is one of various issues that concerned the government, because its circulation has spread in all elements of life. Drug abuse triggers the obstruction of social functioning of the perpetrators. Drug abuse either at the user stage or already an addict, action needs to be released from the trap of drugs, so that they are able to carry out their social functions well. Social rehabilitation is one solution. The purpose of this research is identifying the social functioning of drug users who are obtained after conducting social rehabilitation. The method used is qualitative supported by quantitative data. The respondents consisted of victims of drug abuse and informants from the BRSPN Galih Pakuan. The results shows that the majority (77.7 percent) of respondents had social functioning with a high category and a small proportion of the medium category. It means that there are still items of variables that support social functioning that have not been able to be implemented optimally. To further maximize the social functioning of victims of drug abuse after being rehabilitated, the institution needs to optimize the implementation of monitoring and evaluation, simultaneously can provide motivation and moral support to former beneficiaries so as to maximize their social functioning, and

giving counseling to families and communities, so that families and communities understand the importance of social functioning for victims of drug abuse after rehabilitation.

Keywords: *victims of drug abuse, social functioning, social rehabilitation, social rehabilitation center*

PENDAHULUAN

Masalah Napza merupakan masalah nasional bahkan internasional yang berkembang sedemikian rupa seolah-olah tanpa terkendali. Hal ini menyebabkan banyak korban penyalahgunaan Napza yang menyebar diseluruh wilayah Indonesia, mulai dari wilayah perkotaan hingga pelosok pedesaan. Negara menyatakan keadaan darurat Napza dan menjadikan permasalahan penyalahgunaan Napza saat ini sebagai permasalahan prioritas nasional, yang perlu mendapat perhatian untuk ditanggulangi. Korbannya bukan hanya orang dewasa akan tetapi remaja bahkan anak-anak yang masih usia dini atau usia sekolah menjadi korban penyalahgunaan Napza, orang yang berpendidikan rendah sampai pada yang berpendidikan tinggi, mengkonsumsi secara individu maupun secara kelompok, tersembunyi maupun terang-terangan.

Berdasarkan hasil survei nasional Penyalahgunaan Narkoba di 13 Provinsi oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN (2017), prevalensi Penyalahguna Narkoba berdasarkan kelompok usia 10-59 tahun berjumlah 3.376.115 orang; 59 persen adalah pekerja, kemudian 24 persen pelajar dan 17 persen populasi umum, yang terdiri dari 72 persen laki-laki dan 28 persen perempuan. Data korban Napza juga sering di tayangkan di televisi sebagai iklan layanan masyarakat dengan harapan masyarakat terutama para orang tua waspada dengan penyalahgunaan Napza.

Penanggulangan permasalahan ini membutuhkan kerjasama secara menyeluruh antara masyarakat dan pemerintah. Karena dampak perilaku negatif korban

penyalahgunaan Napza bukan hanya pada diri korban penyalahgunaan Napza saja, akan tetapi berdampak sangat luas, pada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Kasus Penyalahgunaan Napza bersifat multidimensional dan saling terkait, yaitu: aspek medis, sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum. (Martono dan Joewana, 2005; Suradi, 2012; Lisa dan Sutrisna, 2013).

Orang yang sudah mengkonsumsi Napza baik masih tahap pengguna biasa/coba-coba maupun sudah menjadi pecandu atau ketergantungan dengan Napza, perlu tindakan yang berkelanjutan. Rehabilitasi sosial merupakan salah satu solusi untuk melepaskannya dari jerat Napza dan terbebas dari kecanduannya. Selanjutnya rehabilitasi yang dibarengi dengan pelayanan dan bimbingan sosial yang diberikan, harapannya mereka dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya di masyarakat agar mampu berperan sebagai layaknya masyarakat pada umumnya.

Rehabilitasi sosial dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial RI melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Napza melalui Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) salah satunya adalah BRSKPN Galih Pakuan, yang letaknya di wilayah Bogor. Berbagai tahapan kegiatan yang dilakukan oleh BRSKPN Galih Pakuan (selanjutnya disebut BRSKPNGP) mulai dari penerimaan sampai pada tahap pengembalian kepada masyarakat/keluarga. Berbagai kegiatan dan bimbingan diberikan di BRSKPN Galih Pakuan yang menunjang meningkatnya keberfungsian sosial korban penyalahgunaan Napza sebagai penerima pelayanan. Apakah

setelah mengikuti rehabilitasi di BRSKPN Galih Pakuan dan kembali ke keluarga atau masyarakat, penerima pelayanan dapat memerankan keberfungsian sosialnya. Sesuai dengan pertanyaan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberfungsian sosial korban penyalahgunaan Napza setelah rehabilitasi. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola program rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza sebagai tambahan bahan penyusunan program rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Napza.

Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN)

BRSKPN merupakan Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Tugas dari BRSKPN adalah melaksanakan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan menyelenggarakan fungsi sebagai: a). penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan; b). pelaksanaan registrasi dan asesmen korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; c). pelaksanaan advokasi sosial; d). pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; e) pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut; f) pelaksanaan terminasi, pemantauan, dan evaluasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; g) pemetaan data dan informasi korban penyalahgunaan narkotika,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan h) pelaksanaan urusan tata usaha. (Permensos RI, No.16/2018).

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 adalah merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Sedangkan tujuan rehabilitasi sosial korban Penyalahgunaan Napza (a) agar korban penyalahgunaan Napza dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri dan (b) terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial korban Penyalahgunaan Napza. (Permensos RI Nomor 26 Tahun 2012, Permensos RI. Nomor 9 Tahun 2017).

Rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan Napza merupakan proses intervensi yang bersifat holistik-sistematik, yang berfokus pada peningkatan pemenuhan hak hidup layak dan kapabilitas fungsional yaitu mencakup *social capability (physical/ self, psycko social, mental spiritual and liveli hood)*, dan *social responsibility (family, group, organisation and community)*. Semua itu dalam rangka peningkatan fungsi sosial penerima manfaat agar dapat kembali ke masyarakat. Rehabilitasi sosial tidak saja mampu memulihkan penerima manfaat dari kecanduan tapi juga dapat membina kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial mereka. Penerapan rehabilitasi sosial yang sistematik-holistik

meliputi empat menu wajib, yaitu terapi fisik, terapi psiko sosial, terapi mental spiritual dan terapi livelihood/penghidupan (BRSPN, 2018).

Penyalahgunaan Napza

Napza merupakan singkatan dari gabungan beberapa nama zat yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang memiliki khasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat Adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja fisiologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan, dan berefek ingin menggunakannya secara terus menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa, atau zat yang bukan narkotika dan psikotropika, tetapi menimbulkan ketagihan (Kemensos, 2017; UU No 35 Tahun 2009). Dari pengertian tersebut bila disimpulkan Napza adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan syaraf pusat.

Napza pada dasarnya merupakan salah satu jenis zat yang digunakan di kalangan kedokteran sebagai pengobatan. Namun banyak orang yang mengkonsumsi Napza di luar dosis yang diperlukan dan di luar pengawasan dokter yang berwenang, sehingga zat tersebut

akan menjadi racun bagi penggunanya. Pengguna Napza menjadi ketagihan atau ketergantungan mengkonsumsi dan berakibat merusak dirinya sendiri bahkan juga orang lain atau lingkungannya. Sehingga Napza dapat dikatakan memiliki dua sisi yang berbeda, satu sisi Napza yang menguntungkan karena merupakan obat bagi pemakainya, satu sisi lain apabila disalahgunakan pemakainya maka akan menjadi racun dan sangat merugikan pemakainya, karena akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Napza tersebut.

Menyalahgunakan Napza merupakan perbuatan melanggar hukum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika (*drugs abuse*) adalah suatu pemakaian *non medical* atau ilegal barang haram yang dinamakan narkotika (narkotika dan obat-obat adiktif) yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia pemakainya (Willis, 2005). Oleh sebab itu ketika seseorang menyalahgunakan Napza maka ia harus mempertanggungjawabkannya melalui hukum yang berlaku.

Banyak orang yang menyalahgunakan Napza karena ketidaktahuan, coba-coba dan lain-lain, sehingga ia pantas disebut sebagai korban penyalahgunaan Napza. Seperti yang disebutkan dalam Permensos RI Nomor 9 tahun 2017, bahwa Korban Penyalahgunaan Napza adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Napza karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Napza. Berdasarkan penjelasan di atas maka akibat penyalahgunaan Napza seseorang akan mengalami gangguan fisik, psikis maupun sosialnya, sehingga ia tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya atau mengalami disfungsi sosial. Suradi

(2012) mengutip Siporin bahwa seseorang mengalami disfungsi sosial ketika seseorang itu menunjukkan kondisi: (1) tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (2) tidak mampu mengakses pelayanan sosial, sehingga tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi, dan (3) tidak mampu melaksanakan peranan sesuai dengan tugas-tugas kehidupannya.

Faktor Penyebab Penyalahgunaan Napza

Penyebab seseorang menyalahgunakan Napza tidak selalu sama, ada yang berkaitan dengan pribadi masing-masing atau faktor lain yang mempengaruhi. Penyebab penyalahgunaan Napza di kalangan remaja termasuk anak sekolah, salah satunya adalah adanya pengaruh lingkungan yang kurang baik yang mempengaruhi pergaulan dan aktivitas lainnya. Oleh karena itu peran orang tua dan guru sangat penting dalam mengawasi tingkah laku anak baik di lingkungan pergaulan, rumah dan di sekolah (Putra, 2015).

Umbola (2016) merangkum dari beberapa sumber beberapa faktor penyebab penyalahgunaan Napza bagi anak yaitu:

Pola asuh orang tua; Pola asuh orang tua memberikan kontribusi yang banyak dalam proses perkembangan anak. Jika pola asuh orang tua kurang tepat, maka akan berdampak pada kondisi psikologis serta perilaku anak, seperti kedua orang tua yang berbeda dalam menerapkan pola asuh kepada anaknya dimana bapak memberikan perlakuan yang berbeda dengan perlakuan dari ibu. Kemudian pola asuh *permissive-indulgent*, yaitu pola asuh yang terlalu memanjakan, terlalu terlibat dalam kehidupan anak tetapi sedikit kendali terhadap anak. Hal ini membuat anak melakukan apa saja yang mereka inginkan, dan akibatnya anak tidak pernah belajar untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Kedua gaya pengasuhan ini membuat anak memperlihatkan sebuah

pengendalian diri yang buruk dari anak.

Role Model; Proses pembelajaran anak atau modeling anak yang kurang mendapatkan role model dalam keluarga, menirukan perilaku yang kurang tepat di lingkungannya seperti menirukan perilaku temannya yang merokok atau yang mengkonsumsi Napza. Seperti yang diungkapkan oleh Hurlock (Umbola, 2016) ada masa dimana anak mulai melakukan hubungan yang lebih banyak dengan anak yang lain, dan minat pada keluarga mulai berkurang. Pada saat yang sama aktivitas yang bersifat individu mulai digantikan menjadi aktivitas berkelompok. Aktivitas berkelompok meliputi semua bentuk permainan dan hiburan dalam kelompok, membuat sesuatu, mengganggu orang lain, mencoba-coba, dan melibatkan diri dalam aktivitas terlarang seperti berjudi, merokok, minuman keras, dan mencoba obat bius.

Proses Belajar Sosial; pengalaman yang diperoleh anak dari lingkungannya merupakan suatu proses belajar sosial, dimana dalam proses belajar tersebut anak mendapatkan penguatan atau *reinforcement* baik dari orang tua atau orang lain dari lingkungannya. Proses belajar sosial yang salah dari lingkungan, akan mempengaruhi perilaku dan aktivitas anak, Beck dalam Nelson-Jones (2011) yang dikutip oleh Umbola (2016).

Hasil penelitian Murni dan Sumarno (2002), bahwa faktor penyebab orang pernah menggunakan Napza pada umumnya adalah faktor pribadi yang ingin mencoba dan mudah frustrasi. Alasan sosial menggunakan Napza, karena pengguna merasa lebih nyaman dan menikmati pertemanannya dengan orang lain (Fields dalam Kurniasari 2017). Faktor kepribadian juga merupakan salah satu faktor resiko tinggi penyalahgunaan Napza. Perlu dipahami bahwa munculnya kepribadian

seseorang berawal dari pola asuh orangtua.

Irwanto (Kurniasari, 2017) Aspek-aspek kepribadian tersebut meliputi:

1. Sifat mudah kecewa; mereka memiliki toleransi yang rendah terhadap suatu kegagalan, dan sering menimbulkan kecenderungan untuk agresif dalam mengatasi kekecewaannya Terdapat korelasi positif pada pengguna Napza dengan agresifitas (Kellan, 1980)
2. Sifat tidak sabar, Pengguna obat sering tidak dapat mengontrol keinginan-keinginan.
3. Sifat memberontak
4. Ada kecenderungan untuk selalu menolak cara atau prosedur yang telah diakui oleh masyarakat atau keluarga. Ini dilakukan semata-mata untuk mencapai apa yang dikehendaki. Mereka memiliki perasaan permusuhan yang besar sekali terhadap segala bentuk otoritas yang ada.
5. Suka mengambil risiko berlebihan; ada kecenderungan suka memperlihatkan tingkah laku berisiko tinggi. Tujuannya semata mata untuk mendapatkan perasaan bahwa dirinya dapat diterima dan diakui.
6. Mudah bosan dan jenuh; yang menimbulkan perasaan murung, sebagai manifestasi ketidak mampuan untuk melihat atau mencari kegiatan alternative lain yang dapat dilakukan.

Penyalahguna Napza tidak semata-mata secara spontan mengalami kecanduan dan akibatnya, akan tetapi melalui tahapan atau pola pemakaian Napza tersebut. Beberapa tahapan dan pola pemakaian Napza adalah:

1. Pola coba-coba, karena iseng atau ingin tahu. Pengaruh kelompok sebaya sangat besar yang menawarkan atau membujuk untuk memakai narkoba. Ketidak mampuan berkata tidak mendorong anak untuk mencoba nya apalagi ada rasa ingin mencoba.

2. Pola pemakaian sosial, pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk dikakui atau diterima di kelompoknya.
3. Pola pemakaian situasional atau instrumental, karena situasi tertentu seperti kesepian dan stres.
4. Pola habituasi (kebiasaan), mencapai tahap pemakaian teratur atau sering, terjadi perubahan faal tubuh dan gaya hidup.
5. Pola ketergantungan (kompulsif) dengan gejala khas yaitu timbulnya toleransi dan atau gejala putus zat. (Martono dan Joewana, 2005).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab seseorang dapat menggunakan Napza berasal dari keluarga, diri sendiri dan lingkungan yang semestinya dapat hindari. Yang berawal dari pola asuh keluarga yang membentuk kepribadian anak sampai pada ketergantungan untuk selalu memakainya.

Beberapa dampak dari penyalahgunaan Napza

Penyalahgunaan Napza tidak hanya berdampak pada individu pengguna Napza, tetapi juga berdampak pada keluarga, masyarakat dan negara. Keluarga akan menghadapi berbagai masalah, baik secara ekonomi, mental dan sosial. Dampak terhadap masyarakat, yaitu masyarakat merasa tidak tenang karena di lingkungannya ada korban penyalahgunaan Napza. Dampak terhadap negara dan pemerintah relatif sama, dengan skala yang lebih luas. (Sumarno, 2016; Suradi, 2012) mengutip Romeal yang mengatakan bahwa dampak negatif dari penyalahgunaan Napza adalah: 1) Dampak terhadap mental: munculnya keinginan untuk kembali menggunakan Napza; 2) Dampak terhadap fisik, kondisi fisik yang dirasakan mulai dari pegal-pegal, ngilu, sakit pada sekujur tubuh dan persendian, kram otot dan insomnia, bahkan risiko yang lebih berat seperti: katup jantung bocor, paru-paru

bolong, gagal ginjal, liver rusak, infeksi virus hepatitis C dan HIV/AIDS; 3) Dampak terhadap emosional, bentuk perubahan mood yang ekstrem yang dapat mendorong perilaku agresif yang berlebihan, emosinya sangat labil dan dapat melakukan tindak kekerasan. Tidak peduli terhadap orang lain, ada perasaan tidak berguna dan depresi mendalam yang dapat melakukan bunuh diri; 4) Dampak terhadap spiritual, tidak mau melakukan yang produktif, tidak mau sekolah, dan meninggalkan kegiatan ritual/ibadah. Menjalani hidup dalam dunianya sendiri, dan mengisolasi diri keluarga, teman-temannya dan masyarakat; 5) Retardasi, penyalahgunaan Napza menyebabkan korban tidak memiliki pola pikir dan kestabilan emosi seperti layaknya orang-orang seusianya.

Demikian halnya yang dikatakan Nevid Rathus, dan Greene (Umbola, 2016) bahwa penyalahgunaan zat membuat perilaku seseorang mengalami kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab utamanya (seperti bolos sekolah atau bolos kerja karena mabuk), adanya situasi dimana zat yang dikonsumsi berbahaya bagi fisik (mencampur minuman beralkohol dengan obat), serta berhadapan dengan masalah hukum berulang kali yang meningkat karena penggunaan obat (masuk ke lembaga pemasyarakatan karena perilaku yang berkaitan dengan penggunaan zat), atau memiliki masalah sosial dan interpersonal yang kerap muncul karena penggunaan zat (berkelahi karena mabuk). Selain itu Gangguan yang bisa muncul akibat dari penggunaan zat adalah seperti intoksikasi, gejala putus zat, gangguan *mood*, delirium, demensia, amnesia, gangguan psikotik, gangguan kecemasan, disfungsi seksual, dan gangguan tidur. Dengan demikian akan mengalami disfungsi sosial.

Secara jelas dan ringkas dalam uraian Suradi (2012) mengutip Siporin bahwa seseorang mengalami disfungsi sosial ketika

seseorang itu menunjukkan kondisi: (1) tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (2) tidak mampu mengakses pelayanan sosial, sehingga tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi, dan (3) tidak mampu melaksanakan peranan sesuai dengan tugas-tugas kehidupannya. Berdasarkan penjelasan di atas maka akibat penyalahgunaan Napza seseorang akan mengalami gangguan fisik, psikis maupun sosialnya, sehingga ia tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya atau mengalami disfungsi sosial

Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial mengacu kepada cara yang dilakukan orang dalam rangka melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhan (Sukoco, 2004). Keberfungsian sosial merupakan salah satu faktor yang menunjukkan seseorang mampu menjalankan peran sosialnya di masyarakat. Keberfungsian sosial oleh Suharto, (2009) diartikan sebagai kemampuan orang (Individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga, dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan (*shocks and stresses*). Safitri (2016) mengutip dari Suharto (2002) yang mengatakan bahwa keberfungsian sosial adalah tujuan utama dari intervensi pekerjaan sosial. Fungsi sosial merupakan konsep yang penting bagi pekerjaan sosial.

Adapun inti dari konsep keberfungsian sosial adalah menunjuk pada kapabilitas individu, keluarga dan masyarakat dalam menjalankan peran sosial di lingkungannya. Konsep ini mengedepankan bahwa klien merupakan subyek dari segenap proses dan aktivitas kehidupan, sehingga sebagai subyek, ia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan.

Selain itu, subyek juga dapat menjangkau, memanfaatkan dan memobilisasi berbagai aset serta sumber yang ada di sekitar dirinya. Keberfungsian sosial dapat dilihat dari empat hal utama yaitu: 1) kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari; 2) kemampuan dalam mengatasi masalah yang dihadapinya; 3) kemampuan dalam menampilkan peranan sosial dalam lingkungannya; 4) kemampuan dalam pengembangan diri (Joyakin, 2008). Sesuai dengan hal tersebut, dalam tulisan ini juga membahas keberfungsian sosial pada empat hal utama tersebut.

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, Kebutuhan sehari-hari yang paling dasar adalah kebutuhan rasa aman dan perlindungan yang merupakan perlindungan fisik dan perlindungan psikologis, kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, kebutuhan pengakuan dari orang lain dan kebutuhan aktualisasi diri (Kasianti & Rosmalawati, 2016). Kemudian dalam memecahkan masalah membutuhkan strategi dalam menghadapinya, sehingga masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari interaksi dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik. (Dewi, 2012). Ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun skala besar (masyarakat luas), maka setiap orang dituntut untuk belajar mengisi peran tertentu. Peran sosial yang perlu dipelajari meliputi dua aspek, yaitu belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran, dan memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut (Sudarman, 2008). Peran sosial merupakan bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang yang

di sesuaikan dengan status sosialnya. Apabila seorang telah melaksanakan kewajiban serta telah meminta hak-haknya, yang sesuai dengan status sosial yang disandangnya itu berarti dia telah menjalankan suatu peran yang benar. Peran ini juga berasal dari pola pergaulan hidup (Ilham, 2019).

Kemampuan melaksanakan peran sosial, diantaranya di lihat dari kemampuan dalam mengambil keputusan, mampu memberi nafkah keluarga, mampu memimpin kelompok dan hal-hal yang terkait dengan peran sosial dalam keluarga dan masyarakat.

Pengembangan diri bukanlah sebuah proses yang berdiri sendiri; pengembangan diri manusia selalu terkait dengan tugas-tugas perkembangan yang lain. Pada dasarnya pengembangan diri merupakan bagian dari tanggungjawab manusia, dan setiap makhluk hidup, terhadap spesiesnya sendiri, yakni untuk menjaga eksistensi atau keberlangsungan hidup. Dalam proses itu, proses pengembangan diri harus menghasilkan buah, yakni manfaat yang didapatkan tidak saja oleh dirinya sendiri, namun untuk orang lain dan masyarakat pada umumnya. Karena itu di dalam setiap upaya pengembangan diri, dan pengembangan orang lain seperti siswa di sekolah, terselip tanggung jawab capaian dalam bentuk kebermanfaatan bagi masyarakat luas (Hidayat, 2011).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Responden dalam penelitian ini adalah korban penyalahgunaan Napza yang berjumlah 18 orang, dengan informan petugas panti, tokoh masyarakat, dan konselor sehingga berjumlah 6 (enam) orang. Data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara, dan studi dokumentasi yang dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Napza Galih Pakuan Bogor.

Data yang sudah di kumpulkan selanjutnya dianalisa secara kualitatif melalui tahapan editing, koding, kategori data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Analisa data ini menghasilkan informasi dalam bentuk deskripsi keberfungsian sosial korban penyalahgunaan Napza pasca rehabilitasi sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum BRSKPN Galih Pakuan

Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Galih Pakuan (BRSKPN Galih Pakuan) Bogor adalah salah satu balai milik Pemerintah Pusat, dibawah Kementerian Sosial RI yang melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan Napza, berdiri sejak tahun 1982. Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Nomor: KEP.007/RPS-4/1983, panti ini mulai beroperasi, dengan nama Panti Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika “Putat Nutug”. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Nomor: 06/KEP/BRS/IV/1994, tanggal 26 April 1994, dinamakan Panti Sosial Pamardi Putra “Galih Pakuan”. Kapasitas tampung 180 orang, dengan jangkauan pelayanan regional provinsi dan rujukan Nasional.

Untuk mengoptimalkan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza, Kementerian Sosial RI menambah unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang kemudian nomenklatur Panti Rehabilitasi menjadi Balai Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza. Melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Saat ini Panti Sosial Parmadi Putra Galih Pakuan berubah nama menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) Galih Pakuan.

Tugas pokok BRSKPN Galih Pakuan adalah memberikan Bimbingan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang bersifat Kuratif, Rehabilitatif, Promotif, dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar, pendidikan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi eks korban Narkotika dan pengguna Psikotropika Sindroma ketergantungan agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan. Tujuan rehabilitasi

Visi BRSKPN Galih Pakuan adalah sebagai balai pusat pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza berstandar Nasional, profesional, berkualitas. Sedangkan Misi BRSKPN Galih Pakuan adalah: menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyalahgunaan Napza dalam sistem balai dengan menggunakan pendekatan multi disipliner, teknik pelayanan yang unggul dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; Menyelenggarakan pengkajian model pelayanan dan rehabilitasi sosial penyalahgunaan Napza; Mempasilitasi tumbuh kembangnya motivasi dan usaha masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan Napza; Menyelenggarakan kegiatan pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza yang

berkualitas.

Jumlah pegawai sebanyak 48 orang yang terdiri dari 32 orang laki-laki dan 16 orang perempuan, pegawai honorer 21 orang (19 laki-laki dan 2 orang perempuan). Jumlah pekerja sosial 16 orang, rasio pekerja sosial dengan penerima manfaat yang diharapkan adalah 1:3, sedangkan rasio yang ada 1: 11, tenaga profesi lainnya 19 orang (13 orang laki-laki dan 6 orang perempuan). Jumlah penerima manfaat pada tahun 2017 adalah 323 orang, jumlah ini terjadi mutasi yang fluktuatif setiap bulannya, artinya setiap bulan ada penerima manfaat yang keluar dan juga ada penerimaan penerima manfaat.

Sebagian dari jumlah tersebut atau 196 orang klien re-entry telah disalurkan ke orang tua pada akhir bulan Desember 2017 dan sisanya sebanyak 127 orang yang terdiri dari 29 penerima manfaat re-entry, 59 klien primary dan 39 klien IPWL masih mengikuti pelayanan rehabilitasi sosial di balai. Usia penerima manfaat di golongan dalam 4 golongan yaitu, golongan anak-anak (10-18 tahun), remaja (19-25 tahun), dewasa (26-45 tahun), dan di atas dewasa (usia $\geq$ 46 tahun). Jumlah penerima manfaat berdasarkan usia pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah penerima manfaat berdasarkan usia

No.	Usia (tahun)	Jumlah	Persen
1	10 – 18	73	13,4
2	19 – 25	210	38,7
3	26 – 45	253	46,6
4	$\geq$ 46	7	1,3
Jumlah		543	100

Sumber: BRSPN Galih Pakuan, 2018

Tingkat pendidikan penerima pelayanan mulai dari tingkat dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi, ini dapat diartikan bahwa masyarakat yang mengkonsumsi Napza tidak tergantung pada tingkat pendidikan

tertentu.

Tabel 2. Jumlah penerima pelayan berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen
1	S1/S2/S3	33	6,1
2	D1/D2/D3	9	1,6
3	SMA/SMK/MA	290	53,4
4	SMP/MTs	130	23,9
5	SD/MI	68	12,5
6	Paket B	3	0,7
7	Paket C	3	0,6
8	TT SD	3	0,6
9	Tdk Sekolah	4	0,6
Jumlah		543	100

Sumber: BRSPN Galih Pakuan 2018

Pada tabel 2 terlihat bahwa penerima manfaat BRSPN Galih Pakuan yang terbanyak adalah SMA sederajat dan SMP, usia ini merupakan usia remaja yang sedang mencari jati diri dan ingin mencoba hal-hal yang baru. Pada tabel 2 juga terlihat ada penerima pelayanan yang berpendidikan sarjana, yang seharusnya sudah memahami akibat dari penggunaan Napza, akan tetapi penyalahgunaan Napza terkait juga dengan kepribadian seseorang. Sifat mudah kecewa, tidak sabar sehingga sering tidak dapat mengontrol keinginan-keinginan, sifat memberontak dan lainnya, sehingga walaupun memiliki tingkat pendidikan yang sudah mapan, tidak jarang menjadi korban penyalahgunaan Napza.

Jenis pelayanan yang diberikan adalah:

- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan dan papan
- Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan oleh perawat dan dokter berupa pemeriksaan kesehatan, test urine, obat-obatan, general check up, dan pengobatan lainnya.

- c. Pertemuan orang tua (Family Support Group) dan parenting skill.
- d. Bimbingan mental agama, fisik, sosial dan keterampilan.
- e. Kegiatan PROBE, widyawisata dan outing.
- f. Resosialisasi dan reintegrasi
- g. Toolkit
- h. Biaya transportasi pemulangan (di pulau jawa/darat)

Jenis Keterampilan Yang Diberikan:

- a. Keterampilan sablon
- b. Keterampilan montir (mobil dan motor)
- c. Keterampilan peternakan
- d. Keterampilan olahan pangan (roti)
- e. Keterampilan komputer (Design Grafis)

Pola Rehabilitasi di BRSKPN Galih Pakuan adalah dengan menggunakan *Therapeutic Community* (TC). Program rehabilitasi di Balai ini memiliki program *holistic sistematis* dalam membantu korban kembali pulih. Yaitu berfokus pada peningkatan pemenuhan hak hidup layak dan kapabilitas fungsional, yaitu mencakup *social capability (physical/self, psychosocial, mental spiritual and livelihood)* dan *social responsibility (family, group, organisation and community)*. Semua itu dalam rangka peningkatan fungsi sosial penerima manfaat agar dapat kembali ke masyarakat. Semua penerima manfaat dibekali juga dengan keterampilan hidup menjadi anggota masyarakat yang mengerti dan bisa menjalankan fungsi sosialnya, memiliki tanggung jawab sosial dan kapabilitas sosial dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Pada setiap tahapan pelayanan memiliki keterkaitan dengan tahap berikutnya, agar tercipta proses pelayanan

yang berkesinambungan, efektif dan efisien untuk mendapatkan output maupun outcome yang maksimal. Tahap pelayanan dalam proses pelayanan rehabilitasi sosial penerima manfaat korban penyalahgunaan Napza terdiri dari pendekatan awal, penjangkauan, penerimaan (intake) dan registrasi, asesmen kontrak, pengasramaan dan pelayanan program.

2. Profil Responden

Jumlah responden sebanyak 18 orang, usia berkisar dari 18 tahun sampai dengan 35 tahun, lebih jelas seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. Usia Responden

No	Usia Responden (tahun)	Jumlah	Persen
1	≤ 20	10	55,5
2	21 – 25	5	27,7
3	26 – 30	1	5,6
4	31 – 35	1	5,6
5	36 – 40	1	5,6
Jumlah		18	100

Sumber: Hasil penelitian 2018

Pada tabel 3 terlihat bahwa usia remaja lebih banyak dari pada usia dewasa, hal ini mengindikasikan bahwa usia remaja yang masih labil untuk mencari jati diri dengan mencoba hal-hal baru. Walaupun tanpa disadari bahwa apa yang mereka lakukan bukan sesuatu hal yang baik bahkan dapat menjerumuskan dirinya sendiri. Namun demikian dengan jati diri inilah nama mereka akan terangkat dan diakui keberadaannya oleh lingkungan sepeergaulan.

Sedangkan status perkawinan responden sebagian besar sudah menikah (56 persen), kemudian 33 persen belum menikah dan 11 persen duda. Ini menunjukkan bahwa status perkawinan tidak menghalangi orang untuk menyalahgunakan Napza. Kemudian

setelah keluar dari panti sebagian kecil (39 persen) pernah mengalami relaps, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu yang paling banyak adalah masalah pekerjaan (42,9 persen), kemudian karena berkumpul kembali dengan teman lama dan adanya masalah pribadi yang tidak disebutkan, masing-masing 14,3 persen. Beberapa masalah yang sekaligus dihadapi oleh eks Napza yaitu masalah pekerjaan, masalah pribadi dan masalah keluarga (28,6 persen).

Menurut informan diketahui bahwa masalah pekerjaan merupakan masalah utama yang menyebabkan eks penerima pelayanan relaps, dan kemudian bertemu dengan teman lama. Kondisi responden yang sedang rapuh sehingga mudah menerima ajakan teman lama untuk kembali mengkonsumsi Napza. Sedangkan masalah keluarga yang dihadapi eks penerima manfaat korban penyalahgunaan Napza adalah keluarga belum sepenuhnya percaya kepada eks penerima pelayanan bahwa dia sudah sembuh, dan masih adanya stigma dari keluarga. Waktu relaps pasca rehabilitasi paling banyak (71 persen) dibawah 6 bulan setelah keluar dari panti, dan lebih dari 6 (enam) bulan setelah keluar dari panti (29 persen).

Upaya yang dilakukan eks penerima pelayanan ketika relaps paling banyak adalah kembali ke balai (42,9 persen), karena di balai mereka merasa lebih dihargai oleh para konselor dan pengurus panti lainnya dan teman-teman. Kemudian menghubungi konselor (28,6 persen), konselor merupakan tempat eks penerima manfaat untuk menemukan solusi masalah yang dihadapi sehingga ketika ada masalah konselorlah terutama yang mereka hubungi, mereka merasa konselor mampu memberi solusi keluar dari masalah yang sedang dihadapi,

karena selama di panti petugas yang sering berkomunikasi dengan penerima pelayanan salah satunya adalah konselor. Selanjutnya menghubungi teman (14,3 persen) serta menghubungi teman dan keluarga secara bersamaan (14,3 persen). Teman dimaksud adalah teman yang dianggap mampu membantu menyelesaikan masalahnya.

Tempat tinggal eks penerima pelayanan saat ini sebagian besar tinggal bersama keluarga (61 persen) dan selebihnya tinggal bersama teman, dan kost. Mereka bekerja jauh dari tempat tinggal orang tua, sehingga memilih tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerjanya. Sedangkan tempat tinggal setelah keluar dari lembaga sebagian (50 persen) pindah tempat tinggal, hal ini untuk menghindari bertemu dengan teman lama sesama pecandu dan menghindari stigma dari lingkungan masyarakat. Eks penerima pelayanan sengaja dipindahkan oleh keluarga/orangtuanya ke tempat saudaranya, atau sengaja pindah tempat tinggal bersama dengan orangtuanya. Kemudian 39 persen kembali ke tempat tinggal semula selebihnya 11 persen tetap tinggal di balai, yang kemudian menjadi konselor di balai.

Kemudian sebagian besar responden (55,6 persen) ketika mengikuti rehabilitasi tidak mengikuti keterampilan, kemudian mengikuti keterampilan montir mobil/motor (11,1 persen), kemudian selebihnya (5,6 persen) mengikuti beberapa jenis keterampilan yaitu fotografi, design grafis, steam motor. Pekerjaan yang ditekuni eks penerima pelayanan saat ini adalah sebagian bekerja dipanti sebagai konselor (38,9 persen), kemudian sebagai karyawan (27,8 persen), berdagang (16,7 persen) bengkel (11,1 persen) dan supir (5,6 persen). Bekerja di balai sebagai konselor bagi sebagian eks

penerima pelayanan merupakan alternatif terakhir. Karena di luar balai sudah di coba dengan berbagai cara untuk mencari pekerjaan, akan tetapi masih belum ada kepercayaan dari pemegang usaha, karena eks penyalahgunaan Napza.

Penghasilan responden yang didapat dari pekerjaan yang ditekuni, dapat dilihat pada diagram berikut.

Tabel 4. Penghasilan responden

No	Penghasilan Responden	Jumlah	Persen
1	< 1.000.000	3	16,7
2	1.000.000 – 2.000.000	8	44,4
3	2.000.001 – 3.000.000	5	27,8
4	> 3.000.000	2	11,1
Jumlah		18	

Sumber: Hasil penelitian 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa penghasilan responden berkisar dari <Rp1.000.000 - > Rp. 5.000.000. Paling banyak berpenghasilan Rp. 1000.000 - Rp. 2.000.000 (44 persen), kemudian Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 (27,8 persen), <Rp.1.000.000 (16,7 persen) dan >Rp.5.000.000 (11,1 persen).

3. Keberfungsian Sosial Korban Penyalahgunaan Napza

Keberfungsian sosial dijabarkan dalam bentuk kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemampuan mengatasi masalah, kemampuan melaksanakan peran sosialnya, dan kemampuan mengembangkan diri, seperti dijelaskan sebagai berikut.

a. Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Sehari-Hari

Kemampuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dilihat dari kemampuan pemenuhan kebutuhan fisik, psikis,

spiritual, dan sosial. Pemenuhan kebutuhan fisik berupa sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan psikis seperti rasa aman, pengisian waktu luang, dan pemenuhan kebutuhan spiritual seperti melaksanakan ibadah. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan sosial berupa penyesuaian diri dengan lingkungan masyarakat. Hasil penelitian seperti pada tabel berikut.

Tabel 5. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari

No	Kategori	Jumlah	Persen
1	Tinggi 52-70	15	83,3
2	Sedang 33-51	3	16,7
3	Rendah 14-32	0	0
Jumlah		18	100

Sumber: Hasil penelitian 2018

Pada tabel 5 dapat dilihat sebagian besar (83,3 persen) korban penyalahgunaan Napza setelah direhabilitasi di BRSKPN Galih Pakuan, sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sudah mandiri, walaupun ada jawaban pada kategori sedang, namun dalam jumlah kecil. Demikian halnya menurut informan, sebagai contoh bahwa kegiatan spiritual eks korban penyalahgunaan Napza dilaksanakan secara bersama-sama dengan masyarakat di masjid atau di rumah ibadah lainnya, mampu memanfaatkan waktu luangnya dengan melakukan kegiatan di masyarakat dan sebagian besar sudah memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kategori sedang dipahami sebagai kemampuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari belum maksimal, masih ada item-item yang mendukung pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang belum dilakukan secara maksimal. Balai ternyata sangat membantu penyalahguna Napza dalam pemulihannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Kemampuan Mengatasi Masalah

Kemampuan mengatasi masalah dimaksud adalah masalah yang datang dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya, seperti keluarga, masyarakat, teman sebaya maupun teman kerja/sekolah, dan mampu mengatasi masalah tanpa menggunakan Napza. Pada tabel berikut dapat dilihat kategori kemampuan eks penyalahgunaan Napza dalam mengatasi masalah.

Tabel 6. Kemampuan Mengatasi Masalah

No	Kategori	Jumlah	Persen
1	Tinggi 45-60	11	61,1
2	Sedang 29-44	7	38,9
3	Rendah 12-28	0	0
Jumlah		18	100

Sumber: Hasil penelitian 2018

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar (61,1 persen) penyalahgunaan Napza eks penerima pelayanan di BRSKPN sudah mampu mengatasi masalah yang dihadapi, baik masalah yang datang dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Sedangkan sebagian lagi menunjukkan kategori sedang diartikan bahwa belum semua permasalahan yang dihadapi eks penyalahguna Napza mampu diselesaikan dengan baik atau maksimal, sehingga masih perlu pendampingan atau dukungan baik dari keluarga maupun dari teman sebaya. Hal ini dapat dimaklumi karena permasalahan yang dihadapi bukan hanya masalah yang datang dari dirinya sendiri, akan tetapi masalah yang datang dari lingkungannya yang merupakan hasil dari interaksi, yang kadang kala ada hambatan untuk menyelesaikannya. Seperti yang dikatakan oleh informan bahwa permasalahan yang dihadapi penyalahgunaan Napza setelah kembali ke masyarakat, lebih banyak masalah yang muncul dari lingkungannya,

baik dari masyarakat, teman sebaya bahkan dari keluarganya sendiri.

c. Kemampuan Melaksanakan Peran Sosial

Selanjutnya kemampuan melaksanakan peran sosial, ini dilihat dari kemampuannya berperan dalam keluarga seperti mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan mampu mengambil keputusan, serta dalam masyarakat mampu menempatkan diri sebagai anggota masyarakat, mengikuti kegiatan di masyarakat, dipercaya dalam kelompok masyarakat dan tidak mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (72,2 persen) korban penyalahgunaan Napza eks penerima pelayanan balai mampu melaksanakan peran sosialnya, seperti pada tabel berikut.

Tabel 7. Kemampuan Melaksanakan Peran Sosial

No	Kategori	Jumlah	Persen
1	Tinggi	13	72,2
2	Sedang	5	27,8
3	Rendah	0	0
Jumlah		18	100

Sumber: Hasil penelitian 2018

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa sebagian besar (72,2 persen) responden ada dalam kategori tinggi, artinya sebagian besar responden korban penyalahgunaan Napza sudah mampu melaksanakan peran sosialnya baik dalam keluarga maupun di masyarakat, mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, mampu mengambil keputusan dan mampu bersosialisasi serta mampu menempatkan diri sebagai anggota masyarakat tanpa diskriminasi dari masyarakat. Hal yang sama yang dikatakan oleh informan bahwa penyalahgunaan Napza eks penerima manfaat BRSKPN

Galih Pakuan mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, mengikuti kegiatan di masyarakat dan pada umumnya masyarakat menerima keberadaan eks penyalahgunaan Napza karena masyarakat memahami bahwa penyalahgunaan Napza yang sudah di rehabilitasi di BRSKPN butuh dukungan dari lingkungannya, keluarga maupun masyarakat agar mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat. Sedangkan sebagian kecil (27,8 persen) ada pada kategori sedang, artinya belum semua item yang mendukung kemampuan melaksanakan peran sosial, mampu dilaksanakan responden korban penyalahgunaan Napza secara maksimal. Dukungan dari berbagai pihak diperlukan terutama dari keluarga, masyarakat dan lingkungannya agar penyalahgunaan Napza eks penerima pelayanan BRSKPN Galih Pakuan dapat lebih meningkatkan kemampuannya melaksanakan peran sosialnya baik dalam keluarga maupun di masyarakat.

d. Kemampuan Mengembangkan Diri Sendiri

Kemampuan mengembangkan diri merupakan hal yang penting untuk menuju ke kemandirian penyalahgunaan Napza eks penerima pelayanan balai, karena dengan kemampuan untuk mengembangkan dirinya, sehingga akan terus mencari tambahan ilmu maupun keterampilan yang dimiliki, sehingga apapun jenis usaha yang ditekuni akan bisa berkembang, dengan demikian keberfungsian sosialnya akan dapat maksimal. Kemampuan mengembangkan diri dilihat dari keinginan responden untuk berubah menjadi lebih baik, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan cara selalu belajar dari pengalaman dan dari orang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (94,4 persen) responden, mampu mengembangkan diri sendiri, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 8: Kemampuan Mengembangkan Diri Sendiri

No	Kategori	Jumlah	Persen
1	Tinggi	17	94,4
2	Sedang	1	5,6
3	Rendang	0	0
Jumlah		18	100

Sumber: Hasil penelitian 2018

Pada tabel 8 terlihat sebagian besar (94,4 persen) korban penyalahgunaan Napza pasca rehabilitasi sosial berada pada kategori tinggi, artinya sebagian besar sudah mampu mengembangkan diri dengan baik, sedangkan sebagian kecil (5,6 persen) ada pada kategori sedang, artinya sebagian kecil responden belum semua item yang mendukung pengembangan diri sendiri mampu dilaksanakan responden dengan maksimal. Petugas balai mengatakan bahwa walaupun korban penyalahgunaan Napza sudah selesai direhabilitasi dan sudah kembali ke keluarga, tetapi hubungan kekeluargaan tidak terputus, ada yang hanya sekedar silaturahmi dan ada yang berkonsultasi baik mengenai pekerjaan, permasalahan atau berbagi pengalaman dengan rekannya yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa korban penyalahgunaan Napza setelah di rehabilitasi, bersungguh-sungguh untuk berubah menjadi lebih baik. Untuk selanjutnya agar dapat mengembangkan diri sendiri dengan maksimal, maka diperlukan dukungan atau suport dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman dan lingkungan masyarakat. Secara berurutan kategori variabel yang mendukung keberfungsian sosial sebagai berikut.

Tabel 9. Kategori Keberfungsian Sosial

No	Variabel	Kategori		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1	Kemampuan mengembangkan diri sendiri	94,4	5,6	0
2	Pemenuhan kebutuhan sehari-hari	83,3	16,7	0
3	Kemampuan melaksanakan Peran sosial	72,2	27,8	0
4	Kemampuan mengatasi masalah	61,1	38,9	0

Sumber: Hasil penelitian 2018

Mampu mengembangkan diri sendiri merupakan faktor pertama yang mendukung keberfungsian sosial Penyalahgunaan Napza dan dapat secara maksimal dilakukan oleh korban penyalahguna Napza, kemudian pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mampu melaksanakan peran sosialnya dan mampu mengatasi masalah. Kemampuan mengatasi masalah merupakan kemampuan responden yang terendah, hal ini dapat dipahami, karena permasalahan yang ada bukan saja permasalahan yang datangnya dari dirinya sendiri, akan tetapi terkait dengan orang lain atau lingkungannya, yang sulit untuk dia kendalikan sendiri, karena munculnya masalah juga merupakan hasil interaksi pribadi dengan orang lain. Secara keseluruhan korban penyalahgunaan Napza setelah keluar dari BRSPN membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik dari BRSPN galih pakuan, keluarga dan lingkungan masyarakat, terutama pada variabel kemampuan mengatasi masalah dan kemampuan melaksanakan peran sosial yang berada pada kategori dua tingkat terbawah diantara 4 (empat) variabel pendukung keberfungsian sosial korban penyalahgunaan Napza setelah di rehabilitasi.

Secara keseluruhan nilai kategori keberfungsian sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Keberfungsian sosial

No	Kategori	Jumlah	Persen
1	Tinggi	14	77,8
2	Sedang	4	22,2
3	Rendah	0	0
Jumlah		18	100

Sumber: Hasil penelitian 2018

Secara keseluruhan keberfungsian sosial korban penyalahgunaan Napza pada tabel 10 terlihat sebagian besar (77,8 persen) korban penyalahgunaan Napza setelah rehabilitasi ada pada kategori tinggi, artinya sebagian besar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mampu mengatasi masalah, baik masalah pribadi maupun permasalahan yang datang dari keluarga, teman maupun masyarakat. Kemudian sebagian juga sudah mampu melaksanakan peran sosialnya, yaitu mampu berperan dalam keluarga dan di masyarakat. Walaupun sebagian masih ada korban penyalahgunaan Napza setelah rehabilitasi belum mampu secara maksimal menjalankan keberfungsian sosialnya, namun dalam jumlah kecil, ini artinya sebagian kecil korban penyalahgunaan Napza belum secara maksimal mampu melakukan faktor yang mendukung keberfungsian sosialnya. Pada tabel tersebut dapat diketahui juga bahwa tidak ada korban penyalahgunaan Napza setelah rehabilitasi yang berkategori rendah atau yang belum mampu mengembangkan keberfungsian sosialnya. Artinya BRSPN Galih Pakuan memiliki peran penting dan fungsi yang strategis dalam meningkatkan keberfungsian sosial korban penyalahgunaan Napza melalui berbagai pelayanan dan bimbingan yang diberikan.

KESIMPULAN

Keberfungsian sosial sangat dibutuhkan bagi korban penyalahgunaan Napza setelah direhabilitasi. Berdasarkan bahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa sebagian besar (77,8 persen) korban penyalahgunaan Napza setelah di rehabilitasi di BRSPN Galih Pakuan, mampu meningkatkan keberfungsian sosialnya dengan kategori tinggi. Artinya mampu memerankan variabel-variabel yang mendukung keberfungsian sosialnya secara maksimal. Seperti kemampuan mengembangkan diri sendiri (94,4 persen), pemenuhan kebutuhan sehari-hari (83,3 persen), kemampuan melaksanakan peran sosial (72,2 persen) dan kemampuan mengatasi masalah (61,1 persen). Hal ini menunjukkan bahwa BRSPN Galih Pakuan memiliki posisi yang strategis dan fungsi yang penting dalam meningkatkan keberfungsian sosial korban penyalahgunaan Napza, melalui berbagai bimbingan dan kegiatan serta pendampingan. Walaupun sebagian kecil (22,3 persen) masih dalam kategori sedang yang artinya bahwa sebagian kecil responden belum secara maksimal mampu melaksanakan item-item dari variabel-variabel yang mendukung keberfungsian sosial. Hal ini ditunjukkan juga bahwa korban penyalahgunaan Napza pasca rehabilitasi masih ada yang relaps setelah keluar dari panti, karena berbagai masalah yang belum mampu diselesaikan sendiri, sehingga masih butuh dukungan dari semua pihak, baik dari keluarga, teman sebaya, teman kerja maupun masyarakat bahkan dukungan dari petugas panti.

SARAN

1. Mengingat keberfungsian sosial korban penyalahgunaan Napza setelah direhabilitasi di BRSKPN Galih Pakuan masih ada yang berkategori sedang walaupun dalam jumlah kecil, tapi perlu diperhatikan dengan

memberikan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari BRSKPN Galih Pakuan, keluarga dan masyarakat lingkungannya, agar korban penyalahgunaan Napza setelah direhabilitasi di BRSKPN Galih Pakuan, dapat dengan maksimal memerankan keberfungsian sosialnya. BRSKPN Galih Pakuan dapat mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, karena bersamaan dengan itu, petugas monitoring dan evaluasi dapat memberikan motivasi dan dukungan moril terhadap korban penyalahgunaan Napza pasca rehabilitasi yang bermasalah atau yang belum maksimal keberfungsian sosialnya. Selain itu menjalin komunikasi atau membuka jadwal komunikasi dengan eks penerima pelayanan BRSKPN Galih Pakuan, sehingga dapat terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan petugas panti.

2. BRSKPN Galih Pakuan perlu meningkatkan pembinaan/penyuluhan terhadap keluarga maupun masyarakat, terkait dengan keberfungsian sosial agar keluarga dan masyarakat lebih memahami tentang pentingnya keberfungsian sosial bagi penyalahgunaan Napza pasca rehabilitasi di BRSKPN. Dan juga keluarga serta masyarakat memahami apa yang harus dilakukan terhadap korban penyalahgunaan Napza.
3. Memperkuat kerjasama dengan Dinas Sosial daerah asal korban penyalahgunaan Napza untuk secara bersama-sama memberikan dukungan kepada penyalahgunaan Napza pasca rehabilitasi agar mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya di masyarakat. sedara bersama-sama juga memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan Napza.

UCAPAN TERIMAKASIH

Disampaikan terimakasih kepada Saudara Suradi yang memberikan bimbingan akhir penulisan artikel ini, teman teman peneliti

dan semua pihak yang telah memberikan masukan untuk kelancaran penulisan naskah ini, mulai dari penelitian, penulisan sampai pada penerbitannya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya terkait dengan Napza.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, MN (2012) *Masalah dan Latar Belakang Masalah*. [https://afidburhanuddin.files.wordpress.com/2012/05/masalah-dan-latar-belakang masalah _maulidiah oke.pdf](https://afidburhanuddin.files.wordpress.com/2012/05/masalah-dan-latar-belakang-masalah_maulidiah_oke.pdf). diakses 2 juli 2019.
- Hidayat. R (2011). *Pengembangan diri: untuk berada selangkah di depan atau di belakang orang lain?*. Disampaikan pada seminar nasional “Pemberdayaan Manusia Menuju Kompetisi Sehat,” Universitas Mercu Buana, Yogyakarta, 8 Oktober 2011.
- Ilham, M (2019). *Fungsi Peran Sosial- Pengertian dan Jenis-Jenis*. <https://materibelajar.co.id/fungsi-peran-sosial/>. diakses 2 juli 2019.
- Kasianti & Dwi Rosmalawati, NW (2016) . *Kebutuhan Dasar Manusia I. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan*. Dalam <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/08/Kebutuhan-dasar-manusia-komprehensif.pdf>. diakses 25 Agustus 2019.
- Kurniasari. A, (2017) *Pembinaan Lanjut Bagi Korban Penyalahgunaan Napza (Kasus di Panti Sosial Parmadi Putra Galih Pakuan, Bogor*. Sosio Konsepsia. Vol. 6. No. 02 .Januari-April 2017. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Lisa, FR Juliana & Sutrisna W Nengah, (2013), *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Murni, R & Sumarno, S (2003): *Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Napza (Suatu Metode Pelaksanaan di Beberapa Institusi swasta)*. Jakarta. Pusat Penelitian Dan Pengembangan usaha Kesejahteraan Sosial.
- Martono, H, L & Joewana, S, (2005), *Konseling Bagi Pecandu Narkoba “Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya”*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, Y.M. (2015) *Lingkungan Salah Satu Sebab Penyalahgunaan Narkoba*. <https://republika.co.id/berita/nm4r10/lingkungan-salah-satu-sebab-penyalahgunaan-narkoba>. Diakses 26 Agustus 2019.
- Priyasmoro, R, M. (2018), BNN: *Pemakai Narkoba di Indonesia Capai 3,5 Juta Orang pada 2017*, 26 Jun 2018, <https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017>, diakses 25 Februari 2019.
- Riadi, M (2017). *Pengertian, Bentuk dan Manfaat Dukungan Sosial*. <https://www.kajianpustaka.com/2017/12/pengertian-bentuk-dan-manfaat-dukungan-sosial.html>, diakses 26 februari 2019.
- Sukoco, D, H. (2004) *Masalah dan Keberfungsian Sosial: Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial. Konsepsi dan strategi*. Kementerian Sosian RI.Badan

- Pelatihan dan Pengembangan Sosial. *Pemecahannya*. Bandung. Bandung, Alfabeta.
- Suradi, (2012), *Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif), Penyalahgunaan dan Penangannya*, Jakarta: P3KS Press.
- Suharto, E (2009), *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Bandung. Refika Aditama.
- Safitri, D (2016). *Skripsi tentang:Keberfungsian Sosial Remaja Perempuan Korban Kekerasan Seksual Pasca Rehabilitasi di APPS WCC Sragen*. Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Sari, K. (2011). *Konsep Dukungan Sosial*. <http://artidukungansosial.blogspot.com/2011/02/teori-dukkungan-sosial.html>. diakses tanggal 21 Januari 2019.
- Sudarman, M (2008). *Tinjauan Pustakan, Konsep Peran*. <http://eprints.umpo.ac.id/4433/1/BAB%202.pdf>. diakses 12 Agustus 2019.
- Tampubolon, J. (2008). *Penilaian Keberfungsian Sosial Klien*. http://media.kemsos.go.id/images/317Keberfungsian_Sosial.pdf., diakses 25 Desember 2018.
- Umbola, MJ (2016), *Faktor-Faktor Utama Penyebab Penyalahgunaan Napza*. Buletin Kpin Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara. Vol.2.No.3 . Fakultas Psikologi Universitas Borobudur. <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/48-faktor-faktor-utama-penyebab-penyalahgunaan-Napza>. diakses 12 Agustus 2019.
- Willis, S, S. (2005). *Remaja dan Masalahnya; mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, Narkoba, Free Sex dan*

URGENSI SINERGI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI BANJAR

THE URGENCY OF SYNERGIZING POVERTY REDUCTION PROGRAMES IN BANJAR

Muhtar

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta Timur. Telp. 021 8017146, Fax. 021 8017126.
Email: much.ngano17@gmail.com

Diterima: 9 Juli 2019; Direvisi: 6 Nopember 2019; Disetujui: 29 Nopember 2019

Abstrak

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan urgensi sinergi program penanggulangan kemiskinan. Kompleksitas permasalahan penduduk miskin, menuntut dilakukannya sinergitas program dari para pihak, pusat dan daerah. Kajian dilaksanakan di Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan April 2018. Jenis dan pendekatan kajian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan Program Rastra. Untuk memperkaya informasi, dilakukan *focus group discussion* dengan unsur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Hasil kajian menunjukkan, sungguhpun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar rendah (2,96 persen), jauh di bawah angka kemiskinan nasional (9,82 persen), namun kenyataan menunjukkan bahwa warga Desa Pemurus belum dapat mengakses air bersih sebagai salah satu kebutuhan dasar. Guna memenuhi kebutuhan dasar tersebut —untuk keperluan minum dan masak nasi— khususnya, dilakukan dengan cara sederhana, di mana mereka mengendapkan air sungai yang ada di dekat rumahnya dalam sebuah wadah, dan baru memanfaatkannya ketika air tersebut telah terlihat jernih. Ketika musim hujan, warga Desa Pemurus menjadikan air hujan sebagai alternatif sumber air bersih. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan pangan, warga Desa Pemurus sudah dapat mengakses bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan, Program Rastra, Pogram Indonesia Sehat, dan Pogram Indonesia Pintar, meskipun masih banyak terjadi *exclusion* dan *inclusion error* dari sisi data. Untuk itu, sinergi program penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi bagi keluarga miskin, krusial dan mendesak dilakukan, dengan dilakukannya peningkatan koordinasi ditingkat pusat, sekurangnya antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terlebih dulu, yang kemudian diikuti di tingkat daerah.

Kata Kunci: sinergi; program; penanggulangan kemiskinan.

Abstract

The purpose of this study is describing the urgency of synergy on poverty reduction programmes. The complexities of the poor citizen problems, needed a synergy of programmes by stakeholders in the center level and the regions. The study, held in Pemurus Village, Aluh-Aluh, Banjar, South Kalimantan Province on April 2018. The type and approach of the study, descriptive-qualitative, through data collecting interviews with beneficiaries of family hope program, prosperous rice programmes, Indonesia of healt programmes, and Indonesia of education programmes. In order to collect data and information, has used focus group discussion with elements of the Regional Poverty Reduction Coordination Team. The results shows, that even though the number of poor people in Banjar Regency low (2.96 percent), far below the national poverty rate (9.82 percent), in fact, citizens access to clean water as a basic needs at Pemurus village is not available. To fulfilling their basic needs: for drinking and cooking, particularly, the villagers, in a simple way by purifying water from the river near their house in a container. And during the rainy season, they use rainwater as an alternative source of clean water. Meanwhile, basic needs: education, health, and food, villagers have been able to access social assistance through Hope Family Program and prosperous rice programs, although there are still many exclusion and inclusion errors in data. Hence, it suggested, the synergy of poverty alleviation programmes, especially clean water and proper sanitation, urgently, with the

first encreasing coordination at the central level between the Ministry of Social Affairs and the Ministry of Public Works and Public citizens, then followed at the regional level.

Keywords: *synergy; programs; poverty reduction.*

PENDAHULUAN

Bank Dunia, pada September 2018, mengeluarkan data terkait tingkat kemiskinan global, bahwa terjadi penurunan 10 persen di tahun 2015 dari tahun 2013. Kemiskinan global menurun hampir di banyak negara, kecuali pada negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara karena dilanda konflik. Bank Dunia memperingatkan bahwa laju pengurangan kemiskinan telah melambat (Republika, 2018).

Trend penurunan jumlah penduduk miskin dunia tersebut juga terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi di tingkat global, terjadinya pelambatan. Berdasarkan data BPS (2018), bahwa pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) sebesar 9,82 persen (25,95 juta orang), berkurang sebesar 633,2 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018.

Dalam konteks daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, juga terjadi penurunan jumlah penduduk miskin. Kabupaten Banjar (2016) yang berpenduduk 554.443 Jiwa (laki-laki: 281.714 jiwa, perempuan 272.729 jiwa), yang tersebar di 20 wilayah kecamatan (277 desa, 13 kelurahan), jumlah penduduk miskinnya sebesar 2,96 persen (BPS, 2017). Persentase penduduk miskin tersebut menurun

dibanding tahun 2016 yang sebesar 3,10 persen (Bappelitbang Banjar, 2017).

Air bersih dan sanitasi yang buruk merupakan salah satu potret kemiskinan penduduk. Begitu penting arti air bersih dan sanitasi yang layak bagi kehidupan manusia, sehingga muncul komitmen global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals/SDG's*, yang merupakan kelanjutan dari MDG's yang berakhir tahun 2015, dengan segala capaian dan yang belum dicapainya, bahwa sesungguhnya air bersih dan sanitasi yang berkualitas, menjadi satu dari 17 tujuan yang akan dicapainya. Indonesia, sebagai salah satu negara penanda tangan komitmen global, terikat untuk mewujudkannya.

Sejalan dengan komitmen global tersebut, sesungguhnya dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012, sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, telah dijelaskan bahwa kebutuhan dasar adalah kebutuhan manusia yang meliputi: air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, psikososial, penampungan dan tempat hunian. Dalam konteks kajian ini, kebutuhan dasar dimaksud adalah kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Indonesia, sebagai negara yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Rote, sangat beragam kondisi geografisnya dataran tinggi, dataran rendah, pantai, rawa, daerah aliran sungai (DAS), dan pesisir. Kondisi demikian sangat berpengaruh terhadap tata sumber air yang digunakan dan sanitasi warga masyarakat

Indonesia. Bagi keluarga kategori mampu, relatif tidak ada kendala untuk memperoleh air bersih dan sanitasi yang baik melalui pelbagai cara yang dilakukannya. Akan tetapi, bagi keluarga kurang mampu (miskin), cukup menjadi masalah. Karena kemiskinannya tersebut, mereka ‘terpaksa’ memanfaatkan air yang ada/tersedia (air rawa, air sungai) untuk memenuhi keperluan sehari-harinya, baik untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK), tidak terkecuali untuk kebutuhan air minum dan menan nasi.

Kondisi demikian sangat banyak dijumpai di Indonesia, khususnya daerah rawa, pesisir, dan DAS. Menurut Bank Dunia (2007, XXXII), “Indonesia perlu memecahkan permasalahan yang dihadapi penduduk miskin dalam mengakses air bersih dan sanitasi. Sekitar 50 juta penduduk miskin di perdesaan tidak terlayani air ledeng ...”. Terkait sanitasi, “80 persen dari penduduk miskin perdesaan dan 59 persen dari penduduk miskin perkotaan, tidak mempunyai akses terhadap akses sanitasi yang memadai”. Salah satunya adalah di Desa Pemurus sebagai salah satu desa yang berada di aliran sungai. Berdasarkan keterangan sebuah sumber, diperoleh informasi, sejak kemerdekaan hingga saat ini, mereka belum menikmati layanan air bersih (Kesling kawasan pantai pesisir, 2009).

Untuk itu, kajian ini bertujuan mendeskripsikan urgensi sinergi program penanggulangan kemiskinan, dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin di Desa Pemurus, khususnya air bersih dan sanitasi yang layak.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan keluarga miskin, Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Sosial R.I. telah menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH), yang kemudian diperkuat Program Indonesia Pintar (PIP),

Program Indonesia Sehat (PIS). Disamping itu, untuk memenuhi kebutuhan dasar pangannya, Pemerintah Pusat, juga melalui Kementerian Sosial, telah diselenggarakan program bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra), yang kemudian bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di mana sebelumnya dilakukan oleh Perum Bulog. Sementara itu, sumber air bersih dan sanitasi yang tidak layak, masih sangat banyak dijumpai di Indonesia, dan merupakan tugas dan fungsi institusi teknis lain. Untuk itu, sinergi program penanggulangan kemiskinan urgen dilakukan.

Najiyati dalam Rahmawati et al. (2014), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Sementara, menurut Covey (2004: 259), sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Menurut Vasconcellos, M. dan Vasconcellos, A. (2009), kemitraan dan sinergi mengandung rasa kerjasama, saling percaya dan sinergi antara individu dan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Atas dasar ini, kemitraan berkaitan dengan hubungan antara dua atau lebih pemangku kepentingan untuk menggabungkan sumber daya yang berbeda dalam melakukan pendekatan bersama untuk mencapai tujuan bersama (McQuaid, 2000; Lewis, 2000; Penrose, 2000).

Dalam bersinergi, penting dilakukan koordinasi satu sama lain, sehingga terwujud suatu kegiatan yang efisien. Koordinasi merupakan penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama (Moekijat, 2002: 2).

Berdasarkan batasan seperti dikemukakan, sinergi adalah suatu kondisi, di mana terjadi

penyatuan dan/atau tindakan bersama (kompak), sehingga terjadi kegiatan gabungan (kolaborasi/interaksi) antara satu unsur/ elemen dengan unsur/ elemen lainnya, untuk menghasilkan efek kegiatan yang lebih besar daripada kegiatan individual.

METODE

Kajian ini dilakukan pada pertengahan bulan April 2018 di Desa Pemurus. Jenis dan pendekatan kajian adalah deskriptif-kualitatif. Metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan & Taylor, 1975).

Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yakni penerima PKH, Rastra/ BPNT, PIP; dan PIS. Disamping itu, juga dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pihak penanggulangan kemiskinan daerah setempat. Sementara, data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder yang dinilai relevan, termasuk *browsing* internet. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip *interview* serta material lain yang telah terkumpul, dengan maksud agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan (Sudarwan, 2002: 209). Dengan kata lain, analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis, yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara meng-organisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat

kesimpulan, sehingga mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran umum Lokasi

Desa Pemurus adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara topografis, Desa Pemurus termasuk kategori daerah aliran sungai (DAS). Tipologinya, sawah pasang surut dan bibit tanam air Payau. Luas Desa Pemurus kurang lebih 6,45 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk 809 Kepala Keluarga (2.783 jiwa), laki-laki 1587 jiwa dan perempuan 1358 jiwa. Dari 809 kepala keluarga tersebut, dapat dikelompokkan ke dalam lima kelompok, yaitu: Keluarga Prasejahtera: 368 KK, Keluarga Sejahtera I: 376 KK, Keluarga Sejahtera II: 82 KK, Keluarga Sejahtera III: 77 KK, dan Keluarga Sejahtera III Plus: 5 KK. Mata pencarian penduduk umumnya petani/buruh tani. Selain itu juga terdapat peternak ayam dan bebek, dan nelayan. Jarak tempuh ke ibu kota kecamatan kurang lebih lima kilometer dengan lama tempuh kurang lebih satu jam menggunakan kendaraan bermotor, dan kurang lebih 0,5 jam menggunakan *Kelotok* (Perahu kayu kecil bermesin). Sedangkan jarak tempuh ke kabupaten/kota kurang lebih 50 kilometer dengan jarak tempuh dua jam menggunakan kendaraan bermotor (Monografi Desa Pemurus, 2017).

Untuk sampai ke Desa Pemurus, dari Kantor Kecamatan Aluh-Aluh, dapat dilalui melalui dua jalur: *Pertama*, melalui jalur darat (dalam kondisi jalan tidak baik, tanah berlubang) kurang lebih 1 – 1,5 jam perjalanan dari Kantor Kecamatan Aluh-Aluh. *Kedua*, melalui jalur air/sungai dengan naik *Kelotok* (kapal kecil terbuat dari kayu) menyusuri Sungai Aluh-Aluh

dan Sungai Simpang Kiapu kurang lebih 30-40 menit perjalanan. Ongkos sekali jalan melalui transportasi air tersebut, menurut warga setempat, berkisar antara Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,-. Pengalaman penulis, untuk sampai ke Desa Pemurus tersebut, dengan *carter* (pergi-pulang), sebesar Rp. 250.000,- (Duaratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan data dan informasi tersebut, tergambar, betapa kemiskinan masih mewarnai kehidupan bagian besar warga Desa Pemurus, yang hanya 5 KK kategori Sejahtera III Plus dari 809 KK (Bag. Gambaran Umum). Kondisi kemiskinan warga Desa Pemurus tersebut juga diperkuat keterangan Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Banjar: *“...Desa Pemurus merupakan salah satu desa termiskin di wilayah Kecamatan Aluh-Aluh, yang akses masyarakatnya dapat dikatakan masih sulit”* (20 April 2018). Sungguhpun, data statistik Kabupaten Banjar menunjukkan, persentase penduduk miskin sebesar 2,96 persen, turun dibanding tahun 2016 sebesar 3,10 persen (Bappelitbang Banjar, 2017), jauh di bawah angka kemiskinan nasional per September 2018 9,66 persen (BPS, 2018), namun sejatinya kemiskinan masih membayangi kehidupan warganya, khususnya warga Desa Pemurus, yang tercermin dari belum tersedianya air bersih dan sanitasi yang layak.

2. Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin

a. Kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan, di Desa Pemurus, sudah tersedia Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) dari sisi sarana prasarana. Dengan demikian, akses masyarakat khususnya keluarga miskin terhadap ke dua layanan

dasar tersebut, relatif tidak ada masalah (mudah). Namun, yang bersifat lanjutan, untuk mengakses kedua layanan dasar tersebut, warga Desa Pemurus baru dapat memperolehnya keluar desa, setidaknya di lingkungan wilayah Kantor Kecamatan Aluh-Aluh.

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan tersebut, wawancara dengan KPM, diperoleh informasi: *“Bantuan pemerintah yang saya terima, PKH, Beras, Kartu Sehat, dan Kartu Pintar”* (NHT, 18 April 2018). Sementara KPM lain menuturkan: *“saya terima PKH, Beras, dan Kartu Sehat”* (LTF, 18 April 2018). KPM lainnya lagi menuturkan: *“... saya dapat bantuan PKH, dan Beras. Tetapi Kartu Sehat dan, Kartu Pintar tidak dapat”* (STK, 87 April 2018).

Penuturan ketiga KPM yang tinggal di RT. 03 Desa Pemurus tersebut, dari hasil observasi kondisi rumah dan sanitasinya, anggota keluarga, dan pekerjaan pokok kepala keluarga, mereka menerima program bantuan sosial (PKH, Rastra, KIP, KIS). Ketiga KPM tersebut beragam sebagai penerima program bantuan sosial, ada yang menerima semua program, dan sebagian yang lain menerima sebagian program bantuan sosial saja. Akan tetapi, banyak juga ditemui, keluarga miskin (yang kondisinya sama tidak mampu bahkan lebih miskin lagi) dari penerima bantuan sosial tersebut, tetapi tidak menerima program bantuan sosial (PKH, Rastra, KIP, KIS). Hal itu terlihat dari penjelasan para pihak pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan daerah setempat, dari unsur Dinas Sosial melalui FGD diperoleh informasi: *“... masih banyak warga miskin di Kabupaten Banjar yang belum mendapatkan program bantuan dan tidak masuk BDT”* (20 April 2018).

Informasi tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Banjar, seperti daerah lain di

Indonesia, masih banyak terjadi *exclusion error* dan *inclusion error* dari sisi data. Terkait itu, dari peserta FGD diperoleh informasi:

...kondisi seperti dikemukakan mitra kerja saya tadi berpangkal dari persoalan data. Problem di daerah, berdsarkan data PPLS 2011, dilakukan verifikasi dan validasi, kemudian dikirim ke pusat, namun hampir pada waktu bersamaan, terbit kebijakan KIP dan KIS dari pusat, dimana data yang digunakan adalah data lama. Yang terjadi, ya tadi, seperti di kemukakan bapak tadi... kacau (WSS, 20 April 2018).

b. Kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi

Air bersih, sebagai salah satu kebutuhan dasar sehari-hari warga masyarakat Desa Pemurus masih menjadi persoalan klasik. Wawancara dengan KPM, diperoleh informasi bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, mereka memanfaatkan air sungai yang tersedia dekat rumahnya. Hal itu terlihat dari penuturan KPM berikut:

...keperluan air bersih disini, terutama untuk kebutuhan air minum dan masak nasi, kami menggunakan air yang tersedia (air sungai), yang sebelumnya kami endapkan dulu. Jika musim hujan, ya air hujan kami gunakan khususnya untuk kebutuhan minum dan masak. Kalau untuk keperluan ke belakang (buang air besar), ya ke sungai..." (HTH 18 April 2018).

Penuturan serupa disampaikan KPM lain, ibu NRH:

...ya begitu, warga di sini, untuk keperluan sehari-hari, khususnya untuk minum dan masak nasi, menggunakan air sungai, yang diendapkan dulu dalam tempayan, dan air hujan jika musim hujan. Untuk urusan buang air besar, ya pergi ke sungai ..." (19 April 2018).

Secara lebih komprehensif, kondisi kemiskinan warga Desa Pemurus sehingga urgen dilakukan sinergi program penanggulangan kemiskinan, dalam kerangka pemenuhan kebutuhan dasar mereka, khususnya air bersih, tercermin dari hasil wawancara dengan beberapa KPM, yang disarikan sebagai berikut:

1. NHT, seorang ibu rumah tangga berumur 40 tahun, dengan latar belakang pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), hanya sampai Kelas V. Ia bekerja sebagai buruh tani, demikian juga suaminya, bekerja sebagai buruh petani, dan bekerja apa saja yang dapat menghasilkan uang (*serabutan*).

Ibu NHT mempunyai dua orang anak, yang pertama ikut Paket C tingkat SD, dan yang kedua duduk di Kelas IV SD. Keluarga ini menempati sebuah rumah sederhana, kurang lebih berukuran 6 x 6 meter persegi, dengan konstruksi bangunan: dinding dari papan, atap dari anyaman ijuk (yang tersedia disekitar rumahnya), dan lantai dari papan. Rumah tersebut berdiri diatas topangan tiang-tiang kayu yang ditancapkan ke tanah (dengan ketinggian tertentu), karena letaknya di pinggir sungai yang terhubung dengan laut. Dalam waktu tertentu (air pasang), sangat memungkinkan air masuk rumah, jika tidak ditinggikan.

Kebutuhan dasar, yang menurutnya (masih) belum tersedia oleh keluarga Ibu NHT adalah air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih khususnya untuk kebutuhan air minum dan memasak nasi, memanfaatkan sumber air yang tersedia dilingkugannya, yaitu air sungai di dekat rumahnya, dengan cara sederhana yaitu mengendapkannya terlebih dulu dalam sebuah tempat. Program bantuan sosial, yang diterima keluarga Ibu NHT adalah PKH (tahun 2017 pengembangan), Rastra, KIS, dan KIP.

2. STK, ibu rumah tangga berumur 26

tahun, dengan latar belakang pendidikan *Madrasah Tsanawiyah* (setingkat SMP). Ia murni sebagai ibu rumah tangga. Suaminya, bekerja sebagai buruh *serabutan*.

Ibu STK mempunyai satu orang anak, yang baru duduk di Kelas I SD. Keluarga ini tinggal di sebuah rumah sederhana, kurang lebih berukuran 6 x 6 meter persegi. Seperti keluarga tidak mampu lainnya, konstruksi bangunan rumah: dinding dari papan, atap dari anyaman ijuk, dan lantai dari papan. Rumah tersebut juga berdiri diatas topangan tiang-tiang kayu yang ditancapkan ke tanah (dengan ketinggian tertentu), karena terletak di pinggir sungai yang terhubung dengan laut, jika tidak ditinggikan, sangat mungkin air masuk ke dalam rumah. Aset tanah berdirinya bangunan rumah yang ditempati Ibu STK, bukan miliknya sendiri, tetapi milik saudaranya.

Kebutuhan dasar yang menurutnya tidak tersedia adalah air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan dasar ini sebagai keperluan sehari-hari terutama untuk kebutuhan air minum dan memasak nasi, ia memanfaatkan air sungai, yang dekat rumahnya, dengan cara sederhana, yaitu mengendapkan terlebih dulu dalam sebuah tempat. Sementara untuk keperluan buang air besar, keluarga ini, seperti keluarga lainnya, memanfaatkan sungai dekat rumahnya. Program bantuan sosial, yang diterima keluarga Ibu STK saat ini adalah PKH (tahun 2017 –pengembangan), Rastha, dan KIS. KIP belum/tidak ia dapat.

3. LTF, seorang ibu berumur 60 tahun, dengan latar belakang pendidikan SD juga tidak tamat SD (Kelas IV). Ibu LTF mempunyai ketrampilan membuat kue, sehingga tiap hari ia membuatnya. Penjualannya, ia menitipkan di warung-warung disekitarnya dan di kantin sekolah (SD). Suaminya, bekerja sebagai petani.

Ibu LTF mempunyai beberapa orang

anak yang sudah berkeluarga, yang paling kecil duduk di Kelas IV SD. Keluarga ini menempati sebuah rumah, kurang lebih berukuran 10 x 12 meter persegi (relatif besar). Seperti bangunan rumah warga lainnya di Desa Pemurus, konstruksi bangunannya: dinding berasal dari papan, atap dari anyaman ijuk (yang ada disekitar rumah mereka), dan lantai dari papan. Rumah tersebut berdiri diatas topangan tiang-tiang kayu yang ditancapkan ke tanah, dengan ketinggian tertentu, seperti warga desa lainnya, karena letak rumahnya di pinggir sungai yang terhubung dengan Laut Jawa sehingga dalam kondisi air pasang, sangat mungkin masuk rumah jika tidak ditinggikan.

Kebutuhan layanan dasar yang menurutnya belum tersedia adalah air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, seperti keluarga lainnya dilingkungkannya, memanfaatkan air sungai di dekat rumahnya. Sementara, untuk keperluan buang air besar, keluarga ini, seperti keluarga lainnya memanfaatkan air sungai. Program bantuan sosial, yang diterima keluarga Ibu LTF saat ini adalah PKH (tahun 2017 –pengembangan), Rastha, dan KIS.

4. HTH, seorang ibu, berumur 40 tahun, janda (ditinggal mati), dengan latar belakang pendidikan tidak tamat SD (Kelas I). Untuk menghidupi keluarganya, ia berjualan kue (mengambil dari tetangganya dan menjualnya keliling kampung). Disamping itu ia juga buruh tani, dan bekerja *serabutan*.

Ibu HTH mempunyai dua orang anak yang masih duduk di SD, Kelas VI dan IV. Keluarga ini menempati rumah sederhana, berukuran kurang lebih 6 x 6 meter persegi. Seperti bangunan rumah warga lainnya, konstruksi bangunannya: dinding berasal dari papan, atap dari anyaman ijuk (yang ada disekitar rumah mereka), dan lantai

dari papan. Sama dengan rumah warga sekitarnya, rumah tersebut berdiri diatas topangan tiang-tiang kayu (dalam ketinggian tertentu), sehingga tidak memungkinkan air masuk rumah. Rumah Ibu HTH terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dapur dan bagian/ruang keluarga/tamu saja, tanpa kamar tidur.

Air bersih dan sanitasi seperti keluarga kurang mampu yang lain di desanya, masih menjadi permasalahan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, ia memanfaatkan air sungai dekat rumahnya, demikian halnya untuk keperluan buang air besar keluarga ini memanfaatkan sungai. Program bantuan sosial, yang diterima keluarga Ibu HTH saat ini adalah PKH (tahun 2017 pengembangan), Rastra, KIS, dan KIP.

5. NRH, seorang ibu rumah tangga berumur 45 tahun, dengan latar belakang pendidikan *Madrasah Tsanawiyah* (setingkat SMP). NRH murni sebagai ibu rumah tangga. Suaminya sebagai petani.

Ibu NRH mempunyai dua orang anak, yang pertama sudah berkeluarga, dan yang kedua masih duduk di Kelas III SD. Keluarga ini menempati rumah, yang berukuran kurang lebih 10 x 12 meter persegi (relatif besar). Sebagaimana bangunan rumah warga lainnya, konstruksi bangunannya: dinding berasal dari papan, atap dari anyaman ijuk (yang ada disekitar rumah mereka), dan lantai dari papan. Sebagaimana rumah warga di sekitarnya, rumah tersebut berdiri diatas topangan tiang-tiang kayu (dalam ketinggian tertentu), karena letaknya di pinggir sungai yang terhubung dengan laut, sehingga dalam kondisi air pasang, sangat mungkin masuk rumah jika tidak ditinggikan.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih khususnya untuk kebutuhan air minum dan memasak nasi, keluarga ini memanfaatkan air sungai yang dekat rumahnya, dengan cara mengendapkan

dulu dalam sebuah *wadah*. Seperti warga lainnya, untuk buang air besar, keluarga ini memanfaatkan sungai. Program bantuan sosial, yang telah diterima keluarga Ibu NRH adalah PKH (tahun 2017 –pengembangan), Rastra, KIS, dan KIP.

Data kualitatif tersebut menunjukkan bahwa air bersih dan sanitasi yang layak sebagai kebutuhan dasar, belum dapat diakses dan dinikmati warga Desa Pemurus, sebagai akibat belum terjadinya sinergi antar para pihak terkait di pelbagai tingkatan. Hasil penelitian Sahar dan Salomo (2018) menemukan bahwa tidak optimalnya pembangunan dimensi *trust* dan *mutual understanding* sebagai salah satu komponen esensial, juga, kapasitas pemimpin, kolaborasi menjadi variabel penentu menghambat proses kolaborasi ke tingkat yang lebih iteratif dan dinamis (*collaborative dynamics*).

Dari sisi regulasi, sesungguhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 83 (1), telah dikemukakan dengan jelas, pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Keterlibatan pelbagai pihak dalam pembangunan kawasan perdesaan memiliki potensi memajukan desa dengan mengkolaborasi sumber daya yang ada. Kolaborasi dimulai dari rencana pembangunan yang dibahas oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa bahkan sebaliknya dari desa sampai tingkat pusat melalui sebuah konsesus. Permasalahannya, dari sisi konsep *Collaborative Governance*,

kurang berjalannya *sistem konteks* yang dilihat dari kondisi perubahan peraturan perundang-undangan, *drivers* yang dilihat dari elemen *leadership* sangat memengaruhi perencanaan pembangunan di desa, dan dinamika kolaborasi yang terjadi yaitu kondisi yang tidak menguntungkan semua pihak sehingga masih terjadi ego sektoral (Febrian, 2016).

Pemerintah Kabupaten Banjar telah berupaya melakukan sinergi program, baik yang sumber pendanaannya dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Selatan, dan APBD Kabupaten Banjar sendiri. Meskipun demikian kontribusi daerah melalui APBD masih relatif terbatas, seperti terlihat pada tabel (Penerima Bansos Kab. Banjar 2017).

Data tersebut memperlihatkan bahwa bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu menjadi salah satu agenda utama Pemerintah Kabupaten Banjar dalam kerangka penang-

gulangan kemiskinan. Hal itu terlihat dari kebijakan pemerintah daerah setempat, bahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menganggarkan khususnya bidang kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi keluarga miskin. Seperti terlihat pada data, bantuan sosial di wilayah Kabupaten Banjar meliputi jaminan kesehatan yang pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Banjar sendiri. Kemudian, bantuan pangan berupa Raskin/Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan PKH yang sumber pendanaannya murni dari APBN.

Data tersebut juga memperlihatkan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Banjar. Dengan bersinergi, akan diperoleh manfaat yang lebih besar. Dalam kaitan itu, pengalaman Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT KAN) di Kota Payakumbuh menunjukkan, dalam rentang

Rekapitulasi Penerima Bantuan Sosial di Kabupaten Banjar (2017)

NO	KECAMATAN	PBI-JKN APBN	PBI-JK PROV	PBI-JK DAERAH	KKS/ RASTRA/ BPNT	KKS + PKH	KKS NON PKH	BDT 2015- 2016
1	Aluh-aluh	14,967	95	93	2,678	1,618	1,060	14442
2	Aranto	2,524	188	36	424	233	191	2359
3	Astambul	8,072	187	132	1,305	810	495	7791
4	Beruntung Baru	6,039	498	21	1,016	601	415	4812
5	Cntapuri							
5	Darussalam	1,675	5	10	205	75	103	1071
6	Gambut	5,003	31	45	639	206	433	4479
7	Karang Intan	3,797	182	86	499	208	291	4742
8	Kertak Hanbyar	5,806	1	60	795	561	234	3341
9	Martapura	11,485	278	149	1,390	744	646	8217
10	Martapura Barat	7,037	77	113	978	367	611	5337
11	Martapura Timur	4,391	460	87	808	397	411	5519
12	Mataraman	2,188	41	49	333	167	166	2783
13	Paramasan	1,821	2	0	284	176	108	1324
14	Pengaron	2,832	26	10	380	197	183	2518
15	Sambung Makmur	2,208	12	3	416	308	108	2707
16	Simpang Empat	2,766	75	31	334	140	221	3338
17	Sungai Pinang	2,722	36	13	495	376	119	2312
18	Sungai Tabuk	11,246	56	165	1,695	604	1,091	9258
19	Tatah Makmur	3,017	9	9	608	411	197	3905
20	Telaga Bauntung	496	8	0	104	82	22	415
JUMLAH		100,092	2267	1112	15,386	8,281	7,105	90,670

waktu Mei-November 2015, dalam bidang pendidikan dan kesehatan, telah dilakukan layanan terhadap 438 keluarga miskin dan rentan, dengan bermitra dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Mitra Kenanga. Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dan santunan bagi lanjut usia terlantar juga dapat dilakukan dengan bermitra dengan BRI, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Lembaga Infaq Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu) (Muhtar dan Agus, 2016).

Kebijakan tersebut merupakan respon positif dan wujud tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pihak lainnya dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Namun, sesungguhnya kondisi tersebut lebih disebabkan karena BDT (2015) sebagai perbaikan data PPLS (2011) masih menyisakan permasalahan. Pendek kata, kenyataan di lapangan menunjukkan, masih banyak terjadi *exclusion error* keluarga miskin yang sesungguhnya berhak menerima bantuan sosial, karena tidak masuk BDT, maka tidak mendapat bantuan sosial. Demikian sebaliknya, masih terjadi *inclusion error* dimana keluarga yang sebenarnya tidak berhak menerima bantuan sosial, justru menerimanya (Periksa Bag. Hasil Penelitian, Pernyataan Peserta FGD, 2018).

Data keluarga miskin yang tidak valid menyebabkan ketidaktepatan sasaran. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen misalnya, pemerintah daerah setempat membentuk Unit Penanggulangan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK), yang bertujuan mengintegrasikan data warga miskin dan memberikan pelayanan terpadu terkait kebutuhan dan keluhan masyarakat sehingga tidak ada lagi warga miskin yang mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan sosial dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pangan, dan papan.

Sistem integrasi data menjadi kunci dalam meningkatkan pelayanan untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian, tidak ada lagi kejadian warga miskin "*dipingpong*" oleh prosedur birokrasi dan mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen menilai, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tidak fokus dan tidak terintegrasi satu sama lain, karena ego sektoral, diskoordinasi, dan kerancuan data dalam mengkategorikan warga miskin (Muhtar dan Indah, 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan bahwa meskipun berdasarkan data statistik jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar relatif rendah, termasuk didalamnya warga Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh dibanding-kan daerah lain di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan jauh lebih rendah lagi jika dipersandingkan dengan data statistik penduduk miskin secara nasional, realitasnya menunjukkan bahwa warga perdesaan, dalam kasus ini warga Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh belum dapat mengakses kebutuhan dasar air bersih.

Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak nasi khususnya, warga Desa Pemurus, dengan cara sederhana mengendapkan terlebih dulu dalam sebuah wadah (tempayan). Beberapa saat kemudian, jika air sudah terlihat jernih, mereka baru memanfaatkannya sebagai sumber air minum dan untuk memasak nasi. Dan ketika musim hujan, mereka memanfaatkan air hujan sebagai sumber air bersih alternatif. Sementara, untuk kebutuhan dasar lainnya, yaitu kebutuhan dasar pendidikan, kebutuhan dasar kesehatan, dan kebutuhan dasar pangan, melalui APBN dan APBD, warga desa tersebut telah dapat mengakses bantuan sosial pemerintah melalui PKH dan Rastra, meskipun masih dijumpai *exclusion* dan *inclusion error*.

SARAN

Bertolak dari simpulan seperti dikemukakan, disarankan, sinergi program penanggulangan kemiskinan yang *pro grassroot* tersebut, yakni kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi yang layak bagi keluarga miskin, mendesak dilakukan. Dengan terlebih dulu dilakukan koordinasi ditingkat pusat, sekurangnya antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan kemudian diikuti di tingkat daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan dimuatnya naskah tulisan ini di Jurnal Sosiokonsepia, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada mas Agus, sesama anggota Tim Kajian di Kabupaten Banjar, yang dengan ijinnya, penulis menyusun dalam Jurnal ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Banjar dan segenap jajarannya, yang memfasilitasi dan terselenggaranya FGD dengan pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada ketua tim kajian cepat dan Kepala Puslitbangkesos sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R. Sahar & R.V. Solomo. (2018). *Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pinrang. The Indonesian Journal of Public Administration*. Vol. IV. No. 2 Desb. 2018.
- Angka Kemiskinan Di Kabupaten Banjar Mengalami Penurunan. <http://bappelitbang.banjarkab.go.id/index.php/profil-daerah-2/> (Diakses 15 Mei 2018).
- Bogdan & Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Bank Dunia. (2007). *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Grha Info Kreasi.
- *Tingkat Kemiskinan Global Turun*. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/18/09/20/pfc1t1383-bank-dunia-tingkat-kemiskinan-global-turun> (Diakses 16 Mei 2018).
- Covey, S. (2004). *The 7 Habits of Highly Effective People* (Cetakan Ke-15). Jakarta: Binarupa Aksara.
- Dinas Sosial Kabupaten Banjar. (2017). *Rekapitulasi Penerima Bantuan Sosial di Kabupaten Banjar*.
- Febrian, R.A. (2016). *Colaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan, Tinjauan Konsep dan Regulasi*. Wedana, Jurnal Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi. Vol. II No.1 Okt. 2016.
- Komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. <http://presidenri.go.id/pengentasan-kemiskinan/komitmen-terhadap-tujuan-pembangunan-berkelanjutan.html> (Diakses 11 Januari 2019).
- Lewis, D. (2000). "Building 'Active' Partnership in Aid-Recipient Countries: Lessons from a Rural Development Project in Bangladesh". In: Osborne, S. P. (org.). *Public-Private Partnerships: Theory and Practice in International Perspective*. London: Routledge.
- McQuaid, R.W. (2000). *The Theory of Partnership: Why Have Partnerships?* In: Osborne, S. P. (ed.) *Public-Private*

Partnerships: Theory and Practice in International Perspective. London: Routledge.

Moekijat (2002). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Muhtar & Huruswati, I. (2015). *Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan di Sragen*. Sosiokonsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 5 No. 1 Sept – Desember 2015.

Muhtar & Purwanto, A.B. (2016). Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Dalam Penanggu-langan Kemiskinan di Kota Payakumbuh. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Sosiokonsepsia*. Vol. 5 No. 03 Mei – Agustus 2016.

Monografi Desa Pemurus. (2017).

Penrose, A. (2000). *Partnership*. In: Robinson, D.; Hewitt, T. And Harriss, J. (orgs.). *Managing Development: Understanding inter-organizational relationships*. London: Sage and The Open University.

Persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html> (Diakses 17 Januari 2019).

Rahmawati, T., et al. (2014). *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2, No. 4, Hal. 641-647.

Sudarwan, D. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Sejak Kemerdekaan belum menikmati layanan air bersih. <http://keslingkawasanpantai-pesisir.blogspot.com/2009/11/sistem-penyediaan-air-bersih-di-kawasan.html> (Diakses 12 April 2018).

Vasconcellos, M. & Vasconcellosn A. M. (2009). *Partnership, empowerment and local development*. *Interações, Campo Grande*. Vol. 10, no. 2, 133-148.

DINAMIKA PSIKOLOGIS PEMANFAATAN DATA TERPADU DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI DELI SERDANG

PSYCHOLOGICAL DYNAMICS USING INTEGRATED DATA ON POVERTY ALEVIATION IN DELI SERDANG

Togiaratua Nainggolan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial – Kementerian Sosial RI
Jln. Dewi Sartika No 200 Cawang III, Jakarta Timur
Email: togiaratua@gmail.com

diterima: 30 Januari 2019, Direvisi: 28 Agustus 2019; Disetujui: 29 Nopember 2019

Abstrak

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu untuk penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang?. Sejalan dengan rumusan masalah ini, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu untuk penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang- Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan Focuss Group Discussion (FGD) terhadap informan dari pengelola data terpadu dan Organisasi Perangkat Daerah pengelola program penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu diawali dengan respon atas penugasan pengelolaan data terpadu dari pemerintah pusat dalam bentuk respon kognitif, respon afektif, dan respon konatif. Tiga respon ini berlangsung saling mempengaruhi, namun secara kognitif belum sejalan untuk saling menguatkan untuk membangun persepsi atau citra positif. Secara afektif validitasnya dinilai belum meyakinkan, hingga secara konatif hal itu membatasi pemanfaatan data terpadu. Muncul efek domino berupa keragu-raguan pengelola dalam mempromosikan data terpadu kepada pihak terkait. Bahkan di internal Dinas Sosial Deli Serdang pun belum sepenuhnya menggunakan data ini. Untuk meningkatkan pemanfaatan data terpadu, selain perbaikan manajemen umum, pihak pengelola di tingkat pemerintah pusat dan daerah hendaknya mempertimbangkan dinamika psikologis yang berkembang sehingga tercipta harmonisasi. Harmonisasi ini diharapkan menghilangkan situasi disonansi kognitif sekaligus mempercepat pemanfaatan data terpadu hingga peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat miskin.

Kata Kunci: *dinamika psikologis; pemanfaatan; data terpadu.*

Abstract

The problem discussed in this study is how the psychological dynamics of the use of integrated data for handling poverty in the Deli Serdang District Government? In line with the formulation of this problem, the purpose of this research is to describe the psychological dynamics of the use of integrated data for handling poverty in the Deli Serdang District Government in North Sumatra Province. For this reason, research is conducted using a qualitative approach. Data collection uses observation techniques, in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD) of informants from integrated data managers and Regional Organization Organizers managing poverty programs in the Deli Serdang District Government, to be further analyzed descriptively qualitatively according to the research objectives. The results showed the psychological dynamics of integrated data utilization begins with the response to the assignment of integrated data management from the central government in the form of cognitive responses, affective responses, and conative responses. These three responses take place mutually influencing, but cognitively not yet in line to strengthen each other to build positive perception or image. Effectively the validity is considered not convincing, so it conatively limits the use of integrated data. The domino effect appears in

the form of manager's hesitation in promoting integrated data to related parties. Even internal Deli Serdang Social Service has not fully used this data. To improve the use of integrated data, in addition to improving general management, managers at the central and regional government levels should consider the evolving psychological dynamics so as to create harmonization. This harmonization is expected to eliminate the situation of cognitive dissonance while simultaneously accelerating the use of integrated data to improve the social welfare of the poor.

Keywords: *psychological dynamics; utilization; integrated data.*

PENDAHULUAN

Secara sederhana, data adalah fakta yang diambil untuk kepentingan tertentu. Ketika fakta tentang identitas keluarga miskin diambil dengan cara mencatat dan atau bahkan mendokumentasikan, seketika fakta tersebut sudah berubah menjadi data keluarga miskin.

Bagi Indonesia, data ini populer dengan nama Basis Data Terpadu (BDT), yaitu kumpulan dari data keluarga miskin untuk seluruh Indonesia. Isinya memuat nama dan alamat (*by name by adress*), informasi sosial, ekonomi dan demografi sekitar 40 persen penduduk Indonesia yang peringkat kesejahteraannya terendah (TNP2K, 2018). Data ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2011, sehingga bagi sebagian orang data ini juga dikenal dengan nama Data PPLS (Sitepu dkk, 2018)

Awalnya data ini dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Selanjutnya berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) RI Nomor 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pengelolaan data ini beralih ke Kementerian Sosial RI sejak tahun 2016, dengan nama baru Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM). Peralihan pengelola dan perubahan nama ini tidak mengubah substansi data, termasuk makna kemiskinan dan fakir miskin, karena fakir miskin itu sendiri merupakan bagian dari kemiskinan.

Saat ini data terpadu tersebut merupakan hasil Pemutahiran BDT yang dilakukan oleh BPS tahun 2015, yang dilanjutkan dengan pemutahiran oleh Kementerian Sosial secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Perubahan terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI (Kepmensos) Nomor 57/HUK/2017 pada bulan Desember 2017.

Secara kelembagaan, pengelolaan data ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI (Kepmensos) Nomor 30/HUK/2017, dengan membentuk tim pengelola lintas kementerian/ lembaga yang disebut Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Pokja Data Terpadu). Pokja ini terdiri dari 6 unsur kementerian/ lembaga, yaitu: (1) Kementerian Sosial, (2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), (3) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), (4) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), (5) Badan Pusat Statistik (BPS), dan (6) Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa selain aspek nama dan substansi data, kesinambungan juga terjadi antara pengelola lama dengan yang baru karena TNP2K selaku pengelola lama tetap masuk dalam Pokja Data Terpadu. Oleh sebab itu, untuk keseragaman dan membantu pemahaman pembaca, istilah yang dipakai dalam tulisan ini adalah “data terpadu” yang merujuk pada data keluarga miskin atau fakir miskin sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 13/2011.

Perbaikan data ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kemiskinan di Indonesia. Namun Sitepu, dkk (2018) menemukan bahwa pemanfaatan data terpadu ini masih sangat rendah, termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Penyebab utamanya adalah: (1) rendahnya pengetahuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas amanat UU Nomor 13/2011 yang mewajibkan semua pihak yang melakukan penanganan fakir miskin menggunakan data yang sama, (2) kelembagaan dan pengelolaan data terpadu yang belum profesional (3) persepsi terhadap data terpadu yang belum sepenuhnya positif.

Pemanfaatan merupakan sebuah perilaku yang dilatarbelakangi berbagai pertimbangan hingga muncul suatu keputusan untuk memanfaatkan. Pertimbangan tersebut terjadi dalam bentuk sebuah dinamika dalam diri seseorang yang dikenal dengan nama dinamika psikologis. Hasil penelitian Sitepu, dkk (2018) juga menunjukkan bahwa orang yang mengenal data terpadu, belum tentu memahaminya. Sementara orang yang memahaminya pun belum tentu memanfaatkannya. Kasus yang sama terjadi Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

METODE

Sejalan dengan penjelasan ini, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu untuk penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang?. Sejalan dengan permasalahan ini, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu untuk penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Untuk menjawab permasalahan, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan *Focuss Group Discussion* (FGD) terhadap informan yang berasal dari pengelola program penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) dinamika diartikan sebagai gerak (dari dalam); tenaga yang menggerakkan; semangat. Jika dikaitkan dengan kata sosial, akan menjadi gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, dinamika atau dinamis merupakan lawan kata dari statis. Dinamis berarti selalu bergerak, berubah mengikuti keadaan karena pengaruh tertentu, baik internal maupun eksternal. Statis berarti diam atau cenderung konstan. Sedangkan kata psikologis berkenaan dengan psikologi; bersifat kejiwaan atau perilaku.

Jika dua kata tersebut digabung menjadi dinamika psikologis, dapat dimaknai menjadi perubahan yang terjadi dalam perilaku terkait dengan objek tertentu. Objek tertentu yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pemanfaatan data terpadu dalam penanganan kemiskinan.

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti guna atau faedah. Bermanfaat berarti ada manfaatnya, berguna atau berfaedah. Dengan demikian pemanfaatan berarti proses atau cara, perbuatan memanfaatkan untuk hal tertentu (KBBI, 2018). Berdasarkan penjelasan di atas, dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu kemiskinan dapat dimaknai sebagai perubahan atau pasang surut perilaku pemanfaatan data terpadu kemiskinan. Perubahan atau pasang surut perilaku ini terkait dengan sikap dan

atau perilaku untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan data dimaksud dalam penetapan sasaran program penanganan kemiskinan dengan segala pertimbangan dan faktor yang mempengaruhinya.

Walgito (2003) menjelaskan tiga komponen yang membentuk dan mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan dinamika psikologis, yaitu (1) komponen kognitif (*perseptual*), (2) komponen afektif (*emosional*), dan (3) komponen konatif (*action component*). Komponen kognitif (komponen *perseptual*) merupakan komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan seseorang terhadap objek tertentu. Komponen afektif merupakan komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek tertentu. Sedangkan komponen konatif adalah komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek tertentu.

Ketiga komponen ini dapat berfungsi secara harmonis. Namun tidak jarang disertai konflik sehingga tidak sejalan atau tidak saling menguatkan, seperti konflik antara pikiran (aspek kognitif), perasaan (aspek afeksi), dan kemauan (aspek konatif). Namun ketiganya senantiasa berkontribusi dalam setiap perilaku, terlepas dari besar atau kecilnya kontribusi dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika pemanfaatan terjadi dalam berbagai tahapan dalam proses pemanfaatan data terpadu. Untuk itu, gambaran dinamika psikologis yang terjadi dijelaskan mengikuti tahapan dimaksud. Untuk efektivitas penulisan, temuan penelitian dengan sengaja diintegrasikan dalam pembahasan.

1. Gambaran Informan dan Pengenalan Data Terpadu

Informan terpilih merupakan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai program penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. OPD terpilih ada yang sudah mengenal data terpadu dan ada pula yang belum mengenalnya. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Informan Berdasarkan Pengenalan Terhadap Data Terpadu

No.	Informan/Organisasi Perangkat Daerah	Kenal	Tdk Kenal
1.	Dinas Sosial	x	
2.	Dinas Pendidikan	x	
3.	Dinas Kesehatan	x	
4.	Dinas Tenaga Kerja		x
5.	Dinas Perikanan dan Kelautan		x
6.	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		x
7.	Dinas Pertanian		x
8.	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman		x
9.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		x
10.	Bappeda	x	

Tabel di atas menggambarkan betapa rendahnya pengenalan OPD atas data terpadu. Dari 10 OPD, hanya 4 (empat) yang mengenal data terpadu, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Bappeda. Sisanya 6 (enam) OPD belum mengenal. Selain OPD di atas, peneliti mewawancarai 2 orang anggota DPRD, Ketua dan Wakil Ketua komisi terkait. Ternyata mereka baru mendengar keberadaan UU RI Nomor 13/2011 dan data terpadu bersamaan dengan kehadiran peneliti.

2. Pengelolaan Data Terpadu

Sebagaimana dijelaskan oleh Sitepu dan Nainggolan (2019) pengelolaan terkait dengan 4 hal, yaitu: (a) penandatanganan nota kesepahaman, (b) regulasi pengelolaan, (c) sumber daya pengelolaan, dan (d) pelaksanaan verifikasi dan validasi. Untuk Kabupaten Deli Serdang, pengelolaan data terpadu dilakukan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial. Sebagai mitra Kementerian Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, Dinas Sosial menerima pekerjaan ini dengan mengatakan:

“Yah...kami menerima pekerjaan ini sebagai bagian dari tanggung jawab kami, sekaligus sebagai perpanjangan tangan Kementerian Sosial di wilayah ini. Untuk itu kami bekerja mengikuti mekanisme yang ditetapkan Kementerian Sosial sebagai pengelola di tingkat nasional. Tentu saja dengan segala plus minus-nyalah pak”.

Secara formal, proses penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemensos mengawali komitmen Pemerintah Daerah untuk mengelola sekaligus memanfaatkan data terpadu. Berdasarkan catatan Kementerian Sosial, Deli Serdang merupakan salah satu diantara 514 kabupaten-kota yang berkomitmen memanfaatkan data ini (Ditjen PFM-Kementerian Sosial, 2018). Menanggapi hal itu, informan menjelaskan lebih lanjut:

“Alhamdulillah, Kabupaten Deli Serdang masuk bagian dari 514 kabupaten/kota yang menggunakan data terpadu. Jadi kami sudah terdaftar dalam data rekap pengguna di Kemensos Pak. Cuma ya itu, kami masih sekedar memanfaatkan sumber daya yang ada, belum pengadaan pak”.

Pengakuan di atas mencerminkan beban

yang ditanggung Dinas Sosial sebagai pengelola data terpadu. Terkait hal ini, informan menjelaskan:

“hingga saat ini kami hanya bisa memanfaatkan peralatan seadanya. Kami belum punya ruangan khusus, termasuk computer masih pake laptop pribadi pendamping. Ya... karena pengelolanya pun diambil dari pendamping. Tapi ya... biar begitu, kegiatan jalan terus”.

Ketika hal ini dikonfirmasi, tenaga pendamping yang bertugas sebagai pengelola teknis mengatakan:

“... sejauh ini keterbatasan sarana masih teratasi pak. tapi ya itulah kami harus bekerja ekstra, terutama keamanan datanya pak. Kami pake laptop pribadi, kalo laptop-nya hilang macam mana pak, repot kan? Kalau mau bagus, ya computer khususlah. Tapi macam manalah pak, saya cuma pendamping, gak beranilah usul macam-macam. Kita ikuti ajalah apa kata pimpinan, katanya anggaran masih terbatas”.

Secara kognitif, pengelola sadar sepenuhnya akan berbagai keterbatasan dalam pekerjaan ini. Sementara secara afektif, penjelasan ini mengisyaratkan beratnya beban yang ditanggung pengelola. Mulai dari beban anggaran, beban psikologis, dan beban sosial. Beban anggaran muncul sebagai resiko dari kebutuhan teknis pengelolaan data mulai dari sarana dan prasarana pendukung dan honor pengelola. Terkait honor, “... katanya sih ada, tapi belum cair” kata pendamping yang bertugas sebagai pengelola. Sementara untuk penganggaran di daerah masih menemui kendala ketiadaan payung hukum. Lebih jauh tentang hal ini, informan Dinas Sosial menjelaskan:

“...pada level nasional ada UU Nomor

13 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa pendataan fakir miskin dilakukan oleh BPS. Sedangkan Kementerian Sosial bertugas menetapkan kriteria fakir miskin dan melakukan verifikasi dan validasi, menerbitkan kartu identitas fakir miskin dan mengelola data terpadu. Selanjutnya, sebagai pengelola di tingkat nasional Kementerian Sosial menerbitkan Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Sementara pada tingkat daerah, hingga penelitian ini dilakukan belum ditemukan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan data terpadu”.

Kondisi ini menggambarkan penerimaan Dinas Sosial atas kehadiran data terpadu di daerah, baik sebagai pengelola maupun pengguna. Beban yang ditanggung ini sekaligus mempengaruhi aspek konatif pengelola, yaitu kinerja pemanfaatan data terpadu karena bekerja dengan fasilitas yang terbatas. Hal ini sejalan dengan penjelasan Susanti, dkk (2014) yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan atau pemanfaatan sebuah layanan adalah fasilitas yang disediakan pemerintah dan yang dimiliki pengguna.

Bebansosial psikologis ini semakin terasa sehubungan dengan kompleksitas permasalahan data terpadu, terutama dikaitkan dengan tugas melaksanakan verifikasi dan validasi (verivali). Situasi ini menyebabkan terjadinya keterlambatan proses verivali yang seharusnya selesai tahun 2017 pun masih berlangsung hingga penelitian ini dilakukan (April, 2018). Menjelaskan hal ini, informan Dinas sosial mengatakan:

“ ...ya... bagaimana lagi pak,

masyarakat sudah jenuh. Bahkan ada yang menolak didata. Katanya tidak ada manfaatnya, capek didata terus tapi bantuannya gak datang-datang. Di sisi lain, sebagian orang menolak dikeluarkan dari data terpadu. Takut kehilangan (peluang) bantuan sosial dari pemerintah. Bahkan dengan beraninya masyarakat mengatakan ‘...sibuk kali bapak mengeluarkan kami dari data. Ini kan uang negara, bukan uang bapak’, bapak urus saja yang lain’. Sampe begitu kata-katanya pak”.

Permasalahan lain dikemukakan oleh informan dari pengelola data terpadu dengan mengatakan:

“dalam beberapa kasus, aparat desa dan perangkatnya turut campur pak. Ya... maunya orang-orangnya aja yang masuk pak, dengan cara halus bahkan kadang terang-terangan. Ini mempengaruhi validitas data hingga terjadi inclusion dan exclusion error”.

3. Pemanfaatan Data Terpadu

Kata “pemanfaatan” mengandung pengertian sebagai suatu proses, mulai dari mengenal, memahami, memiliki hingga memakai. Proses ini meliputi aktivitas internal pengelola untuk mengenalkan dan pihak eksternal yang ingin mengenal hingga memakai data terpadu dalam penetapan sasaran program kemiskinan. Dinamika psikologis yang terjadi dapat kami gambarkan sebagai berikut.

a. Pengenalan

Hasil penelitian menunjukkan hanya 4 dari 10 informan mengenal data terpadu. Sedangkan sisanya (6 informan) belum mengenal. Satu dari empat informan OPD mengaku mengenal data terpadu karena tuntutan tugasnya, menjelaskan:

“... pengenalan data terpadu terjadi begitu saja pak. Kita mengikuti irama pekerjaan sesuai tupoksi. Pas masuk dinas sosial, kami belajarlal, lalu ketemu istilah BDT, TNP2K, PPLS dan lain-lain. Trus pengelolaan data terpadu pindah ke Kemensos, tapi TNP2K masih tetap ada dan masuk Pokja. Sebagai mitra kerja Kemensos di daerah, ya... kami terlibatlah. Itulah bentuk tanggung jawab dan konsekwensi jabatan kami. Jadi kami mengikuti kegiatan Kemensos sebagai pengelola data terpadu di tingkat pusat. Dinas Sosial pun menjadi pengelola di tingkat daerah, begitu pak. Trus sebagai pengelola di tingkat daerah kadang-kadang kami juga belajarlal ke Kemensos. Kadang-kadang kan kita dipanggil mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan sebagainya“, kata informan dari Dinas Sosial.

Ini berarti proses pengenalan terjadi secara vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya. Hal yang berbeda terjadi di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Proses pengenalan terjadi secara horizontal melalui interaksi sesama OPD di daerah. Lebih jauh informan Dinas Pendidikan menjelaskan:

“ kami kenal data terpadu pas diundang rapat di Dinas Sosial kaitannya dengan beasiswa miskin atau Kartu Indonesia Pintar. Dulu kami sempat terjun langsung ke lapangan mencari keluarga miskin bekerjasama dengan pendamping PKH, karena kami tahu penerima PKH adalah keluarga miskin. Sekarang karena sudah konek dengan Dinas Sosial, kami lebih enak, dan ternyata.... PKH tidak identik dengan data terpadu. Ya... terasa lebih tertata sekarang programnya. Saya rasa Dinas Sosial pun merasa terbantu melaksanakan komplementaritas program“.

Pengakuan senada dikemukakan oleh Dinas Kesehatan dengan mengatakan:

“pernah kami dengar BDT atau baca lewat media, tapi secara konsep tahu pas kami diundang rapat ke Dinas Sosial. Saat itu kami juga membahas keluarga miskin yang butuh bantuan perawatan di rumah sakit“.

Sedangkan untuk Bappeda, mereka mengaku sudah mengenalnya sejak awal ketika data terpadu masih dikelola oleh TNP2K dengan nama Basis Data Terpadu (BDT).

Bagi OPD yang belum mengenal, mereka mengaku ada kalanya programnya terkait dengan kemiskinan, namun sasarannya lebih ditentukan sendiri bekerja sama dengan *stakeholder* yang tersedia di lapangan seperti pendamping PKH, Ketua RT dan Ketua RW, aparat desa, atau tokoh masyarakat lain yang dianggap relevan. Menanggapi ketidaktahuan mereka atas data terpadu, mereka mengatakan:

“ya.. mungkin aja kami pernah mendengar data terpadu pak. Kalau bukan saya, bisa aja teman-teman atau pejabat sebelumnya, tapi mungkin kami belum menyadari hal itu sebagai satu kebutuhan dalam penetapan sasaran program. Akibatnya berlalu begitu saja pak. Kami belum pernah menerima sosialisasi dari instansi pusat atau diajak Dinas Sosial membahas hal itu pak“, demikian pengakuan mereka dalam sesi diskusi kelompok“.

Ketika peneliti menanyakan kewajiban menggunakan data terpadu, mereka mengaku tidak mengetahui hal itu, termasuk keberadaan UU Nomor 13 tahun 2011 yang mengamatkan hal itu. Lebih jauh mereka bahkan mengungkapkan:

“... terus terang kami menyesal baru mengetahui hal ini. Jika demikian mari

kita proses untuk yang akan datang, tapi ya itu, Dinas Sosial pun sebagai pengelola harus melakukan sosialisasi, termasuk keberadaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Biar kami-kami ini tahu mekanismenya, akses datanya kayak apa. Jika mungkin data itu dibuka saja sehingga kita bisa langsung akses. Ini kan jamannya online ya kan?”

Menanggapi keluhan ini, pihak Dinas Sosial lapang dada mengakui ketiadaan sosialisasi data terpadu seraya menjelaskan berbagai keterbatasan sekaligus menyampaikan rasa terimakasih atas respon perwakilan OPD yang menjadi peserta diskusi kelompok.

“Kami senang atas respon bapak-ibu semua. Momen ini akan kami manfaatkan mengoptimalkan pemanfaatan data terpadu ini. Karena pemanfaatan data ini akan mempercepat penanggulangan kemiskinan. Ya kan bapak-ibu, nantinya kita jadi gotong royong mengentaskan kemiskinan di Deli Serdang ini. Ini akan kami laporkan ke pimpinan agar kegiatan sosialisasinya mendapat dukungan, terutama anggaran”.

Dari penjelasan di atas muncul beberapa persoalan dalam pengenalan data terpadu. Pertama, sosialisasi berjalan sangat lambat, baik oleh Kementerian Sosial sebagai pengelola baru maupun oleh TNP2K sebagai pengelola lama. Hal yang sama dialami oleh Dinas Sosial. Kelambatan ini menyebabkan pengetahuan atas data terpadu minim. Pada hal Jayanti, dkk (2011) mengatakan bahwa pengetahuan merupakan bagian yang penting dari perilaku konsumen, karena pengetahuan mempengaruhi seseorang sebelum memakai suatu produk atau jasa. Artinya pengetahuan atas data terpadu akan mempengaruhi persepsi terhadap data terpadu itu sendiri. Sementara Kotler & Amstrong (2008) menjelaskan bahwa

persepsi merupakan proses dimana seseorang menginterpretasikan sebuah informasi produk, merupakan salah satu faktor psikologis yang memengaruhi perilaku konsumen.

Jika data terpadu diposisikan sebagai satu produk jasa, maka kualitas informasi berupa pengetahuan atas produk dimaksud akan mempengaruhi perilaku OPD sebagai konsumen.

Kedua, model sosialisasi vertikal hanya mengandalkan Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah pusat. Seyogyanya instansi lain di tingkat pusat dilibatkan, Misalnya Kementerian Pertanian melakukan sosialisasi data terpadu ke Dinas Pertanian, Kementerian Kesehatan ke Dinas Kesehatan, Kementerian Pendidikan ke Dinas Pendidikan dan seterusnya. Bahkan jika mungkin melibatkan semua Kementerian/ Lembaga yang menjadi anggota Pokja Data Terpadu. Misalnya Kementerian Dalam Negeri mengaktifkan koordinasi langsung ke Gubernur, Bupati, Walikota, dan DPRD. Demikian pula instansi lainnya.

b. Pemahaman

Hasil penelitian menunjukkan hanya tiga OPD yang memahami dengan baik data terpadu, yaitu Dinas Sosial, Bappeda, dan Dinas Pendidikan. Pemahaman Dinas Sosial atas data terpadu adalah hal yang wajar mengingat statusnya sebagai pengelola data dimaksud di daerah. Hal yang sama terjadi pada Bappeda sehubungan dengan status instansi sejenis di tingkat pusat (Bappenas) sebagai anggota Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin/Pokja Data Terpadu (sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 30/HUK/2017). Pemahaman Bappeda ini juga didukung oleh TNP2K yang menjadikan Bappeda sebagai mitra kerjanya di daerah. Sedangkan

informan dari Dinas Pendidikan mengaku memahami data terpadu karena terbantu salah satu stafnya pindahan dari Dinas Sosial.

“Namun demikian, pemahaman kami tetap saja kurang memadai karena kami sulit mengikuti dinamika yang terjadi di internal pengelolaan data terpadu pak”.

Demikian pengakuan informan Dinas Pendidikan.

Selain tiga OPD tersebut, beberapa OPD lain salah dalam memahami data terpadu. Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja mengira data peserta PKH sebagai data terpadu. OPD ini dengan sengaja mencari peserta PKH bekerjasama dengan pendamping untuk dijadikan sasaran programnya.

“Ya..yang kami tahu seperti itu pak, jadi kalau butuh peserta pelatihan tenaga kerja, kami hubungi aja pendamping PKH di lapangan. Soalnya kami dapat arahan dari pimpinan untuk memprioritaskan peserta PKH dalam kaitannya kerjasama rame-rame mengeroyok kemiskinan keluarga PKH” demikian pengakuan informan Dinas Tenaga Kerja.

Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa mereka merasa sudah memanfaatkan data terpadu. Pemanfaatan tersebut dilakukan dalam konteks komplementaritas PKH, dan belum didasarkan pada pelaksanaan UU Nomor 13 tahun 2011. OPD lainnya dengan jujur mengakui “macam mana mau paham pak, nama data terpadu *aja* baru pertama kali ini dengar dari bapak” (maksudnya dari peneliti). Pengakuan ini dibenarkan OPD lain saat diskusi kelompok dengan mengatakan:

“...biar baru dengar saat ini, sesungguhnya kami senang dengan data ini. Tapi muatan data ini ditambah lagilah sesuai dengan kebutuhan sektoral

masing-masing dinas. Misalnya selain nama keluarga miskin, kami dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman perlu data status kepemilikan tanah. Jadi kalau kami membantu rumah mereka yang tidak layak huni, tidak perlu lagi mendata ke lapangan. Begitu juga dengan kebutuhan dinas lainnya. Kalau bisa dipenuhi, saya kira tidak perlu setiap OPD mendata, ini aja kita pakai. Jadi benar kata bapak tadi, pengentasan kemiskinan pun akan semakin cepat, tapi sosialisasi harus intensif, bukan hanya data terpadu, termasuk undang-undangnya. Sasarannya pun harus sampe ke DPRD agar Perda-nya diterbitkan sebagai payung hukum”.

Demikian peserta diskusi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang direspon positif oleh seluruh peserta.

Secara afektif muncul rasa haru dan gembira menyambut kehadiran data terpadu, namun tidak didukung aspek kognitif yang memadai. Pentingnya pemahaman OPD atas data terpadu ini sejalan dengan pendapat Mowen (1998) yang mengatakan bahwa tahap pemaparan, perhatian, dan pemahaman merupakan bagian penting dari proses persepsi. Sementara Radiansyah (2016) menyatakan bahwa persepsi merupakan hasil akhir dari informasi yang ditangkap individu atas dasar sensasi dan memori yang berasal dari lingkungan. Dalam hal ini sensasi dan memori yang dimaksud didasarkan atas informasi yang diperoleh OPD berdasarkan sosialisasi hingga membentuk persepsi positif atas manfaat data terpadu.

c. Pemilikan

Arimbawa, dkk (2017) menemukan bahwa sikap pengguna memiliki pengaruh terhadap niat pengguna yang kemudian dapat menjadi variabel mediasi hubungan antara persepsi pengguna dan niat untuk

menggunakan sesuatu. Sejalan dengan pendapat ini, niat menggunakan data terpadu, dilaksanakan dengan mengenal, memahami, hingga membutuhkan dan memiliki data terpadu. Untuk memiliki data terpadu, harus mengajukan permohonan ke pengelola, yaitu Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di daerah.

Sejalan dengan penjelasan di atas, OPD yang memiliki data terpadu hanya dua, yaitu Dinas Sosial dan Bappeda. Kedua OPD ini memilikinya dalam kapasitas sebagai pengelola tingkat daerah sekaligus sebagai pengguna. Secara umum terbatasnya kepemilikan data terpadu ini disebabkan oleh lemahnya sosialisasi atas keberadaan data terpadu dan UU Nomor 13/2011.

“Ya... otomatis kami tidak tahu. Kalau tidak tahu ya tidak kenal. Kalau tidak kenal, bagaimana mau memilikinya?, ini sumber persoalannya pak”.

Demikian salah satu peserta diskusi.

Dinas Pendidikan yang sudah mengenal dan memahami data terpadu belum memilikinya karena mereka mengira data tersebut hanya data sektoral yang kepemilikannya hanya sebatas instansi sosial seperti Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah.

“Karena penilaian kami demikian, kami merasa tidak perlu memilikinya. Kalau kami butuh, tinggal koordinasi aja dengan Dinas Sosial. Kami tidak tahu data tersebut bisa dimiliki OPD lain”.

Ini berarti terjadi salah persepsi antara pengelola dengan calon pengguna sehingga tidak muncul niat memiliki hingga menggunakan data terpadu. Persoalannya kembali lagi ke sosialisasi yang minim dari pengelola.

- d. Pemakaian data dalam penetapan sasaran program.

Secara eksplisit, OPD yang memakai data terpadu untuk penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan hanya Dinas Sosial. Sedangkan secara implisit, Bappeda memanfaatkannya untuk penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian, ada dua OPD yang memanfaatkan data terpadu ini.

Rendahnya pemanfaatan ini merupakan hal yang wajar mengingat kondisi pengenalan, pemahaman dan pemilikan data terpadu yang masih minim seperti diuraikan di atas. Situasi ini menunjukkan rendahnya kinerja sosialisasi atas keberadaan data terpadu, baik oleh TNP2K dan Bappeda selaku pengelola awal maupun oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial selaku pengelola saat ini.

“Persoalannya adalah siapa yang menjadi penanggung jawab kegiatan sosialisasi ini di daerah” demikian pertanyaan salah satu peserta diskusi kelompok. Menanggapi hal ini, forum FGD tidak membuat satu jawaban yang tegas, kecuali menunjuk Kementerian Sosial bersama anggota Satgas Terpadu.

“Ini berarti masih ada persoalan krusial yang harus segera diselesaikan pengelola di tingkat pusat, tugas dan tanggung jawab daerah harus jelas”.

Demikian tanggapan peserta diskusi dari Dinas Tenaga Kerja.

Ketidakjelasan ini menyebabkan Dinas Sosial sebagai pengelola tingkat daerah ragu untuk melangkah lebih jauh. Persoalan mendasar lainnya adalah persepsi OPD terhadap data terpadu belum sepenuhnya positif. Bahkan di internal Dinas Sosial masih mengeluhkan validitas data tersebut. Salah satu peserta diskusi dari Dinas Sosial mengungkapkan:

“sebaiknya pengelolaan data terpadu ini diserahkan saja ke pihak lain yang

lebih professional biar tuntas. Soalnya dari dulu data ini bermasalah terus”.

Mendengar pernyataan ini, peserta FGD yang lain kaget dan terdiam melongo saling lirik penuh ekspresi tanda tanya, terkesan menggugat kelayakan data terpadu ini untuk dipakai. “Lho, kalau di internal pengelola aja masih diragukan macam mana mau dipromosikan?”, demikian ungkapan peserta FGD dari OPD yang lain.

Setelah ditelusuri lebih jauh, sumber masalah pengelolaan bukan saja bersumber dari pendelegasian penugasan ke daerah yang dirasakan kurang tuntas oleh daerah, tetapi juga kejelasan status pengelolaan di daerah pasca peralihan pengelolaan dari TNP2K ke Kementerian Sosial.

“Kami juga masih bingung ini pak, kami diserahi pusat mengelola data terpadu ini. Tapi kami lihat, TNP2K juga masih seperti pengelola. Mereka masih menjalankan kegiatan ke daerah, tapi mereka kerjasama dengan Bappeda, bukan Dinas Sosial. Macam mana ini pak? Kalau kata teman-teman bilang ini seperti dualisme dalam pengelolaan. Tapi ini kata teman-teman ya pak”.

Demikian ungkapan informan dalam wawancara.

Persoalan ini menimbulkan suasana kurang kondusif secara psikologis di lingkungan pengelola.

”... kami kira ini masalahnya ada di tingkat pusat, yang dampaknya ke daerah. Kami dengar teman-teman di daerah lain juga begini pak”.

Demikian informan melanjutkan komentarnya.

Suasana internal pengelola sebagaimana dijelaskan di atas, menyebabkan mereka tidak fokus “menjual” data terpadu ke unit lain.

“Macam inilah pak situasinya, macam mana lagi. Otoritas kita sebagai pengelola jadi begini. Belum lagi validitas data yang masih banyak diprotes warga. Kita kan jadi sedikit ragu menjual data ini pak. tapi macam manalah kita tetap kerjakan”.

Keseluruhan dinamika ini terakumulasi dan berpengaruh pada proses hingga kinerja pengelola data terpadu di daerah, hingga menyebabkan rendahnya pemanfaatan data terpadu.

Penjelasan di atas, menggambarkan bahwa pengelola data terpadu mengalami *disonansi kognitif* sebagaimana dijelaskan oleh Baron & Byrne (2004). Keadaan yang tidak menyenangkan karena menyadari ketidaksinkronan antara komponen pengetahuan yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku pemanfaatan data terpadu.

Situasi ini membawa efek domino berupa ketidakpercayaan diri pengelola dalam mempromosikan data terpadu kepada pihak terkait. Bahkan di internal Dinas Sosial Deli Serdang pun belum sepenuhnya menggunakan data ini sebagaimana dijelaskan oleh Sitepu dan Nainggolan (2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu di Pemerintah Daerah Deli Serdang diawali dengan respon atas penugasan oleh pemerintah pusat. Respon dimaksud berlangsung dalam bentuk respon kognitif, respon afektif, dan respon konatif. Tiga respon ini berlangsung saling mempengaruhi, namun belum sejalan (belum harmonis) untuk saling menguatkan membangun persepsi atau citra positif atas data terpadu. Kondisi aspek kognitif ini, menimbulkan *disonansi*

kognitif, yaitu suasana hati kurang nyaman bagi pengelola karena beban anggaran dan beban sosial psikologis. Akhirnya secara konatif hal ini membatasi langkah pengelola memperomosisikan data terpadu. Sementara pengguna dan atau calon pengguna, menyambut baik kehadiran data terpadu secara afektif dengan disertai rasa haru dan gembira, namun secara konatif belum bisa memanfaatkannya karena aspek kognitif yang terbatas.

SARAN

Sejalan dengan penjelasan di atas, untuk meningkatkan pemanfaatan data terpadu, selain manajemen umum, pihak pengelola di tingkat pemerintah pusat dan daerah hendaknya mempertimbangkan dinamika psikologis yang berkembang dalam pengelolaan data terpadu sehingga tercipta harmonisasi antara aspek kognitif, afektif dan konatif atas data terpadu. Harmonisasi ketiga aspek ini diharapkan menghilangkan situasi *disonansi kognitif* sekaligus mempercepat pemanfaatan data terpadu hingga peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat miskin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang- Provinsi Sumatera Utara atas kerjasamanya dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia: Dilengkapi dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*. Surabaya: Amelia.
- Arimbawa, P.A. P., Surachman dan Hussein, A. S. (2017). Pengaruh Persepsi dan Sikap Pemain Terhadap Niat Menggunakan *Mobile Game* menggunakan *Technology Acceptance Model*, Jurnal Ilmiah Manajemen, Volume VII, No. 3, Okt 2017, 348 –362.
- Baron, Robert.A. & Byrne, Donn. (2004). *Psikologi Sosial*. (Edisi 10) Alih Bahasa: Ratna Djuwita. Jakarta: Erlangga.
- Ditjen PFM-Kementerian Sosial. (2018). *Rekapitulasi MoU Data Terpadu PPFM*. Jakarta: Ditjen PFM-Kementerian Sosial RI.
- Jayanti TS, Djamaludin MD, Latifah M. (2011). Persepsi, Pengetahuan, Dan Perilaku Remaja Dalam Pembelian *Compact Disk* Bajakan. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. 4(2): 190-198.
- Kotler P & Amstrong G. (2008). *Prinsip-Prinsip Pemasaran* Jilid 1. Ed ke-12. Sabran B, penerjemah. Jakarta (ID): Erlangga. Terjemahan dari *Principles of Marketing Twelfth Edition*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), (diakses 4 Desember 2018)
- Mowen, J.C. dan Minor, M. (1998). *Consumer Behavior*. Ed ke-5. New Jersey: Prentice Hall.
- Pengertian Dinamika Menurut Para Ahli, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-dinamika-menurut-para-ahli/> (diakses tgl 4 Desember 2018)
- Radiansyah, M. (2016). *Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai di Kota Medan*(tesis). Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sitepu, A, dkk. (2018). *Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir*

- Miskin (Executive Summary)*. Jakarta: Puslitbang Kessos-Kementerian Sosial RI.
- Sitepu, A & Nainggolan, T. (2019). Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Sosio Konsepsia* Vol 8 No 2 Januari- April 2019, hal 66-80.
- Susanti, A., Saedudin, Rd. R., Witarsyah, D. (2014). *Government Kabupaten Klaten Menggunakan Model Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT) Dengan Metode Structural Equation Modeling (SEM)*: Bandung: Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom.
- TNP2K. (2018). *Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin*. [http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin/tentang-data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin-\(diakses 25 Januari 2018\)](http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin/tentang-data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin-(diakses%20Januari%202018)).
- Walgito, B. (2003). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.

PERAN PEKERJA SOSIAL SEKOLAH DALAM MENANGANI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH-SEKOLAH DI BANDUNG

ROLE OF SCHOOL SOCIAL WORKER IN DEALING WITH BULLYING IN SCHOOL IN BANDUNG

Sakroni

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Jl. Ir. H.Djuanda no. 367 Bandung, Indonesia, 40135
Email: sakroniateng@yahoo.co.id

Diterima: 16 Agustus 2019; Direvisi: 14 Nopember 2019; Disetujui: 29 Nopember 2019

Abstrak

Maraknya kasus kekerasan pada siswa sekolah sangat mengkhawatirkan orang tua dan para pendidik. Sekolah dituntut untuk membentuk karakter positif serta mencegah terjadinya perundungan. Indonesia sejak lama sudah memperhatikan kesejahteraan anak-anak di sekolah, termasuk memperhatikan siswa yang tidak mampu memperbaiki tingkatan kelas mereka. Secara bertahap, perhatian ini harus ditingkatkan karena kurikulum menjadi lebih sering berubah. Selain itu, pekerja sosial sekolah harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti ruang lingkup misi sekolah yang menjadi lebih luas dan lebih inklusif untuk memastikan rasa hormat siswa. Karena sekolah harus mengutamakan perlindungan terhadap siswa, masalah perundungan di lingkungan sekolah harus menjadi perhatian utama bagi administrator sekolah dan regulator pendidikan. Penelitian kualitatif ini telah mengumpulkan data melalui sumber deskriptif dan metode studi kasus di Sekolah Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memperluas pengetahuan tentang peran pekerja sosial di lingkungan sekolah untuk mencegah perundungan dan mendidik para korban, pelaku, serta orang tua siswa. Studi ini menggali kontribusi yang diberikan oleh pekerja sosial sekolah dalam membantu sekolah untuk mencegah intimidasi dan perundungan di lingkungan sekolah di Bandung. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah peran pekerja sosial di lingkungan sekolah untuk mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa sekolah yang berpartisipasi dalam penelitian ini sangat membutuhkan pekerja sosial yang dapat mengisi posisi kosong dalam proses pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk mencegah peristiwa perundungan.

Kata kunci: pekerja sosial sekolah, perundungan, intimidasi, konseling.

Abstract

The rise of violence cases on students is very worrying for parents and educators. School has been challenged to shape the character of a positive person and prevent bullying event. Indonesia have long been concerned about the children prosperity in school. They also pay attention to students who are not able to improve the class degree. Gradually these concerns become more important as curriculum are changing more frequently. In addition, school social worker must consider other factors such as the school has expanded the mission scope and become more inclusive to ensure student respects. As school must consider the student protection as more important, then, the bullying issues in school environment become main attention by school administrator and education regulator. This study is qualitative that collecting the data through descriptive source and study cases method in schools Bandung. The purpose of this research is to expand the knowledge about the role of social workers in schools environment to prevent bullying and educate victims and perpetrators as well as student parents. This study explore the contribution given by school social worker to help school to prevent intimidation and bullying in school environment in Bandung. The main research question is the role of social worker in the school environment to prevent bullying prevention in school environment. Our analysis result concluded that the social worker is an urgent need for

the school participating in this study. The social workers can fill the void position in the educational process which they must stay as school social workers to deal with the bullying event prevention.

Keywords: school social workers, bullying, intimidation, counseling.

PENDAHULUAN

Munculnya perilaku kekerasan yang dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah telah menjadi perhatian bagi guru dan orang tua (Akos & Galassi, 2004). Sekolah sebagai tempat bagi anak-anak untuk mendapatkan layanan pengetahuan dan pendidikan telah menghadapi tantangan untuk mengevaluasi layanan dan bantuan mereka dalam mencegah perilaku kekerasan di kalangan siswa mereka, terutama perundungan di lingkungan sekolah (Espelage & Swearer, 2003).

Pada dasarnya, perundungan terjadi karena siswa melanggar peraturan sekolah, mulai dari bersikap tidak etis (misalnya, merokok di area sekolah, minum alkohol, sering tidak hadir) hingga perilaku menyimpang (misalnya mencuri, berkelahi, dan mengintimidasi junior) (Hinduja & Patchin, 2014). Pada penyimpangan yang lebih serius, mereka bahkan terlibat dengan kegiatan kriminal seperti penyalahgunaan narkoba, geng, dan kepemilikan senjata

Tabel 1. Perilaku menyimpang siswa di wilayah sekolah pada tahun 2014

No	Kelompok/ wilayah	Tahun				Total
		2011	2012	2013	2014	
Pendidikan						
A	Perkelahian pelajar	20	71	52	103	246
B	Intimidasi siswa	69	53	41	46	209
C	Perusakan sarana sekolah	50	66	60	67	243
D	Perundungan	61	130	91	149	431
E	Sering tidak hadir	5	8	14	10	37
F	Dikeluarkan	11	21	15	12	59
G	Kegagalan dalam ujian	58	103	5	15	181

H	diskriminasi kebijakan (pemerasan di sekolah, penyegehan sekolah, pembatasan ujian, dll.)	60	63	56	36	215
	media pembelajaran/ buku teks yang tidak mendidik	4	7	37	23	71
TOTAL		338	522	371	461	1692

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014

Tabel 1 menunjukkan berbagai masalah dan kekhawatiran yang dihadapi oleh sekolah terkait dengan perilaku menyimpang siswa yang mencirikan dampak dari perundungan. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan mendasar yang perlu dipertimbangkan. Pertama, sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh sekolah untuk menanamkan visi layanan pendidikan dan perlindungan kepada siswa di lingkungan sekolah, termasuk upaya mereka dalam menerapkan konsep anti-kekerasan terhadap anak-anak? Kedua, faktor apa saja yang harus mendapatkan perhatian penuh oleh administrator sekolah dan pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak berdasarkan visi layanan kerja sosial?

Perilaku perundungan di sekolah telah dipelajari di berbagai daerah (Nocentini dkk., 2013; Fekkes dkk., 2016; dan Farmer dkk., 2015), tetapi skala akibat dan intervensi sosial yang tepat masih jarang dilaporkan. Karena perundungan berdampak besar kepada siswa (Kaufman, 2013), menyatakan perlunya intervensi yang tepat. Di samping itu, hanya sebagian kecil guru (27,5 persen) yang

berpikir bahwa intimidasi adalah perilaku normal, sementara mayoritas guru (73 persen) menganggap bahwa ia merupakan perilaku yang berbahaya bagi anggota sekolah dan masyarakat. Masalahnya akan memburuk ketika siswa berada dalam tekanan, dan menularkan perilaku tersebut kepada siswa lain (Shearer, et al., 2016). Menurut Paludi, M. A. (2015) intimidasi paling sering terjadi pada masa sekolah menengah (misalnya, tingkat SMP dan SMA) karena egosentrisme remaja berkembang pada usia ini.

Ada beberapa faktor yang diyakini menjadi penyebab intimidasi di sekolah, utamanya disebabkan oleh pengaruh teman sebaya dan iklim sekolah. Pengaruh teman sebaya telah dilaporkan sebagai faktor utama terjadinya perundungan di sekolah (Espelage, et al., 2015). Selain itu (Dembo, dkk, 2016), melaporkan bahwa pengaruh “jadilah teman” adalah faktor kedua yang paling negatif yang mendorong kekerasan, perilaku bolos, serta kurangnya rasa hormat kepada guru dan orang tua. Ini didukung oleh Espelage, (2014) bahwa siswa khususnya di daerah perkotaan telah mengembangkan perilaku perundungan di sekolah karena dorongan dari teman sebaya. Pengaruh teman sebaya dan iklim sekolah memerlukan intervensi, terutama dengan dukungan eksternal sebagai alternatif untuk mengurangi penyebab terjadinya perilaku perundungan di sekolah, baik secara fisik maupun mental. Pekerja sosial telah menjadi tren utama dalam penelitian layanan sosial (Payne, 2015). Ketika komunitas tumbuh dan menuntut layanan yang lebih baik, maka pekerja sosial harus memperluas peran dan layanan mereka.

Pekerja sosial juga dituntut harus ada di sekolah untuk meningkatkan layanan pendidikan sosial, terutama dalam hal iklim sekolah dan hubungan antarsiswa. Selain itu, pekerja sosial dapat berkontribusi pada

lingkungan pendidikan dengan mempraktikkan pengetahuan dan kehidupan sosial mereka untuk membantu sekolah dalam intervensi pencegahan terjadinya perundungan (Hepworth dkk., 2016; Larkin, dkk, 2014) telah membahas bagaimana pekerja sosial dapat menjadi bagian integral dalam lingkungan sekolah melalui berbagai peran seperti menjadi anggota kelompok tugas atau komite sekolah, membantu dalam penelitian sekolah sosial, dan mengevaluasi program perencanaan jangka panjang milik sekolah. Sekolah juga dapat mempekerjakan pekerja sosial untuk mengevaluasi faktor risiko keselamatan siswa dan potensi masalah. Selain itu, pekerja sosial sekolah dapat bekerjasama dengan orang tua untuk mencegah perundungan, memberikan intervensi yang sesuai untuk korban, dan memberi layanan dan sumber daya yang memadai.

Studi yang menjelaskan kontribusi pekerja sosial sekolah masih sangat kurang, terutama dalam konteks sosial Indonesia dan lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, penelitian ini akan memperbaiki kesenjangan dalam hal literatur. Pada topik-topik penelitian perundungan, pekerja sosial sekolah dapat memiliki peran dan partisipasi yang signifikan jika mereka dapat mengatur kebijakan dan prosedur di sekolah atau melakukan hal-hal untuk membantu para korban, dan mencegah mereka dari perundungan berikutnya (Hinduja, 2016).

Hinduja dan Patchin (2014) mendefinisikan perundungan sebagai peristiwa yang mengerikan dan kejam yang dilakukan oleh seseorang kepada anak atau sekelompok anak. Perundungan dapat terjadi sekali atau berulang kali. Para korban perundungan akan merasa malu, terluka, atau terhina dan terancam. Terkadang, para korban tidak menyadarinya (Smith, 2014), mendefinisikan perundungan sebagai perilaku yang terjadi berulang kali untuk menyakiti orang lain. Perilaku ini dapat

dilakukan dengan menyerang, baik secara fisik maupun verbal, dan mengisolasi korban.

Beberapa ahli juga menambahkan informasi baru untuk mendefinisikan perilaku perundungan (e.g., Smith, 2014; Hinduja & Patchin, 2014; Litwiler, & Brausch, 2013).

- a. Perilaku perundungan melibatkan kekuatan yang tidak seimbang. Anak-anak yang menjadi pelaku dapat melakukan intimidasi karena mereka memiliki kekuatan lebih dari korban, seperti usia yang lebih tua, badan yang lebih tinggi, dukungan teman sebaya yang lebih luas, dan status yang lebih tinggi.
- b. Perilaku perundungan sering kali merupakan kegiatan yang diulang-ulang untuk mendesak korbannya ke kondisi kronis.
- c. Perilaku perundungan dilakukan dengan tujuan untuk melukai korban, baik secara mental maupun fisik.
- d. Perilaku perundungan memiliki serangkaian serangan fisik, penghinaan verbal, penyebaran fitnah, gosip, hingga ancaman eliminasi dari teman sebaya.

Pekerjaan sosial adalah profesi yang berkaitan dengan membantu individu, keluarga, kelompok, dan komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan kolektif mereka (Lee & Hudson, 2017). Tujuannya adalah untuk membantu orang mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka untuk untuk menyelesaikan masalah menggunakan sumber daya mereka sendiri dan masyarakat. Pekerjaan sosial berkaitan dengan masalah individu dan pribadi, juga dengan masalah sosial yang lebih luas seperti kemiskinan, pengangguran dan kekerasan dalam rumah tangga (Payne, 2015).

Pekerjaan sosial merupakan bidang yang sangat luas dan beragam; ia menawarkan berbagai pilihan karier yang hampir tak terbatas.

Pekerja sosial bekerja di berbagai pengaturan, termasuk rumah sakit, organisasi nirlaba, pusat kesehatan mental, sekolah, lembaga advokasi, organisasi masyarakat, dan kantor pemerintah.

Sebuah studi oleh Gould & Taylor (2017) menunjukkan bahwa pekerja sosial harus beradaptasi dengan misi sekolah untuk menyediakan layanan sosial dengan kompetensi dan kepercayaan diri yang dimodifikasi. Karenanya, pekerja sosial sekolah membutuhkan tingkat kompetensi yang lebih tinggi untuk menangani tugas mereka dalam intervensi dan pencegahan perundungan. Ini masuk akal, karena untuk memenuhi peraturan akademik, mempertahankan dan meningkatkan fungsi mental, emosional, perilaku, kognitif dan pembelajar sosial siswa, pekerja sosial perlu meningkatkan kemampuan diri mereka (Hepworth dkk., 2016). Pekerja sosial sekolah juga dapat mempromosikan pengembangan lingkungan sekolah untuk mendukung hubungan yang positif, meningkatkan harga dan pemberdayaan diri.

Ada banyak dasar peraturan atau hukum yang menjadi tantangan utama bagi sekolah dalam upaya perlindungan terhadap siswa mereka. Sekolah pekerja sosial dapat berperan penting untuk membantu siswa mengurangi perilaku berisiko dan dampaknya, terutama dari perilaku intimidasi (Veenstra dkk., 2014). Pekerja sosial sekolah dapat menangani masalah serta memberikan informasi alternatif dan konsultasi tentang perilaku perundungan. Pekerja sosial sekolah yang peka terhadap hubungan antara siswa dan staf dapat menaikkan tingkat keselamatan siswa sembari menangani insiden dan memberikan intervensi yang memadai kepada korban.

Tugas ini telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 untuk memastikan perlindungan anak dari kekerasan.

Ini kemudian disempurnakan dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak-anak juga memiliki martabat kemanusiaan di mana pun mereka berada. Ini berarti bahwa anak-anak di sekolah memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan sekolah. Selain itu, anak-anak harus dijamin perlindungan dan kebebasan mereka dari diskriminasi, terutama di masa sekolah.

Pasal 54 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “anak-anak di lingkungan sekolah harus dilindungi dari segala tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, administrator sekolah atau teman sebaya mereka.”

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 menyatakan bahwa guru dan tenaga kependidikan wajib menciptakan lingkungan pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan berdialog. Ini berarti bahwa administrator sekolah harus mencegah penyebab terjadinya kekerasan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Padahal, jika kita perhatikan lebih dekat, perlindungan anak di sekolah terkadang menjadi tugas berat bagi seluruh anggota sekolah, yang membutuhkan intervensi terutama dari pekerja sosial sekolah untuk menjaga kesejahteraan siswa dalam interaksi di sekolah.

Pekerja sosial sekolah sangat penting bagi komunitas sekolah karena mereka dapat memberikan intervensi untuk menangani masalah kehidupan sosial, (misalnya, perselisihan keluarga, masalah kesehatan mental, kurangnya sumber daya dasar (makanan, pakaian, dan tempat tinggal), penyakit fisik, trauma, cacat perkembangan)

(Berg-Weger, 2016). Selain itu, mereka dapat meningkatkan kehidupan interaksi sosial seperti dalam hal masalah teman sebaya, kurangnya keterampilan sosial, atau berbagai bentuk pelecehan atau pengabaian. Sebagian besar masalah ini dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak dan interaksi mereka di lingkungan sekolah. Masalah tersebut dapat memiliki efek yang merugikan terhadap pembelajaran dan prestasi siswa (Clark, 2015).

Dari sudut pandang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada rumusan prinsip “ramah anak” yang harus diperhatikan oleh sekolah untuk menerapkan non-kekerasan, non-diskriminasi, memberikan yang terbaik dalam menjaga hak anak-anak untuk tumbuh dan berkembang, dan prinsip menghargai pendapat mereka.

Ada banyak peran pekerja sosial seperti, mediator, *enabler*, dan pelatih nilai sosial (Werner, 2015). Dalam pengaturan sekolah, peran pekerja sosial dapat lebih spesifik seperti:

- a. Peran Petugas Pengawas Pelajar Bolos yang sering diberlakukan pada sistem sekolah besar, di mana kemungkinan kasus bolos akan lebih besar bila dibandingkan dengan sistem sekolah yang lebih kecil.
- b. Peran Advokat yang dapat memberikan perlindungan dan pertahanan terhadap hak-hak siswa yang melakukan pelanggaran agar dapat memperoleh kembali hak-hak mereka.
- c. Orangtua-guru sebagai penghubung sekolah-rumah.
- d. *Conferee* (konsultasi), yang berperan dalam melakukan pekerjaan sosial berupa pengadaan pertemuan untuk mendiskusikan kasus siswa (konferensi kasus). Pertemuan untuk membahas kasus-kasus yang melibatkan para profesional lain seperti guru, wali kelas, pejabat BP dan pemimpin sekolah, dapat juga melibatkan orang tua.

Pekerja sosial, bertindak sebagai *conferee*, harus dapat memimpin dan mengarahkan pertemuan.

- e. *Mediator* (penengah), di mana kadang-kadang pekerja sosial sekolah menghadapi situasi yang menuntut kenetralan atau ketidakberpihakan. Pekerja sosial diharuskan memediasi hubungan antara kedua pihak yang mengalami perpisahan, keretakan, atau kerusakan, karena perbedaan persepsi atau kepentingan.
- f. *Broker* (perantara), di mana pekerja sosial dapat menghubungkan sumber daya klien yang menyediakan layanan penting.
- g. Konselor (terapis), karena memang peran konselor di sekolah telah banyak dimainkan oleh profesi lain, sehingga pekerja sosial perlu mengetahui batas-batas peran konselor dan mengembangkan peran tertentu. Ada kecenderungan untuk melihat pekerja sosial lebih sebagai terapis konselor. Konselor melakukan konseling, sedangkan terapis melakukan psikoterapi.
- h. Anggota tim, pekerja sosial dan profesional lainnya (psikolog, terapis, guru pendidikan khusus, guru pendidikan jasmani, reguler) dapat membantu menentukan kebutuhan khusus dan kebutuhan khusus anak-anak (peserta didik) yang spesifik.
- i. Konsultan kesehatan mental, di mana pekerja sosial sekolah (dengan pengalaman pelatihan di bidang psikologi dan perilaku sosial individu) dapat bertindak sebagai konsultan untuk hubungan antarmanusia, sebagai bagian dari kurikulum serta aspek gaya mengajar.
- j. Spesialis perilaku, yaitu mereka yang memahami perilaku dan secara sistematis menerapkan prinsip-prinsip perilaku, terutama modifikasi perilaku. Di sekolah, pengetahuan tentang bagaimana mengubah perilaku dapat diterapkan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menyelesaikan masalah penelitian yang terjadi dalam konteks sekolah di Bandung. Data yang dianalisis diperoleh dari hasil penelitian. Data berupa wawancara, catatan lapangan, foto, dokumentasi pribadi, catatan, dan dokumentasi resmi lainnya. Peneliti telah melakukan eksplorasi melalui wawancara dengan guru BK (55 informan) dan (12 informan) personil staf sekolah di SMA umum dan swasta (SMA) di Bandung.

Pendekatan deskriptif kualitatif menjelaskan jenis penelitian kualitatif (Flick, 2014) di mana fakta tentang keadaan, fenomena, variabel dan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian disediakan dalam mengungkap fakta. Informasi yang dikumpulkan disajikan dan diinterpretasikan dengan situasi saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut: (1) Beberapa guru BK menyatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa ada siswa yang menunjukkan perilaku perundungan di sekolah, seperti saling mengejek dan menghina, atau beberapa siswa yang saling memukul. (2) Guru BK hanya melakukan upaya untuk meredakan siswa yang berperilaku perundungan jika ada siswa yang datang ke guru BK melaporkan perundungan yang terjadi. (3) Implementasi bimbingan dan konseling sekolah telah mengarah pada pola BK 17+, meskipun tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. (4) Ada beberapa siswa yang mengaku telah mengalami perundungan (dilecehkan, dikucilkan oleh teman-teman mereka) dan sampai hari ini mereka masih tertekan dan tidak memberi tahu orang lain (tentang masalah mereka sendiri). (5) Ada beberapa guru mata pelajaran yang menyatakan bahwa masih ada komunikasi yang tidak

optimal antara guru BK dengan personil sekolah lainnya, terutama kepada guru mata pelajaran, dalam hal menangani siswa yang menunjukkan perilaku perundungan.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Penelitian Tahun 2018

No	Aspek	Hasil Penelitian	
		YA(%)	TIDAK (%)
1	Pemahaman guru BK tentang konsep perilaku perundungan		
	a. Pemahaman tentang perundungan	67,65	32,35
	b. Bentuk perundungan	75,25	24,75
	c. Faktor penyebab perundungan	79,41	20,59
	d. Dampak perundungan	68,82	31,18
	Rata-rata	72,78	27,22
2	Kerjasama dengan personil lain di sekolah		
	a. Dengan kepala sekolah	75,29	24,71
	b. Dengan guru mata pelajaran	88,35	11,65
	Rata-rata	81,82	18,18
3	Implementasi layanan bimbingan dan konseling		
	a. Orientasi layanan	71,18	28,82
	b. Layanan informasi	88,24	11,76
	c. Layanan distribusi	70,59	29,41
	d. Layanan bimbingan kelompok	55,88	44,12
	Rata-rata	71,47	28,52
	Total rata-rata	75,36	24,64

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, secara umum, guru BK telah berupaya untuk mencegah perilaku perundungan dengan uraian sebagai berikut: pada aspek pemahaman guru BK tentang perilaku perundungan dari 55 informan (72,78%), guru BK telah memiliki pemahaman tentang konsep perilaku perundungan. Pemahaman yang paling dominan dari guru BK adalah pemahaman tentang penyebab perundungan. Kemudian pada aspek implementasi layanan bimbingan

dan konseling yang disediakan dari 55 informan (81,82%), guru BK telah memberikan layanan BK dalam upaya mencegah perilaku perundungan. Layanan BK yang paling dominan adalah layanan orientasi. Selanjutnya, pada aspek kerjasama dengan personil sekolah lainnya di sekolah dari 55 informan (71,47%), guru BK telah bekerja sama dengan personil lain di sekolah di mana yang paling dominan adalah kerjasama dengan kepala sekolah.

Sekolah bukan hanya dijadikan sebagai lembaga publik untuk mendidik anak bangsa menjadi generasi emas masa depan. Namun sekolah juga dijadikan garda utama dalam rangka pembangunan sosial. Oleh karena itulah tidak boleh ada anak yang dikucilkan atau dikecualikan di dalamnya. Mereka harus mempersiapkan warga negara untuk berpartisipasi dalam karir dengan standar sains dan kurikulum. Namun, sekolah kekurangan staf psikologi dan sosiologi untuk menangani kehidupan sosial siswa yang berdampak pada efek samping dari viktimisasi teman sebaya. Dalam hal ini, pekerja sosial dapat menjadi alternatif untuk memberikan layanan profesional yang berguna untuk membantu siswa yang terpinggirkan, baik untuk kelompok atau pribadi, dan berpartisipasi dalam pendidikan (Hepworth dkk., 2016). Pekerja sosial dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam proses pendidikan. Untuk melakukan ini, mereka harus membangun kemitraan dengan guru, orang tua, dan siswa untuk menangani situasi yang kompleks, terutama untuk sekolah yang dihadapkan dengan peristiwa perundungan yang sering terjadi. Karena pendidikan tidak hanya memberikan kegiatan belajar tetapi juga untuk menyediakan interaksi sosial yang sehat, maka, pekerja sosial sekolah memiliki peran yang lebih penting untuk membantu siswa mengatasi interaksi antarteman sebaya (Hepworth dkk., 2016). Hal ini didukung oleh

pernyataan dari seorang guru BK (Ap) yang menyatakan bahwa:

“Saat ini, pekerja sosial sekolah telah dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak untuk sekolah kita. Mereka dapat mengisi bagian yang paling rentan dari proses pendidikan, dan peran mereka menjadi rumit ketika siswa (KI) memasuki tingkat pertama”2018.

Selain itu, guru lain juga menganggap bahwa pekerja sosial sekolah dapat terbentuk melalui kerja tim interaktif untuk membantu guru. Mereka menyatakan:

“ketika pekerja sosial sekolah berpartisipasi dalam kegiatan sekolah kami, mereka adalah teman kami, dan mereka dapat bekerja dengan guru, keluarga, dan anak-anak untuk mengatasi perilaku berisiko seperti perundungan atau situasi berisiko yang dapat membahayakan hak individu. Mereka menjadi bagian dari upaya bersama untuk membuat sekolah lebih aman. Dalam menjaga martabat dan rasa hormat dari orang-orang, sekolah harus menjadi sebuah komunitas dan memiliki rasa hormat.”

Pekerja sosial sekolah dapat membantu dalam mencegah perundungan di sekolah karena mereka dapat membantu dalam mengimplementasikan anti-perundungan, membantu para korban, intimidasi, dan individu yang hadir dalam insiden intimidasi. Hal ini dilakukan dengan menyediakan layanan konseling dan mengajarkan kepada siswa beberapa keterampilan yang berkaitan dengan konteks interaksi sosial. Hal ini diakui oleh (Hk) sebagai administrator sekolah yang menjelaskan bahwa

“Ada alasan konkret bahwa perundungan di sekolah dapat ditangani di sekolah kami, karena kami memiliki intervensi untuk mengurangi perilaku perundungan dengan melibatkan pekerja sosial kami untuk turut

serta dan membangun kesehatan sosial dan emosional yang sehat dari para siswa dan membantu mereka belajar tentang interaksi teman sebaya yang sehat.”

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya seperti Evans dkk., (2014), bahwa iklim sekolah dan intervensi pekerja sosial memiliki kaitan langsung dengan pencegahan perundungan. Ada banyak aspek lingkungan sekolah yang harus dipertimbangkan, seperti budaya sekolah tentang interaksi staf-siswa, keterlibatan orang tua, dan persepsi siswa.

Demikian pula, seorang pekerja sosial yang peneliti wawancarai di waktu kelas berkata bahwa mereka diterima di lingkungan sekolah karena mereka telah mempersiapkan dan menganggap bahwa penampilan publik pekerja sosial sekolah itu penting. Mereka harus menjaga citra positif dan interaksi dengan anggota sekolah. Mereka dapat mengundang dan membangun interaksi yang lebih sering dengan guru dan siswa untuk mendapatkan respons positif dari anggota sekolah.

Implementasi peraturan pemerintah di lingkungan sekolah oleh pekerja sosial sekolah

Sistem sekolah, khususnya sekolah internal, memiliki berbagai peran untuk mempersiapkan pendidik profesional dan elemen kepemimpinan di sekolah. Karena pendidik manusia potensial memegang peran strategis, mereka harus mengatasi masalah perundungan. Tentu saja mereka sangat penting dalam perlindungan anak yang tertanam dalam orientasi sekolah dan manajemen sekolah. Hal ini didukung oleh pernyataan dari seorang guru BK (JM) yang menyatakan bahwa:

“ Peraturan Sekolah merupakan peraturan yang telah disepakati dan berlaku bagi semua di sekolah serta harus ditaati oleh setiap guru dan siswa di Sekolah karena

peraturan merupakan pedoman bagi siswa dalam berbicara, bertindak, bertingkah laku dan melaksanakan aktivitas sehari-hari di Sekolah dalam menciptakan iklim dan budaya Sekolah yang dapat mencegah terjadinya perundungan. Posisi Pekerja Sosial di Sekolah memberikan dukungan penuh dalam merencanakan kebijakan peraturan-peraturan sekolah di lakukan satu kali dalam setahun tepatnya sebelum acara kenaikan kelas diadakan dengan melibatkan semua perangkat-perangkat yang terkait dengan Sekolah.

Pernyataan diatas dapat dipertegas posisi pekerja sosial sekolah memiliki peran utama dalam menjaga nilai sekolah, terutama di lingkungan sekolah yang mirip dengan Prinsip Pekerja Sosial. Ada sekolah yang dimodifikasi yang mengakui interaksi manusia dan nilai sosialnya yang dapat diterapkan di sekolah di Indonesia (Espelage, 2014) seperti:

1. Setiap murid dinilai sebagai individu, terlepas dari karakteristik unik mereka.
2. Mereka memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan realisasi diri
3. Setiap siswa harus diizinkan untuk berbagi proses pembelajaran.
4. Menghormati individu dan potensi untuk mendukung aspirasi individu untuk mencapainya. 3. Perbedaan individu (seperti perbedaan dalam tingkat pembelajaran) harus diakui; Intervensi harus ditujukan untuk mendukung tujuan pendidikan siswa.
5. Hak setiap individu untuk berbeda satu sama lain, harus dihormati
6. Setiap anak, terlepas dari ras dan karakteristik sosial ekonomi, memiliki hak untuk perlakuan yang sama di sekolah.

Peran mediasi pekerja sosial sekolah dalam pencegahan perundungan

Pernyataan dari seorang guru BK (Dh) yang menyatakan bahwa: *perilaku perundungan di*

sekolah merupakan masalah kompleks, yang mana anak-anak tidak pernah ingin diganggu, terutama dari teman-teman sebaya. Perilaku perundungan juga diajarkan tidak secara langsung kepada anak-anak, terutama dari guru yang kesal dengan pengalaman masa lalu dan trauma yang dialami anak-anak. Pernyataan di atas dapat dipertegas bahwa ada berbagai faktor yang memengaruhi seorang anak mengalami perundungan. Faktor-faktor ini termasuk faktor biologis dan temperamen, keluarga, teman, dan lingkungan sekolah. Penelitian Halpern dkk. (2015) menunjukkan bahwa kombinasi individu, sosial, dan lingkungan dapat memiliki bahaya dan perlindungan yang saling berpengaruh dalam menentukan etiologi perilaku perundungan.

Perundungan adalah masalah di lingkungan sekolah yang harus dipahami oleh pekerja sosial sekolah. Mereka sering dipanggil untuk menanggapi, karena adanya dampak perundungan yang signifikan terhadap kesehatan mental siswa. Keterlibatan siswa dalam pengalaman perundungan, baik sebagai target, agresor, atau saksi, dapat meningkatkan keyakinan mereka, dan sikap yang memerlukan intervensi kehidupan sosial yang memengaruhi kompetensi sosial, perilaku, dan status pendidikan mereka. Siswa yang terlibat dalam perundungan cenderung memiliki tingkat ide bunuh diri yang lebih tinggi dan perilaku berisiko dan mungkin lebih rentan terhadap gangguan kejiwaan daripada anak-anak yang tidak terlibat dalam perundungan.

Penindasan adalah suatu bentuk perilaku kekerasan dalam hal imposisi psikologis atau fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang lain. Sementara itu, perundungan di sekolah adalah perlakuan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh siswa di sekolah. Pelaku perundungan

sekolah pada umumnya adalah teman sebaya, siswa yang lebih tua, atau bahkan seorang guru. Perundungan di sekolah memberikan banyak kerugian bagi siswa yang menjadi korban, seperti menurunnya rasa percaya diri, tekanan psikologis, dan sebagainya. Karena itu, perundungan di sekolah adalah masalah mendasar yang harus segera diatasi.

Peran pekerja sosial untuk menangani masalah terkait pendidikan

Pernyataan dari seorang guru BK (Hk) yang menyatakan bahwa: *“Peran pekerja sosial dapat menangani persoalan seperti kedisiplinan mengingat pentingnya kedisiplinan baik guru maupun siswa di sekolah dengan mematuhi peraturan yang ada, pekerja sosial telah melakukan penjelasan dan sosialisasi dampak dari perundungan”*

Pernyataan di atas dipertegas bahwa perundungan memiliki dampak negatif pada perkembangan karakter anak-anak (Yeager dkk., 2015), pekerja sosial sekolah harus menangani korban dan pelaku. Kegagalan untuk mengatasi perundungan akan menghasilkan agresi lebih lanjut. Perundungan yang dialami oleh korban dapat menimbulkan perasaan tertekan dan menyebabkan efek negatif, seperti, korban menderita sakit fisik dan psikologis (Juvonen & Graham, 2014), penurunan harga diri (Tsaousis, 2016), rasa malu (Mazzone dkk., 2016), trauma, tidak mampu melawan (Evans dkk., 2014), merasa sendirian (Rönkä dkk., 2014), ketakutan, dan fobia sekolah (Kahn dkk., 2014). Penelitian lain yang mendukung hal ini, yakni Chadwick (2014) menambahkan bahwa perundungan juga berdampak pada keputusan lain seperti keluar dari sekolah, ketakutan sosial, dan bunuh diri.

Anak-anak dilindungi di lingkungan sekolah agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan sekolah. Ini telah disempurnakan

dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Peraturan tersebut telah menjamin perlindungan dan kebebasan dari diskriminasi, terutama di masa sekolah. Hal serupa dari pernyataan seorang guru BK (TJ) bahwa: *“dalam menangani persoalan perundungan pekerja sosial memberikan masukan dalam memperbaiki peraturan-peraturan di Sekolah yang sudah diterapkan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.*

Pernyataan di atas dapat dipertegas bahwa: pekerja sosial sekolah memiliki peran utama seperti

1. Penyuluh bagi pendidik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.
2. Konsultan nilai sosial untuk individu, kelompok, organisasi dan masyarakat.
3. Pemodelan pola dan praktik karakter utama melalui peran langsung dan tidak langsung untuk memberikan informasi dan sumber daya yang dibutuhkan oleh siswa. Untuk layanan tidak langsung, pekerja sosial dapat melakukan pencarian atau pengembangan sumber baru yang dapat digunakan untuk menghubungi lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan siswa lain. Untuk layanan langsung ke individu dan kelompok dalam pendidikan, pekerja sosial dapat melakukan konseling, diagnosis dan pengobatan kasus.

Advokasi untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara siswa dan guru, atau siswa dengan kepala sekolah.

4. Konselor kesinambungan dan perubahan.

Karena pekerja sosial sekolah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa siswa hadir secara mental, fisik, dan emosional di lingkungan sekolah, peran mereka penting untuk meningkatkan pembelajaran nilai sosial melalui praktik dan pemodelan (Hepworth dkk., 2016).

KESIMPULAN

Pekerja sosial sekolah memberikan peran penting dalam sistem pendidikan, terutama dalam mengatasi masalah sosial, emosional, perilaku dan kesehatan mental di antara siswa dan anggota sekolah lainnya. Peran mereka telah diatur dalam undang-undang pemerintah tentang perlindungan anak di lingkungan sekolah.

Sekolah seharusnya memberikan fasilitas untuk semua anak tanpa terkecuali terutama mengenai edukasi anti kekerasan dan perundungan. Hal ini lah yang dapat ditanamkan oleh setiap sekolah yang ada di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai visi dan misi dalam memberikan pelayanan pendidikan yang humanis bagi seluruh siswa nya tanpa ada yang merasa terdiskriminasi.

Perhatian penuh sekolah dapat dititikberatkan pada peningkatan pelayanan sosial bagi siswa yaitu dengan menyediakan tenaga kerja atau pendidik yang terampil serta paham akan kebutuhan siswa agar dapat mengaktualisasikan diri mereka sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosial nya di lingkungan sosial sekolah juga di lingkungan sosial masyarakat. Peran pekerja sosial di sekolah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian visi dan misi sekolah untuk memberikan pelayanan sosial terutama dalam mencegah perilaku-perilaku menyimpang siswa yang melakukan perundungan terhadap sesama teman nya.

Advokasi sosial dapat dikembangkan sekolah untuk membantu mengedukasi orang tua, guru, administrator sekolah, dewan pendidikan dan komunitas yang lebih besar tentang pentingnya pembelajaran nilai sosial. Dalam memenuhi tujuan dan standar pendidikan, pekerja sosial dapat memberikan pelatihan dan konseling tentang layanan advokasi untuk anggota sekolah.

SARAN

Kepada pihak sekolah dapat melakukan edukasi dan sosialisasi serta menjalankan fungsi sekolah dengan menerapkan peraturan-peraturan sekolah kepada siswa mengenai bahaya melakukan perundungan juga memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai dampak yang dirasakan atau ditimbulkan bagi korban perundungan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuatan aturan yang disertai sanksi sebagai bentuk pencegahan terjadinya perundungan di kalangan siswa.

Kepada pekerja sosial sekolah dapat mengurangi penyebab perilaku perundungan melalui keberadaan pekerja sosial di lingkungan sekolah, yang mereka memiliki peran dalam pembelajaran nilai sosial. Pekerja sosial sekolah mempromosikan iklim sekolah yang positif dan memberikan layanan dukungan sosial kepada siswa untuk memaksimalkan sumber daya sekolah dalam interaksi sosial yang sehat.

Kepada Guru dan Siswa hendaknya memberikan tindakan langsung dalam memberikan peraturan-peraturan yang baik karena dengan sikap tauladan guru yang taat akan menjadikan perilaku siswa sesuai dengan harapan-harapan sekolah sehingga terhindari dari perilaku perundungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah hasil penelitian dengan topik perundungan telah tertuang dalam bentuk naskah jurnal, diharapkan akan memberikan makna tersendiri bagi pekerja sosial dalam memainkan peran kolaborasi dengan guru-guru bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah. Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khusus kepada informan/responden guru-guru bimbingan dan konseling di berbagai sekolah negeri dan swasta di kota Bandung yang telah meluangkan waktunya

untuk diwawancarai. Tak lupa juga peneliti memberikan apresiasi kepada kepala sekolah yang memberikan izin kepada guru BK untuk mengikuti agenda proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, K. R., & Bussey, K. (2016). Cyberbystanding in context: a review of the literature on witnesses' responses to cyberbullying. *Children and Youth Services Review*, 65, 183–194.
- Akos, P., & Galassi, J. P. (2004). Middle and high school transitions as viewed by students, parents, and teachers. *Professional School Counseling*, 212–221.
- Berg-Weger, M. (2016). *Social work and social welfare: an invitation*. Routledge.
- Barlińska, J., Szuster, A., & Winiewski, M. (2013). Cyberbullying among adolescent bystanders: role of the communication medium, form of violence, and empathy. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 23(1), 37–51
- Chadwick, S. (2014). *Impacts of cyberbullying, building social and emotional resilience in schools*. Springer Science & Business Media.
- Clark, R. M. (2015). *Family life and school achievement: Why poor black children succeed or fail*. University of Chicago Press.
- Dembo, R., Wareham, J., Schmeidler, J., & Winters, K. C. (2016). Longitudinal effects of a second-order multi-problem factor of sexual risk, marijuana use, and delinquency on future arrest among truant youths. *Journal of Child & Adolescent Substance Abuse*, 25(6), 557–574.
- Espelage, D. L. (2014). Ecological theory: Preventing youth bullying, aggression, and victimization. *Theory Into Practice*, 53(4), 257–264.
- Espelage, D. L., & Swearer, S. M. (2003). Research on school bullying and victimization: What have we learned and where do we go from here?. *School psychology review*, 32(3), 365–384.
- Espelage, D. L., Hong, J. S., Rao, M. A., & Thornberg, R. (2015). Understanding ecological factors associated with bullying across the elementary to middle school transition in the United States. *Violence and victims*, 30(3), 470–487.
- Evans, C. B., Fraser, M. W., & Cotter, K. L. (2014). The effectiveness of school-based bullying prevention programs: A systematic review. *Aggression and Violent Behavior*, 19(5), 532–544.
- Farmer, T. W., Irvin, M. J., Motoca, L. M., Leung, M. C., Hutchins, B. C., Brooks, D. S., & Hall, C. M. (2015). Externalizing and internalizing behavior problems, peer affiliations, and bullying involvement across the transition to middle school. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 23(1), 3–16.
- Fekkes, M., van de Sande, M. C. E., Gravesteyn, J. C., Pannebakker, F. D., Buijs, G. J., Diekstra, R. F. W., & Kocken, P. L. (2016). Effects of the Dutch Skills for Life program on the health behavior, bullying, and suicidal ideation of secondary school students. *Health Education*, 116(1), 2–15.
- Flick, U. (2014). *An introduction to qualitative research*. Sage.
- Gould, N., & Taylor, I. (2017). *Reflective learning for social work: research*,

- theory and practice*. Routledge.
- High, A. C., & Young, R. (2018). Supportive communication from bystanders of cyberbullying: indirect effects and interactions between source and message characteristics. *Journal of Applied Communication Research*, 46(1), 28–51
- Halpern, J., Jutte, D., Colby, J., & Boyce, W. T. (2015). Social dominance, school bullying, and child health: what are our ethical obligations to the very young?. *Pediatrics*, 135(Supplement 2), S24-S30.
- Hepworth, D. H., Rooney, R. H., Rooney, G. D., & Strom-Gottfried, K. (2016). *Empowerment Series: Direct Social Work Practice: Theory and Skills*. Nelson Education.
- Hinduja, S. (2016). 24 Addressing Discrimination to Prevent Bullying. *Bullying Today: Bullet Points and Best Practices*, 24.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2014). *Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying*. Corwin Press.
- Juvonen, J., & Graham, S. (2014). Bullying in schools: The power of bullies and the plight of victims. *Annual review of psychology*, 65, 159-185.
- Kazerooni, F., Hardman Taylor, S., Bazarova, N. N., & Whitlock, J. (2018). Cyberbullying bystander intervention: the number of offenders and retweeting predict likelihood of helping a cyberbullying victim. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 23(3)
- Kahn, J. H., Nursten, J. P., & Carroll, H. C. (2014). Unwillingly to school: School phobia or school refusal: A psychosocial problem. Elsevier.
- Kaufman, J. (2013). An evaluation of a middle school bully prevention program. Saint Mary's College of California.
- Larkin, H., Felitti, V. J., & Anda, R. F. (2014). Social work and adverse childhood experiences research: Implications for practice and health policy. *Social work in public health*, 29(1), 1-16.
- Lee, J. A., & Hudson, R. E. (2017). Empowerment Approach to Social Work Treatment. *Social work treatment: Interlocking theoretical approaches*, 142.
- Litwiller, B. J., & Brausch, A. M. (2013). Cyber bullying and physical bullying in adolescent suicide: the role of violent behavior and substance use. *Journal of youth and adolescence*, 42(5), 675-684.
- Macháčková, H., & Pfetsch, J. (2016). Bystanders' responses to offline bullying and cyberbullying: the role of empathy and normative beliefs about aggression. [article]. *Scandinavian Journal of Psychology*, 57(2), 169–176
- Mazzone, A., Camodeca, M., & Salmivalli, C. (2016). Stability and Change of Outsider Behavior in School Bullying The Role of Shame and Guilt in a Longitudinal Perspective. *The Journal of Early Adolescence*, 0272431616659560.
- Nocentini, A., Menesini, E., & Salmivalli, C. (2013). Level and change of bullying behavior during high school: A multilevel growth curve analysis. *Journal of adolescence*, 36(3), 495-505.

- Paludi, M. A. (2015). Sexual Harassment of Teenage Girls: Implications for Reporting Gendered Violence as Adults. *Sexual Harassment in Education and Work Settings: Current Research and Best Practices for Prevention: Current Research and Best Practices for Prevention*, 187.
- Payne, M. (2015). *Modern social work theory*. Oxford University Press.
- Rönkä, A. R., Rautio, A., Koiranen, M., Sunnari, V., & Taanila, A. (2014). Experience of loneliness among adolescent girls and boys: Northern Finland Birth Cohort 1986 study. *Journal of youth studies*, 17(2), 183-203.
- Shearer, A., Hunt, M., Chowdhury, M., & Nicol, L. (2016). Effects of a brief mindfulness meditation intervention on student stress and heart rate variability. *International Journal of Stress Management*, 23(2), 232.
- Smith, P. K. (2014). *Understanding school bullying: Its nature and prevention strategies*. Sage.
- Spring, J. (2016). *Deculturalization and the struggle for equality: A brief history of the education of dominated cultures in the United States*. Routledge.
- Tsaousis, I. (2016). The relationship of self-esteem to bullying perpetration and peer victimization among schoolchildren and adolescents: A meta-analytic review. *Aggression and Violent Behavior*, 31, 186-199.
- Veenstra, R., Lindenberg, S., Huitsing, G., Sainio, M., & Salmivalli, C. (2014). The role of teachers in bullying: The relation between antibullying attitudes, efficacy, and efforts to reduce bullying. *Journal of Educational Psychology*, 106(4), 1135.
- Werner, D. (2015). Are school social workers prepared for a major school crisis? Indicators of individual and school environment preparedness. *Children & Schools*, 37(1), 28-35.
- Yeager, D. S., Fong, C. J., Lee, H. Y., & Espelage, D. L. (2015). Declines in efficacy of anti-bullying programs among older adolescents: Theory and a three-level meta-analysis. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 37, 36-51.

ANALISIS SWOT PEMBERDAYAAN SUKU BONAI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI ROKAN HULU

SWOT ANALYSIS ON EMPOWERING SUKU BONAI IN IMPROVING WELFARE IN OF ROKAN HULU

Mayliza dan Adianto

Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau Jalan H.R. Soebrantas KM 12,5 Simpang Baru Kampus Bina Widya
Panam Pekanbaru, Riau
Email: maylizaadmpublik@gmail.com

Diterima: 11 Juli 2019; Direvisi: 17 Oktober 2019; Disetujui: 29 Nopember 2019

Abstrak

Suku Bonai adalah masyarakat pedalaman di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang juga disebut sebagai komunitas adat terpencil (KAT) oleh Kementerian Sosial. Suku Bonai merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang juga membutuhkan dan diharapkan merasakan pembangunan dalam berbagai sektor, salah satunya pembangunan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat Suku Bonai di Kabupaten Rokan Hulu sangat membutuhkan pemberdayaan dan pembinaan. Seperti masyarakat pada umumnya, komunitas adat terpencil suku bonai membutuhkan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pakaian dan tempat tinggal. Karena pola pikir mereka yang masih tertutup, tentunya membutuhkan keterbukaan akses dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat Suku Bonai untuk bisa berkembang dan berinteraksi dengan masyarakat luar. Oleh karenanya perlu dilakukan analisis swot yang merupakan sebuah alat yang digunakan untuk meneliti kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya pemberdayaan Suku Bonai untuk meningkatkan kesejahaterannya. Penelitian ini dirancang dengan jenis kualitatif dan pendekatan studi kasus. Informan penelitian ini adalah pihak pemberdaya yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dan pihak yang diberdayakan yaitu Suku Bonai. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, kemudian setelah data terkumpul peneliti menggunakan analisis AFAS dan EFAS dalam Analisis SWOT. Penelitian ini ingin menemukan strategi SO dimana kekuatan dan peluang kuat dan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Situasi ini sangat menguntungkan, karena kekuatan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk peluang yang ada.

Kata Kunci: analisis swot, pemberdayaan KAT dan kesejahteraan.

Abstract

Bonai community is an inland society in the Bonai Darussalam District of Rokan Hulu Regency which is also referred to as a Komunitas Adat Terpencil (KAT) by the Ministry of Social Affairs. Bonai community is part of the people of Rokan Hulu Regency who also need and experience development in various sectors, one of which is community development in efforts to improve economic welfare. Bonai community in Rokan Hulu Regency needs empowerment and guidance. Like the other societies, Bonai community needs basic needs such as clothing, food, clothing and shelter. Because of their mindset is still closed, of course, it requires open access to provide information to the Bonai people to be able to develop and interact with outside communities. Therefore it is necessary to do a swot analysis which is a tool used to scrutinize their strength, weakness, opportunities and challenges owned by Social Service for Women Empowerment and Child Protection, Rokan Hulu Regency to empower Bonai community to improve their welfare. This research was designed with a qualitative type and case study approach. The informants of this research are the empowerment agency, the Social Service for Women Empowerment and Child Protection, Rokan Hulu

Regency and the empowered party, the Bonai community. Data collection was carried out by observation and interview, then after the data was collected researchers used AFAS and EFAS analysis in the SWOT Analysis. This study wants to find a SO strategy where strengths and opportunities are strong and large. The recommended strategy is progressive, meaning that the organization is in prime and stable condition so that it is possible to continue to expand, increase growth and achieve maximum progress. This situation is very beneficial because the power that is owned can be utilized for the opportunities that exist.

Keywords: empowerment, SWOT analysis, welfare

PENDAHULUAN

Masyarakat suku pedalaman di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang digolongkan oleh Kementerian Sosial disebut sebagai komunitas adat terpencil (KAT) adalah Suku Bonai. Suku Bonai ini mayoritas berdomisili di Sungai Sipuyu-puyu yang merupakan aliran dari Sungai Rokan Kiri. Mereka hidup secara berkelompok dan tertutup (homogen), tinggal dengan rumah panggung yang dibuat dari batang pohon kayu dengan daun kelapa kering sebagai atapnya. Salah satu sifat komunitas adat terpencil Suku Bonai adalah sulitnya mereka untuk menerima orang baru sehingga bagi pendatang yang ingin menetap di sana akan memilih mencari tempat lain. Suku Bonai cenderung menggunakan bahasa yang lebih mengarah pada bahasa Mandailing yaitu salah satu bahasa yang dimiliki oleh masyarakat Suku Batak Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Suku Bonai merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang juga membutuhkan dan merasakan pembangunan dalam berbagai sektor, salah satunya pembangunan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Suku Bonai sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Rokan Hulu tentunya tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan program-program pembangunan, terutama dalam masalah memperoleh pelayanan sosial dasar dan pembangunan, perlindungan dari berbagai kondisi baik secara sosial, budaya, ekonomi dan hukum.

Suku Bonai di Kabupaten Rokan Hulu sangat

membutuhkan perhatian sehingga perlu untuk terus dilakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap mereka. Seperti masyarakat pada umumnya, komunitas adat terpencil Suku Bonai membutuhkan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan atau bisa kita sebut pakaian, makanan dan tempat tinggal. Pola pikir mereka yang masih tertutup, tentunya membutuhkan keterbukaan akses dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat Suku Bonai untuk bisa berkembang dan berinteraksi dengan masyarakat luar. Persebaran masyarakat Suku Bonai di Kabupaten Rokan Hulu terdapat di Kecamatan Bonai Darussalam yaitu Desa Bonai, Desa Sontang dan Desa Kasang Padang. Sedangkan sebagian lagi berada di Kecamatan Kepenuhan yaitu Desa Rantau Binuang Sakti. Untuk mengetahui persebaran Suku Bonai di Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Persebaran Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	KAT	KK	Jiwa	Laki-laki	Perempuan
1.	Bonai Darussalam					
	Desa Bonai	Suku Bonai	75	228	120	108
	Desa Sontang	Suku Bonai	65	212	107	105
	Desa Kasang Padang	Suku Bonai	44	124	44	80
	Jumlah		184	564	271	293

2. Kepenuhan					
Desa Rantau Binuang Sakti	Suku Bonai	70	188	97	91
Jumlah Keseluruhan		254	752	368	384

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Bonai Darussalam memiliki jumlah Suku Bonai terbesar yaitu sebanyak 184 KK dan 564 Jiwa yang tersebar pada tiga desa. Suku Bonai sangat memerlukan program-program pemberdayaan, karena KAT ini merupakan suku yang berdomisili di wilayah pedalaman Kabupaten Rokan Hulu dan mayoritas kehidupannya berada pada level miskin. Hal ini disebabkan oleh mata pencarian Suku Bonai yang belum konsisten yaitu berladang, menangkap ikan, berburu dan meramu. Sehingga belum dapat dijadikan sumber pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Mata pencaharian Suku Bonai umumnya adalah berburu, meramu hasil hutan, sedikit berladang dan menangkap ikan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Rokan dan anak-anaknya. Rendahnya akses jalan yang menuju Suku Bonai di Kecamatan Bonai Darussalam menambah buruk transportasi bagi pihak-pihak luar yang ingin masuk untuk melakukan atau melaksanakan program pembangunan dan interaksi sosial. Fakta ini membuat kemiskinan Suku Bonai semakin terpelihara, karena akses yang sangat sulit untuk masuk ke pemukiman KAT tersebut. Sehingga akses terhadap pelayanan publik menjadi terhambat dan rendah. Padahal Suku Bonai juga merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hak untuk dibina kesejahteraan sosialnya dengan pemberdayaan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar hidup secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial sehingga dapat

berperan aktif dalam pembangunan.

Komunitas adat terpencil Suku Bonai yang berada di kabupaten Rokan Hulu perlu diberdayakan karena mereka juga berhak untuk merasakan pembangunan. Berdasarkan buku proyek dan sistem pelayanan proyek pengembangan kesejahteraan masyarakat terasing, pemerintah memandang *indigenous people* (masyarakat adat) sebagai suatu masalah sosial. Suku Bonai pada umumnya memiliki pendidikan yang sangat rendah, karena jarang dari mereka yang mampu menamatkan SD. Sebab dalam kalangan mereka belum ada pemahaman akan pentingnya pendidikan, apalagi kehidupan mereka masih berpindah-pindah (*nomaden*) dan memiliki perekonomian yang masih rendah.

Pemberdayaan Suku Bonai dilakukan dengan berkolaborasi antara Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu. Pemberdayaan KAT menurut Peraturan Menteri Sosial nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 adalah serangkaian kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya. Dimana pemberdayaan KAT merupakan proses pembelajaran sosial dengan menghargai inisiatif dan kreativitas KAT terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi sehingga masyarakat secara mandiri dapat mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mampu memecahkan permasalahannya.

Kolaborasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, memerlukan strategi yang tepat untuk mencapai keberhasilan. Salah satu teknik penyusunan strategi yang tepat dapat dilakukan dengan analisis SWOT. Karena analisis SWOT yang dilakukan akan memberikan gambaran kepada pihak pemberdaya mengenai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Output dari analisis SWOT yang dilakukan membantu pihak pemberdaya dalam menyusun program-program kebijakan bagi Suku Bonai dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil analisis SWOT pemberdayaan Suku Bonai dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?

Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Amanah ini memberikan pemahaman ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup. Mosher (1987) mengatakan hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan.

Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki,

terutama bagi yang berpendapatan rendah. Mengacu pada Todaro dan Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. *Kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. *Ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Realitas ini menggambarkan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan banyak indikator yang secara umumnya dapat dilihat dari kondisi rumah, sumber penerangan, tingkat pendidikan, aset rumah tangga yang dimiliki, tingkat pendapatan, kemudahan akses kesehatan dan akses modal.

Secara etimologis menurut Sulistiyani (2004), pemberdayaan berasal dari kata dasar “*daya*” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “*proses*” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang

dilakukan secara kronologis dan sistematis yang mencerminkan pantahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Makna “*memperoleh*” daya/kekuatan/ kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapat atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Makna kata “*pemberian*” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/kemampuan/ kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan.

Sumodiningrat (2009) mengatakan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantarkan masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani dalam

Winarni, (1998) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan masyarakat adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya, dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan akan tetapi juga pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian. Pada hakekatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Wrihatyono dan Dwidjowijoto (2013) mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat umumnya yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketertinggalan. dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Kemudian Ali Aziz,dkk (2005) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kesumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandirian di dalam mengembangkan kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses partisipasif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama.

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal menurut Hikmat (2001), yaitu:

- a. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi

dan kesadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan

- b. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat.
- c. Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan, Suharto (2010) yaitu:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi, berbagi pengontrolan dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang berpengaruh dalam kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup

untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Dari pengertian para ahli di atas maka dapat disimpulkan pemberdayaan merupakan suatu upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan sehingga masyarakat dapat mencapai keberanian. kemudian pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya.

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti, 2010). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan dalam kondisi yang ada pada saat ini disebut dengan Analisis Situasi dan model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT.

Kotler dan Armstrong (2008) berpendapat bahwa analisis SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan (*strengths*),

kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) suatu perusahaan. Analisis ini diperlukan untuk menentukan beberapa strategi yang ada di perusahaan, salah satunya yang adalah strategi promosi dan penempatan produk. Pearce dan Robinson (2008) mengatakan analisis SWOT adalah bagian dari proses manajemen strategik perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama perusahaan. Kelemahan dan kekuatan utama tersebut dibandingkan dengan peluang dan ancaman eksternal sebagai landasan untuk menghasilkan berbagai alternatif strategi. Kotler (2009), analisis SWOT adalah sebuah cara yang dapat ditempuh oleh suatu perusahaan dalam upaya mengamati lingkungan pemasaran internal maupun eksternal.

Berdasarkan dari pendapat para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis dalam manajemen perusahaan atau dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Analisa ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai faktor masukkan, lalu kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisa SWOT ini semata-mata sebagai suatu analisa yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi dan bukan suatu alat ajaib yang mampu memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang sedang dihadapi.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat analisis deskriptif. pendekatan studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau

beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen, dan berbagai laporan). Kemudian peneliti melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus yang dijadikan bahan penelitiannya. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian tersebut. Analisis deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu set kondisi, sikap serta pandangan terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan menuturkan data sesuai dengan situasi yang sedang terjadi.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yang terdiri dari informan kunci (*key informant*) dan informan pelengkap. Adapun informan yang terpilih atas individu-individu adalah sebagai berikut: 1). Informan kunci (*key informant*) adalah orang yang mengetahui permasalahan dan kasus secara mendalam, yang menjadi informan kunci pada permasalahan ini adalah Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan KAT Kabupaten Rokan Hulu, Pendamping Sosial Suku Bonai, Ketua RT 02 Dusun Salak Suku Bonai dan Suku Bonai. 2). Informan pelengkap merupakan orang yang dianggap mengetahui permasalahan dan kasus penelitian walaupun individu tidak terlibat secara langsung dalam permasalahan dan kasus penelitian tersebut. Informan pelengkap antara lain Camat Bonai Darussalam Periode 2012-2016 dan Kepala Suku Bonai.

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan secara bertahap dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan beberapa informan yang telah dipilih oleh peneliti sebagai narasumber dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data mentah yang telah

di peroleh pada saat obserasi,wawancara dan survei. Untuk mengidentifikasi karakteristik KAT melalui wawancara peneliti dengan beberapa narasumber dan obseravasi di lapangan, selanjutnya data dan informasi yang di peroleh dianalisis secara mendalam dan berkali-kali. Kemudian membaginya menjadi data yang akan diklasifikasikan. Untuk meringkas dan mengevaluasi semua informasi internal (meliputi: kekuatan dan kelemahan), dan informasi eksternal (meliputi: peluang dan ancaman), peneliti menggunakan analisis AFAS dan EFAS. Model matriks faktor strategis eksternal (EFAS) menggunakan ancaman dan peluang, untuk kemudian memberi bobot, rating dan skala pada masing-masing peluang dan ancaman. Sedangkan model matriks faktor strategis internal (IFAS) menggunakan kekuatan dan kelemahan, untuk kemudian diberikan bobot, rating dan skala pada masing-masing kekuatan dan kelemahan. Dengan keterangan dalam hasil analisis SWOT adalah sebagai berikut:

1. **Bobot** (berdasarkan kemungkinan dampak faktor-faktor terhadap posisi strategis organisasi) dengan rentang nilai dari 0.01 sampai dengan 1.0, sebagai berikut:
 - a. 0,01 - 0,25 (tidak penting)
 - b. 0,26- 0,50 (cukup penting)
 - c. 0,51- 0,75 (penting)
 - d. 0,76- 1,00 (sangat penting)
2. **Rating** (berdasarkan respon penilaian kondisi saat ini di dinas sosial terhadap faktor tersebut) dengan rentang nilai dari 1 sampai dengan 5 sebagai berikut:
 - a. 1 – 2 (tidak baik)
 - b. 2 – 3 (cukup baik)
 - c. 3 – 4 (baik)
 - d. 5 – 5 (sangat baik)
3. **Skala** merupakan hasil perkalian antara bobot dan rating pada faktor-faktor internal

dan eksternal dalam tabel IFAS dan EFAS.

Setelah mengumpulkan semua informasi strategis, selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dala model-model perumusan yaitu mengkombinasikan hasil IFAS dan EFAS pada matriks SWOT. Menggunakan empat set kemungkinan strategi, antara lain: strategi S-O (*strengths-opportunities*), strategi W-O (*weaknesses-opportunities*), strategi S-T (*strengths-threats*) dan strategi W-T (*weaknesses-threats*). Akhirnya untuk menentukan strategi melalui penentuan posisi kuadran (ditentukan melalui sumbu X dan sumbu Y) berdasarkan strategi yang sudah dirumuskan dalam matriks SWOT, peneliti menggunakan *Diagram Scatter*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis SWOT merupakan suatu metode penyusunan strategi untuk perusahaan ataupun organisasi yang menganalisis beberapa faktor lingkungan internal dan eksternal. SWOT sendiri terdiri dari singkatan S (*strength*), W (*weakness*), O (*oppornuties*) dan T (*threats*) yang jika diartikan secara berurutan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dimana dalam metode ini harus memperhatikan berbagai faktor seperti faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) guna menyusun perencanaan yang matang pada organisasi,program atau produk yang disiapkan untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Menurut Rangkuti (2010) menjelaskan analisis SWOT yaitu: “Dalam pengelolaan dan pengembangan suatu aktivitas memerlukan suatu perencanaan strategis yaitu suatu pola atau struktur yang saling mendukung dan melengkapi menuju ke arah tujuan yang menyeluruh. Sebagai persiapan perencanaan agar dapat memilih dan menetapkan strategi dan sasaran, sehingga tersusun program-program yang efektif dan

efisien maka diperlukan suatu analisis yang tajam dari para pegiat organisasi. Salah satu analisis yang cukup populer di kalangan pelaku organisasi adalah analisis SWOT.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu menjadi bagian dari setiap implementasi atau pelaksanaan strategi program yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) yang harus melihat faktor internal dan eksternal yang diharapkan dapat mengoptimalkan program pemberdayaan Suku Bonai di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan individu dalam sekelompok orang, dibutuhkan perhatian yang lebih intensif untuk program pemberdayaan Suku Bonai. Proses ini melibatkan penentuan tujuan spesifik dari suatu peraturan perundang-undangan dan kebijakan, sehingga dapat mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung atau tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Pada dimensi lain, kinerja pelaksana kegiatan pemberdayaan sosial terhadap KAT belum menunjukkan perubahan secara signifikan pada kondisi kehidupan dan penghidupan KAT. KAT memang telah menempati rumah layak huni yang diberikan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu akan tetapi kebutuhan dasar lainnya belum terpenuhi secara layak. Dimana masih banyak Suku Bonai yang mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, ekonomi dan berbagai pelayanan sosial lainnya. Fenomena ini menggambarkan bahwa manajemen kegiatan pemberdayaan KAT belum berjalan secara maksimal.

Analisis SWOT juga mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths)

dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats), jadi analisis SWOT membandingkan antara faktor internal kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal kelemahan dan ancaman. Rangkuti (2010) menjelaskan pengertian analisis SWOT dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (S) adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang berjalan dengan baik atau sumber daya yang adapat dikendalikan dan dimanfaatkan.
2. Kelemahan (W) adalah kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi.
3. Peluang (O) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang positif.
4. Ancaman (T) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang negatif.

Untuk mewujudkan strategi pemberdayaan Suku Bonai di Kabupaten Rokan Hulu, yang menjadi faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan adalah:

1. Kekuatan yang terdapat pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:
 - a. Adanya peraturan pemerintah (PP) nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pada pasal 23 mengamanatkan perlunya peraturan presiden yang secara khusus mengatur pemberdayaan KAT di Indonesia, Peraturan Menteri Sosial RI nomor 12 tahun 2015 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 186 tahun 2014 tentang pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil.
 - b. Adanya kerja sama dengan Kementerian Sosial, Dinas se-lingkungan Kabupaten Rokan Hulu, dan Pihak Kecamatan

dan juga instansi terkait untuk penyelenggaraan pemberdayaan KAT. Dengan adanya kerja sama dengan berbagai pihak akan sangat membantu dalam implementasi program pemberdayaan yang sudah direncanakan, pertukaran ide-ide dan gagasan program dan juga pemikiran yang lebih efektif dan berorientasi pada KAT.

- c. Program pemberdayaan KAT merupakan program rutin dari Kementerian Sosial RI setiap tahunnya dengan perencanaan dan pendanaan yang sudah diatur dalam kebijakan pemerintah. Program pemberdayaan KAT oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan pada kategori KAT setelah dilakukan peninjauan awal akan kondisi KAT tersebut. Untuk program pemberdayaan KAT berlangsung selama dari 3 sampai dengan 5 tahun.
- d. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu memiliki potensi untuk membuat sendiri strategi pemberdayaan Suku Bonai. Hal ini dikarenakan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan lebih memahami kebudayaan dan kehidupan sosial KAT seperti kebiasaan KAT, kehidupan mata pencarian, budaya dan juga pantangan Suku Bonai di Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga program yang akan diberikan akan lebih terfokus dan berorientasi pada kebutuhan KAT itu sendiri. Program pemberdayaan KAT akan dapat dikatakan berjalan secara maksimal apabila ada perubahan pada penghidupan dan kehidupan KAT baik secara pendidikan, kesehatan dan juga kebutuhan dasar mereka serta pelayanan sosial yang mereka dapatkan.
- e. Potensi alam yang ada di Kabupaten Rokan Hulu akan mendukung program pemberdayaan KAT dalam membantu peralihan sumber mata pencarian Suku

Bonai, dari kehidupan di dalam hutan dengan berladang dan berburu atau mencari ikan di sungai menjadi petani, wirausaha dan pekerjaan lainnya yang lebih membantu kehidupan mereka. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat membantu memberi peluang kepada KAT dengan memanfaatkan informasi dan teknologi.

2. Kelemahan yang terdapat pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:
 - a. Sumber daya manusia yang kurang memadai terutama pada sub bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT). Hal ini dapat dilihat dari tidak sesuainya penempatan pegawai pada profesi tugas mereka. Tidak adanya lulusan ilmu sosial atau ilmu sosiologi yang lebih berorientasi pada kehidupan sosial masyarakat. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka akan sangat membantu dalam pelaksanaan program pemberdayaan sehingga tidak adanya strategi yang lebih terfokus pada KAT dalam pemberdayaan.
 - b. Anggaran yang masih tersentralisasi dari Kementerian Sosial dan belum dipisahkannya permasalahan program pemberdayaan Suku Bonai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, sehingga sampai saat ini masih menggabungkan dengan anggaran kesejahteraan sosial yang setiap tahunnya diberikan berdasarkan pengajuan dari pihak yang membutuhkan. Padahal dalam program pemberdayaan Suku Bonai ini memerlukan semua dimulai dari kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan sampai dengan pelayanan. Kebutuhan untuk bertahan hidup sehari-hari dan juga fasilitas yang harus disediakan.

- c. Tidak adanya strategi untuk pemberdayaan Suku Bonai dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh dalam menjalankan program dari Kementerian Sosial RI, karena program tersebut hanya berorientasi secara umum untuk seluruh KAT di Indonesia. Seharusnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu memiliki atau membuat strategi sendiri yang lebih berorientasi pada kebudayaan atau kebiasaan Suku Bonai. Sehingga program yang dilakukan akan lebih optimal dan terasa manfaatnya oleh Suku Bonai.
 - d. Pendamping sosial KAT yang kurang dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pendamping sosial dalam implementasi program pemberdayaan sangat mempengaruhi berjalannya program, karena Suku Bonai merupakan sekelompok manusia dengan pendidikan yang sangat rendah dan juga pemikiran yang masih tertutup. Sehingga tanpa adanya pendamping yang berkompeten dan terampil maka akan sulit untuk dapat menjalankan program. Disamping itu pendamping sosial KAT ini juga memiliki tugas sebagai alat sosialisasi dan informasi bagi KAT, sebagai *agent of change* untuk KAT dalam mengikuti program yang ada dan juga sarana pemghubung antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Suku Bonai. Pendamping sosial dari Kementerian Sosial hanya mengawasi pada level kabupaten bukan secara khusus, makanya dibutuhkan pendamping sosial dari dinas atau pihak lainnya bagi masyarakat Suku Bonai.
 - e. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kualifikasi kemampuannya.
- Kesesuaian penempatan pegawai dalam suatu organisasi merupakan suatu hal yang penting karena sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan yang dibuat oleh organisasi. Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, pegawai yang berada pada bidang pemberdayaan KAT adalah lulusan pendidikan agama islam, lulusan olahraga dan lainnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kemampuan mereka dalam melakukan program pemberdayaan KAT, sehingga tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara maksimal.
3. Peluang yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dalam memberdayakan Suku Bonai:
 - a. Kemajuan teknologi sebagai sarana berbagi informasi dalam implementasi program pemberdayaan KAT kepada masyarakat. Tersedianya aplikasi dan juga layanan yang memudahkan para *stakeholders* untuk ikut berkontribusi dalam melakukan program pemberdayaan dan menarik minat para aktor akademisi untuk memberikan ide- ide dan gagasan kreatif untuk keberlangsungan program.
 - b. Kecenderungan untuk lebih memahami lingkungan dan kebudayaan Suku Bonai di Kabupaten Rokan Hulu. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dan dinas yang ada di lingkungan Kabupaten Rokan Hulu akan lebih memahami bagaimana karakteristik atau ciri khas kebudayaan dan kehidupan sosial Suku Bonai. Karena mayoritas Suku Bonai adalah orang Melayu dan pendatang dari daerah sekitar, sehingga program akan lebih berjalan baik dan efisien apabila bisa mengetahui informasi tentang KAT lebih banyak

lagi.

- c. Adanya kelompok kerja (POKJA) PKAT, dengan adanya suatu forum yang membantu dinas dalam menyelenggarakan kebijakan pemberdayaan KAT, yang terdiri dari akademisi, praktisi sosial, pemerhati KAT dan birokrat yang akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan KAT yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan efektif dan efisiensi program.
 - d. Mata pencarian Suku Bonai yang sudah dilakukan secara turun temurun yaitu menangkap ikan disepanjang aliran Sungai Rokan. Hal ini tentu memberi peluang bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu untuk membantu Suku Bonai tentang bagaimana cara mengolah ikan hasil tangkapan agar menjadi penghasilan guna membantu perekonomian masyarakat Suku Bonai. Jadi ikan hasil tangkapan Suku Bonai tidak hanya sekedar untuk dimakan sehari-hari, tetapi bisa diolah untuk menjadi sumber pendapatan masyarakat Suku Bonai.
 - e. Masyarakat Suku Bonai sangat bersemangat dengan adanya program pemberdayaan KAT ini, hal ini tentu saja akan membantu berjalannya program. Karena pihak yang menjadi sasaran program, bisa diajak bekerjasama dalam mensukseskan program pemberdayaan KAT. Dukungan dari semua pihak yang terlibat sangat diperlukan, dari pihak pemberdaya dan yang akan diberdayakan.
4. Ancaman yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dalam memberdayakan Suku Bonai adalah:
- a. Adanya KAT yang tidak terdata atau belum terdata, hal ini tentu juga akan mempengaruhi keberhasilan program. Program akan dikatakan berhasil jika pihak yang diberdayakan merasa terbantu oleh pihak yang memberdayakan, jika ada KAT yang tidak terdata berarti program tidak akan berjalan secara merata sehingga ada komunitas yang masih belum merasakan program pemberdayaan, hal ini juga disebabkan oleh sulitnya akses untuk masuk pada pemukiman dalam melakukan pendataan karena kehidupan mereka yang berpindah-pindah (nomaden). Hal ini tentu juga menjadi tantangan dan ancaman bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dan dinas di lingkungan Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Masih kentalnya kebudayaan Suku Bonai. Kepercayaan terhadap leluhur dan alam membuat mereka sulit untuk menerima hal baru dari luar apalagi jika hal tersebut bertentangan dengan norma dan nilai-nilai leluhur mereka. Seperti ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh kelompok mereka, jika dilanggar akan mendapatkan hukuman seperti dikucilkan dari komunitas. Mereka sangat menyatu dengan alam sehingga merasa alam adalah rumah mereka yang memberi kehidupan dan makan, maka ada rasa takut meninggalkan alam dan berpindah menjadi masyarakat modern. Hal ini juga karena pemikiran mereka yang masih tertutup.
 - c. Kehidupan Suku Bonai yang nomaden (tidak menetap). KAT sangat identik dengan kehidupan mereka yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk terus dapat bertahan hidup, mereka sulit untuk dapat tinggal

menetap. Sehingga hal ini menjadi suatu tantangan bagi pihak pemberdaya untuk membantu mereka dalam mencoba hal baru yang sulit mereka rubah karena sudah menjadi kebudayaan. Membawa mereka menetap pada suatu pemukiman KAT dan masyarakat modern.

- d. Pendidikan Suku Bonai yang sangat rendah. Suku Bonai mengalami kesulitan dalam mengakses dan mendapatkan pendidikan, pendidikan diperoleh secara turun temurun dari orang tua mereka dan akan begitu seterusnya dari generasi ke generasi. Mereka pada umumnya belum tersentuh oleh pendidikan baik karena alasan geografis maupun sosial budaya. Tidak sedikit dari mereka yang mendiami pedalaman hutan, sungai, rawa-rawa sehingga kesulitan akses bagi pihak pemberdaya untuk melaksanakan program pemberdayaan KAT dan

menjangkau mereka untuk dapat dibawa pada pemukiman masyarakat umumnya.

- e. Sulitnya aksesibilitas untuk masuk dalam pemukiman komunitas adat terpencil. Dengan hidup terpencil yang melekat pada Suku Bonai menunjukkan kehidupan mereka dengan sistem adat dan kearifan lokal diakui masih hidup jauh dari standar warga pada umumnya karena letak geografisnya yang sulit dijangkau dan akses terbatas ke dunia luar.

Hasil Analisis SWOT

Tabel skor untuk menentukan isu strategis dari isu-isu yang diidentifikasi untuk faktor internal (IFAS) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dalam memberdayakan komunitas adat terpencil Suku Bonai.

Tabel 2. Analisis SWOT Kekuatan (*strengths*)

No.	Kekuatan (<i>strengths</i>)	Bobot (0,01-1,00)	Rating (1- 5)	Skala (Bobot X Rating)
1.	Adanya peraturan pemerintah (PP) nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan peraturan menteri sosial RI tahun 2015 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 186 tahun 2014 tentang pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil.	0,60	5	3
2.	Adanya kerja sama dengan Kementerian Sosial, Dinas se-lingkungan Kabupaten Rokan Hulu, dan Pihak Kecamatan dan juga instansi terkait untuk penyelenggaraan pemberdayaan Suku Bonai	0,80	4	3,2
3.	Program pemberdayaan KAT merupakan program rutin dari Kementerian Sosial RI setiap tahunnya	0,60	4	2,4
4.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu memiliki potensi untuk membuat sendiri strategi pemberdayaan Suku Bonai	0,70	3	2,1
5.	Potensi alam yang ada di Kabupaten Rokan Hulu akan mendukung program pemberdayaan KAT	0,60	4	2,4
Jumlah		3,3	20	13,1

Sumber: data olahan peneliti 2018

Tabel 3. Analisis SWOT Kelemahan (*weakness*)

No.	Kelemahan (<i>weakness</i>)	Bobot (0,01- 1,00)	Rating (1- 5)	Skala (Bobot X Rating)
1.	Sumber daya manusia yang kurang memadai terutama pada sub bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil	0,80	2	1,6
2.	Anggaran yang masih tersentralisasi dari Kementerian Sosial dan juga tidak dipisahkan untuk masalah program pemberdayaan KAT	0,60	2	1,2
3.	Tidak adanya strategi untuk pemberdayaan komunitas adat terpencil dari dinas sosial	0,70	2	1,4
4.	Pendamping sosial KAT yang kurang dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu.	0,70	2	1,4
5.	Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kualifikasi kemampuannya.	0,70	2	1,4
Jumlah		3,5	10	7

Sumber: data olahan peneliti 2018

Selisih nilai skala kekuatan dan kelemahan = $13,1 - 7 = (6,1)$

Tabel skor untuk menentukan isu strategis dari isu-isu yang diidentifikasi untuk faktor eksternal (EFAS) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dalam memberdayakan komunitas adat terpencil suku bonai.

Tabel 4. Analisis SWOT peluang (*opportunity*)

NO.	Peluang (<i>opportunity</i>)	Bobot (0,01- 1,00)	Rating (1- 5)	Skala (Bobot X Rating)
1.	Kemajuan teknologi sebagai sarana berbagi informasi dan implementasi program pemberdayaan KAT	0,70	4	2,8
2.	Kecenderungan untuk lebih memahami kebudayaan Suku Bonai di Kabupaten Rokan Hulu	0,75	4	3
3.	Adanya kelompok kerja (POKJA) PKAT, dengan adanya suatu forum yang membantu dinas dalam menyelenggarakan kebijakan pemberdayaan KAT	0,40	3	1,2
4.	Mata pencarian masyarakat Suku Bonai sebagai nelayan pencari ikan di sepanjang aliran Sungai Rokan dapat menjadi ekonomi produktif yang menghasilkan	0,40	4	1,6
5.	Masyarakat Suku Bonai sangat antusias dan bersemangat dengan adanya program pemberdayaan KAT	0,60	3	1,8
Jumlah		2,85	18	10,4

Sumber: Data olahan peneliti 2018

Tabel 5. Analisis SWOT Ancaman (*threats*)

NO.	Ancaman (<i>threats</i>)	Bobot (0,01- 1.00)	Rating (1- 5)	Skala (Bobot X Rating)
1.	Adanya komunitas adat terpencil yang tidak terdata atau belum terdata,	0,80	2	1,6
2.	Masih kentalnya kebudayaan Suku Bonai.	0,70	3	2,1
3.	Kehidupan Suku Bonai yang nomaden (tidak menetap).	0,70	2	1,4
4.	Pendidikan Suku Bonai yang sangat rendah	0,60	2	1,2
5.	Sulitnya aksesibilitas untuk masuk dalam pemukiman komunitas adat terpencil	0,60	2	1,2
	Jumlah	3,4	11	7.5

Sumber: Data olahan peneliti 2018

Selisih nilai skala peluang dan ancaman = $10,4 - 7,5 = (2,9)$

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis adalah Matrix SWOT. Matrix SWOT ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik SWOT menampilkan 8 kotak, yaitu 2 kotak sebelah kiri menampilkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), 2 kotak paling atas menampilkan faktor eksternal (peluang dan ancaman), dan 4 kotak lainnya merupakan isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil pertemuan antara faktor eksternal dan faktor internal.

Dimana dalam pengaplikasiannya adalah bagaimana kekuatan (*strength*) mampu mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) yang ada, mengatasi kelemahan (*weakness*) yang mencegah keuntungan dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana kekuatan (*strength*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weakness*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Menurut Setiawan Hari Purnomo dan Zulkie Flimansyah dalam Rangkuti (2010) berdasarkan hasil analisis SWOT terdapat empat alternatif strategi yang tersedia yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT. Matrik SWOT digambarkan sebagai berikut:

Tabel 6. Matrik SWOT

Eksternal Internal	Opportunities (O)	Threats (T)
	Strength (S)	Weakness (W)
	SO Strategies	ST Strategies
	WO Strategies	WT Strategies

Sumber: Rangkuty (2013)

Keterangan Matrik SWOT tersebut sebagai berikut:

1. *SO Strategi*: Ini merupakan situasi yang menguntungkan organisasi memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi ini harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan progresif.
2. *ST Strategi*: Dalam situasi ini organisasi menghadapi ancaman, tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal.

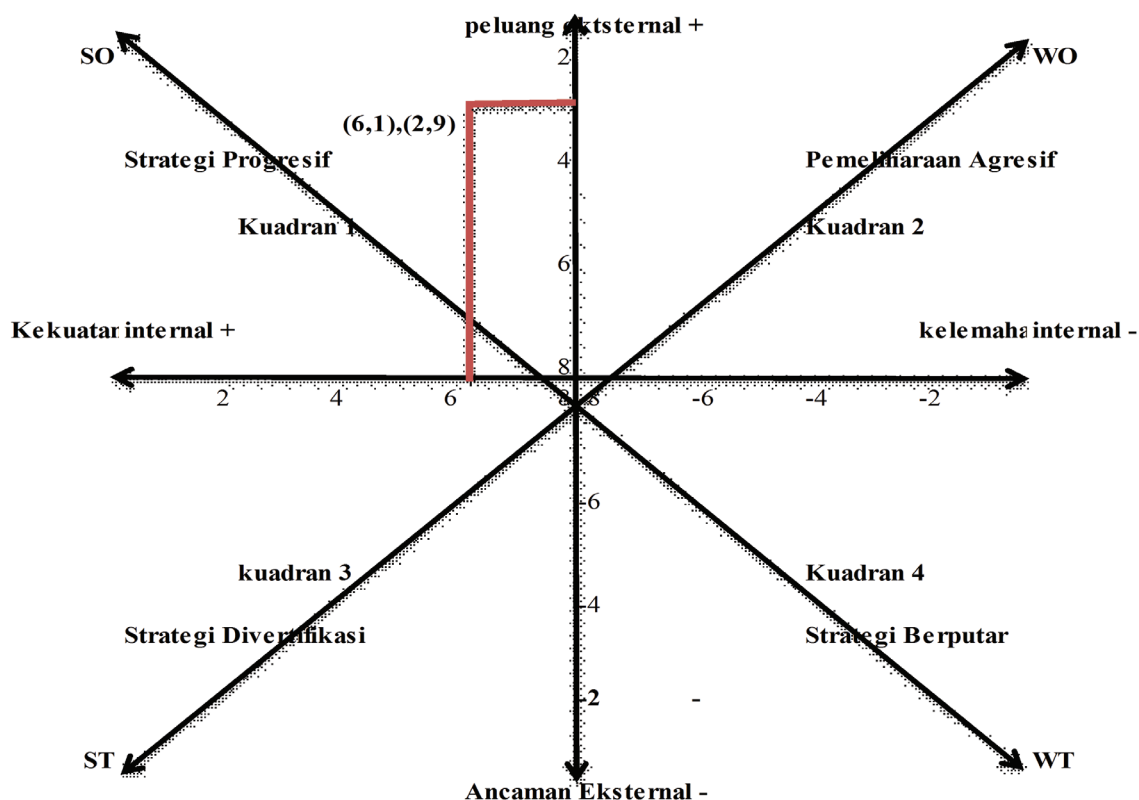
Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (penganekaragaman produk).

3. *WO Strategi*: Dalam situasi ini organisasi menghadapi peluang pasar yang besar, tetapi juga menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Fokus strategi pada situasi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal, sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.
4. *WT Strategi*: Ini merupakan situasi yang tidak menguntungkan, sehingga organisasi harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Analisis faktor internal eksternal untuk program pemberdayaan komunitas adat terpencil suku bonai dengan hasil penilaian analisis SWOT menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Analisis nilai pada kondisi internal pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan nilai skala kekuatan adalah 13,1 dan nilai skala kelemahan 7. Jadi kekuatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih besar 6,1 poin dibandingkan dengan kelemahan.
- b. Analisis nilai pada kondisi eksternal Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan nilai skala peluang adalah 10,4 dan nilai skala ancaman adalah 7,5. Jadi peluang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dalam memberdayakan KAT lebih besar 2,9 poin dibandingkan dengan ancaman. Untuk Analisis SWOT hasil internal dan eksternal dari faktor-faktor diatas adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Hasil Analisis SWOT Kekuatan dan Kelemahan



Dari hasil analisis SWOT diatas dapat dilihat bahwa nilai skala SWOT terletak pada kuadran I yaitu mendukung strategi (Progresif). Progresif adalah suatu perubahan yang terjadi yang sifatnya maju,meningkat,berkelanjutan atau bertahap selama peroid waktu tertentu baik secara kulitatif dan kuantitatif. Konsep dasarnya progresif merupakan segala sesuatu yang sifatnya meningkat ke arah yang lebih baik atau lebih maju. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan lebih besar dari pada kelemahan yang ada, sedangkan peluang yang muncul lebih besar dari pada ancaman yang ada. Strategi progresif artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Situasi ini sangat menguntungkan, karena kekuatan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk peluang yang ada.

Strategi SO merupakan suatu keadaan yang bagus dan baik bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan peluang dilingkungan dinas dalam program pemberdayaan Suku Bonai dan mempunyai beberapa kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Setelah diketahui poin prioritas untuk alternatif strategi yang dipilih, berdasarkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk pemberdayaan Suku Bonai, maka disusun beberapa alternatif Strategi, dengan cara memindahkan hasil dari analisis EFE dan IFE dalam matriks SWOT. Dari proses penggabungan pada matriks SWOT tersebut didapatkan beberapa alternatif strategi penanggulangan kemiskinan KAT dengan: Strategi S-O, Strategi W-O, Strategi S-T, dan Strategi W-T.

Strategi yang dipakai pada kuadran I adalah Strategi SO, dimana menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan

peluang yang ada. Dalam konsep pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) Suku Bonai, setelah melakukan analisis SWOT pada setiap indikator faktor internal dan eksternal dinas sosial maka dapat dirumuskan strategi SO sebagai berikut:

1. Lebih menfokuskan pemberdayaan KAT pada memberdayakan manusia secara perlahan tanpa menghilangkan karakter dan budaya dengan memanfaatkan kinerja semua lembaga, instansi dan organisasi yang terkait dalam program pemberdayaan KAT. Beberapa rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. Melakukan studi lapangan terhadap karakter KAT .
 - b. Pemberian bimbingan sosial dan mental dari pakar psikolog.
 - c. Pembangunan RLH sesuai standar dari KemenPUPR tetapi mengikuti karakter KAT yang ada.
 - d. Pembangunan RLH tidak terlalu jauh dari sungai.
 - e. Penyuluhan bahwa pentingnya hidup sehat dan tata cara hidup sehat.
2. Meningkatkan cakupan layanan sarana dan prasarana dengan kemandirian teknologi yang ada dan juga akses informasi yang mudah tentang KAT agar semua informasi tentang KAT dapat diketahui oleh masyarakat luas dan juga luar negeri. Rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. Pembangunan jalan ke pemukiman KAT.
 - b. Bantuan sarana produksi seperti bibit-bibit tanaman, obat-obatan dan pupuk.
 - c. Bantuan modal usaha dalam menggarap lahan pertanian.
 - d. Perbaruan secara berkala untuk informasi KAT di media lokal dan media sosial.
 - e. Latihan keterampilan mengenai cara bercocok tanam yang baik dan sesuai

dengan kondisi tanah.

- f. Penempatan bidan desa dan perangkannya.
3. Melibatkan peran serta masyarakat dalam program pemberdayaan Suku Bonai sebagai pengawas dalam program pemberdayaan KAT dan juga sebagai bagian dari pihak yang ikut serta dalam membantu pelaksanaan program pemberdayaan Suku Bonai. Rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. Pembentukan forum koordinasi tingkat bawah bersama masyarakat.
 - b. Pembentukan organisasi kelompok tani yang melibatkan KAT dan masyarakat sekitar pemukiman KAT.
 - c. Diberikannya pendamping sosial KAT yang menetap di pemukiman selama masa pembinaan.
4. Program pemberdayaan berorientasi dan berpihak pada karakter dan kebutuhan KAT bukan secara kebutuhan masyarakat pada umumnya, dengan kecenderungan lebih memahami budaya Suku Bonai maka akan membantu dinas dalam membuat strategi yang lebih tepat sasaran, seperti pembangunan rumah layak huni sesuai karakter mereka dan kebutuhan pangan yang cepat menghasilkan. Rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. Bantuan bahan makanan.
 - b. Bantuan peralatan bertani.
 - c. Bantuan peralatan rumah tangga.
 - d. Bantuan pakaian.
 - e. Memanfaatkan aliran sungai sebagai sumber air untuk pertanian, perikanan dan lainnya.
 - f. Menyediakan lahan untuk bertani, berladang dan perikanan.
 - g. Lahan harus potensial untuk bertani dan berladang.
5. Kemudahan sumber air untuk kehidupan

KAT dengan program PAMSIMAS dan air bersih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat KAT akan pentingnya hidup sehat dan bersih dengan adanya program rutin KAT dari Kementerian Sosial. Rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Penyuluhan pentingnya hidup sehat.
- b. Program PAMSIMAS dan penggalian sumur bor.
- c. Adanya tempat pembuangan akhir sampah.
- d. Pembuatan MCK dan parit pembuangan saluran air.
6. Memanfaatkan keberadaan media sosial dan media lokal sebagai wadah untuk sosialisasi dan juga informasi perkembangan KAT secara terus menerus dan transparan sehingga kemudahan akses informasi akan sangat membantu bagi mereka yang berminat dalam bidang penelitian ataupun ekspedisi KAT. Rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. Membuat blog khusus perkembangan KAT dari waktu ke waktu.
 - b. Dibentuknya forum diskusi di tingkat daerah untuk POKJA KAT.
 - c. Mengeksplor sumber daya lokal KAT di dalam dunia usaha.
 - d. Mengajak unsur organisasi, wartawan, dunia usaha sebagai forum koordinasi karena mereka memiliki sumber daya.
7. Dalam membantu mata pencarian, dapat dilakukan dengan membentuk koperasi unit desa (KUD) melalui pengembangan ekonomi produktif berbasis pada sumber daya lokal yang dihasilkan oleh masyarakat KAT. Karena mata pencarian mereka sehari-hari adalah menangkap ikan, hal ini bisa dijadikan ekonomi produktif dengan membuat makanan khas ataupun kerupuk dan makanan lainnya dengan bahan dasar ikan ataupun olahan ikan lainnya.

Rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Membentuk Koperasi Unit Desa untuk KAT.
 - b. Pengembangan ekonomi produktif seperti makanan dari ikan dan ubi-ubian.
 - c. Pemasaran produk hasil rumah tangga di luar lingkungan KAT.
 - d. Program KUBE untuk usaha pertanian dan perikanan.
8. Adanya pelatihan pegawai dinas sosial sebelum program pemberdayaan di laksanakan dengan pemberian pelatihan secara berkala baik SDM maupun fisik dan juga melihat langsung sasaran di lapangan yaitu bagaimana kehidupan Suku Bonai dan juga kontrol langsung untuk implementasi program pemberdayaan KAT secara bertahap selama tahun pemberdayaan. Rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:
- a. Pelatihan untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Pelatihan untuk pendamping sosial KAT.
 - c. Meninjau kembali program yang sedang berjalan.
 - d. Adanya *monitoring* evaluasi untuk program pemberdayaan selama di tahun pemberdayaan.

Keberhasilan seseorang atau sekelompok orang tidak hanya ditentukan oleh modal dalam bentuk fisik seperti bangunan, tanah, kendaraan, dan lainnya tetapi modal manusia seperti pendidikan dan kesehatan yang memadai serta kemampuan membangun jaringan untuk memperkuat hubungan interaksi antar sesama memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu usaha. Modal manusia dalam era globalisasi berhubungan erat dengan tingkat kemampuan dan keterampilan serta sikap manusia dalam mengelola sumber daya

alam di sekitar mereka. Hal ini merupakan suatu aspek yang memerlukan perubahan perilaku masyarakat KAT dalam memenuhi kebutuhan dalam memanfaatkan sumber daya lokal sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki agar mereka dapat menikmati hasil usahanya tanpa merusak lingkungan ekologi di sekitarnya.

Dalam hal pendidikan, masyarakat KAT memiliki pemikiran dan juga memahami bahwa untuk apa pendidikan jika kehidupan mereka seperti keadaan serba kekurangan dan keterbatasan, pendidikan identik dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar dan tidak menjamin akan hidup lebih baik setelahnya. Biaya pendidikan yang semakin mahal dan kemampuan ekonomi yang rendah juga merupakan penyebab menurunnya keinginan masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan formal. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat KAT sangat terkait dengan tingkat kesehatan masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai akan lebih memahami akan pentingnya menjaga kesehatan, demikian sebaliknya masyarakat yang memiliki kesehatan yang baik akan lebih besar peluangnya untuk mengikuti pendidikan dengan baik dibandingkan dengan yang kurang sehat.

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan merupakan salah satu faktor kunci dalam membentuk masyarakat yang berdaya dan mandiri, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Berdaya secara sosial artinya masyarakat memiliki kemampuan mengakses sumber-sumber produktif, terbuka dengan dunia luar sehingga dapat bersaing secara rasional dengan masyarakat yang kapitalis. Berdaya secara ekonomis artinya masyarakat dengan usahanya sendiri yang dilakukannya dapat memberikan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri

dan dapat merencanakan untuk kebutuhan masa depan yang lebih baik. Berdaya secara politik artinya masyarakat memiliki kebebasan dalam proses pengambilan keputusan terhadap sikap yang diambil dalam proses politik, tidak dalam keadaan tertekan.

KESIMPULAN

Perumusan Strategi pemberdayaan Suku Bonai dengan menggunakan Analisis SWOT. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu menggunakan metode IFAS dan EFAS yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu. Menghasilkan strategi SO dimana kekuatan dan peluang kuat dan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi progresif artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Situasi ini sangat menguntungkan, karena kekuatan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk peluang yang ada.

SARAN

Hasil penelitian ini memberikan saran sebagai berikut: *Pertama*, Dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan komunitas adat terpencil yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dirasakan belum maksimal oleh masyarakat suku bonai. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan program pemberdayaan KAT dengan Suku Bonai yang menjadi sasaran dan tujuan program tersebut. Untuk itu, pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pemberdayaan KAT dapat lebih memperhatikan

sasaran dan tujuan program yang sudah ditetapkan sebelumnya dan meninjau kembali pelaksanaan program yang sudah dilakukan. Dinas sosial memiliki peluang yang besar untuk dapat membuat strategi sendiri dalam program pemberdayaan Suku Bonai, karena akan lebih bisa memahami karakteristik suku bonai. Melakukan evaluasi program setiap tahun pembinaan dengan melibatkan pihak suku bonai dan meninjau kembali aspek yang mempengaruhi berjalan dan berhasilnya program pemberdayaan, penyampaian informasi, tahap tahunan pemberdayaan yang tidak efektif dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Sehingga proses pelaksanaan program pemberdayaan dapat mencapai tujuan dan berjalan secara maksimal. *Kedua*, Untuk membuat strategi pemberdayaan Suku Bonai oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu bisa dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang dinas yang ada untuk membuat strategi yang lebih baik sehingga implementasi program dapat dilaksanakan dengan maksimal dan efektif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT yang dapat membantu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dalam melihat, menilai dan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penelitian ini, yaitu Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan KAT Kabupaten Rokan Hulu, Camat Bonai Darussalam Periode 2012-2016, Pendamping Sosial Suku Bonai, Ketua RT 02 Dusun Salak Suku Bonai, Kepala Suku Bonai dan Suku Bonai, yang telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi dan data yang mendukung dalam penyelesaian penelitian

ini. Serta terima kasih kepada pihak Jurnal Konsepsia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengisi salah satu ruang tulisan pada jurnal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. A, dkk. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta. PT. LKiS Pelangi Nusantara.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya.*, Edisi Kedua. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo. (2013). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. PT. Alex Media.
- Hikmat. R. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Humaniora Utama Press (HUP).
- Kotler, P. & Amstrong G. (2008). *Prinsip—Prinsip Pemasaran*. Edisi 12. Jilid 1. Jakarta. Erlangga.
- Kotler, P. (2009). *Manajemen Pemasaran*. Edisi 13. Jakarta. Erlangga.
- Mosher. (1987). *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta. Yasaguna.
- Pearce II, J. A. dan Robinson Jr, R. B. (2008). *Manajemen Strategis-Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, Jakarta. Salemba Empat.
- Rangkuti, F. (2010). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung. Rafika Aditama.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gava Media.
- Sumodiningrat, G. (2009). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. PT. Alex Media.
- Todaro, M. P & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta. Erlangga.

MENDORONG KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS *DEMOCRATIC GOVERNANCE*: PELAJARAN DARI KOTA KUPANG

ENCOURAGING SOCIAL POLICYBASED ON DEMOCRACY GOVERNANCE: LESSONS FROM KUPANG CITY

Laurensius Petrus Sayrani dan Lasarus Jehamat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur
Email: laurensayrani@yahoo.co.id

Abstrak

Artikel ini didasarkan pada perdebatan konseptual dalam menempatkan dan memposisikan negara (pemerintah) dalam berbagai urusan sosial yang kian berkembang baik bentuk dan kedalamnya. Posisi itu berkisar dua hal yaitu peran negara yang dominan ataupun sebaliknya. Debat semacam ini cenderung dikotomis yang pada aras praksis juga masih menimbulkan persoalan. Oleh karena itu, melalui artikel ini, penulis menawarkan gagasan *democratic governance* yang bertumpu pada manajemen kolaborasi. Melalui upaya literatur review dan elaborasi hasil penelitian lapangan penulis, artikel ini diarahkan untuk menunjukkan kemandekan model kebijakan sosial yang cenderung “*state oriented*” sekaligus menunjukkan kemungkinan secara paradigmatis mengenai cara pikir dan cara kerja kebijakan sosial yang lebih efektif dalam konteks Indonesia saat ini. “*State oriented*” memiliki karakter hirarkis yang menempatkan persoalan sosial menjadi sangat institusionalis dimana negara menjadi dominan dalam menentukan apa dan bagaimana masalah sosial dipecahkan. Di saat yang bersamaan, aktor nonnegara juga mengalami pelemahan kapasitas menghasilkan “kebijakan komunitas”. *Democratic governance* sebagaimana yang ditawarkan dalam artikel ini sejatinya adalah gagasan yang mengedepankan kolaborasi antaraktor sebagai basis kebijakan sosial di Indonesia. Model ini bertumpu pada beberapa hal dasar yaitu *resource exchange*, *interdependence*, *trust*, *negosiasi* dan *reciprocity*.

Kata Kunci: *residual institutional model, developmental model of social welfare state, democratic governance model, social policy.*

Abstract

This article is based on a conceptual debate in placing and positioning the state (government) in various social affairs that are increasingly developing in both form and shape. The position revolves around two things, namely the role of the dominant state or vice versa. Such debates tend to be dichotomous which at the practical level also raises problems. Therefore, through this article, the writer offers the idea of democratic governance which is based on collaborative management. Through the literature review effort and the exploration of the results of the author's field research, this article is directed to show the stagnation of social policy models that tend to be “state oriented” while simultaneously showing paradigmatic possibilities about ways of thinking and ways of working social policies more effectively in the current Indonesian context. “State oriented” has a hierarchical character which places social problems into a very institutionalist where the state becomes dominant in determining what and how social problems are solved. At the same time, non-state actors also experienced a weakening of the capacity to produce “community policies”. Democratic governance as offered in this article is actually an idea that promotes collaboration between factors as the basis of social policy in Indonesia. This model relies on several basic things, namely resource exchange, interdependence, trust, negotiation and reciprocity.

Keywords: *residual institutional model, developmental model of social welfare state, democratic governance model, social policy.*

PENDAHULUAN

Berbasiskan latar pikir kajian manajemen dan kebijakan publik penulis, tulisan ini sepenuhnya diarahkan untuk menjawab persoalan konseptual kebijakan sosial di Indonesia yaitu transformasi model *Residual Institutional Dichotomy* menuju ke arah *Deveplomental Model of Social Welfare State*? Sebagaimana disetir dalam kerangka design penelitian “Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia” oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI (2019). Pijakan yang dianut selama ini ialah model *Residual Institutional Dichotomy* yang bertumpu pada peran dominan negara dalam skema *alternative state care*. Peran seperti ini dianggap tidak cukup memadai mengatasi persoalan sosial di Indonesia. Kapasitas sumber daya baik anggaran dan manusia menjadi faktor penting yang menjadi dasar argumentasi perlunya transformasi ke model yang lain yaitu *Deveplomental Model of Social Welfare State* yang justru bertumpu pada *prevention service* di level *family dan community*.

Untuk berkontribusi terhadap problem konseptual ini, maka penulis mengajukan model baru yakni *democratic governance* sebagai strategi transformasi yang seharusnya menjadi fondasi kebijakan sosial di Indonesia. Dalam model ini, negara berperan sebagai regulator dan lembaga di bawah negara sebagai eksekutor. Namun sebelum sampai kepada argumentasi utama tulisan ini, baiknya perlu dilacak dulu beberapa diskusi terkait dengan posisi negara dalam kebijakan sosial selama ini.

Disebutkan, sejak kemerdekaan, pembangunan kesejahteraan di Indonesia cenderung didasarkan pada paradigma residual. Karena itu, kerja Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) pun berbasiskan paradigma ini. Di sana,

LKS berposisi lebih sebagai agen pemadam kebakaran. Baru muncul ketika api sudah ada dan membesar. Dengan demikian, LKS adalah lembaga teknis pasif yang baru dibutuhkan ketika ada masalah.

Yang sering menjadi dilema dalam proses demikian ialah dalam dirinya, beberapa lembaga di bawah Kementerian Sosial berperan ganda, baik sebagai regulator maupun eksekutor.

Dilema seperti ini kadang menimbulkan kegamangan di satu titik dan inefisiensi kerja pada titik yang lain. Akibatnya, banyak masalah sosial yang luput dari perhatian pengambil kebijakan.

Di sudut yang lain, pendekatan developmental berada di spektrum partisipatif. Di sana, penyelesaian masalah sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab LKS tetapi juga masyarakat. Bahkan, dalam batas tertentu, dalam dirinya, masyarakat menjadi bagian utama sebagai agen penyelesai masalah sosial.

Penyelesaian masalah sosial tidak berorientasi kuratif, tetapi preventif. Pencegahan masalah sosial menjadi fokus utama pendekatan ini.

Berbeda dengan pendekatan residual, dalam pendekatan developmental, lembaga di tingkat pusat hanya berperan sebagai regulator. Lembaga di pusat pun hanya menyiapkan piranti monitoring dan evaluasi.

Peran sebagai eksekutor terutama dilakukan oleh otoritas di daerah. Sebab utamanya, selain karena jumlah masalah, otoritas LKS di daerah diyakini justeru lebih memahami peta masalah sosial yang ada. Prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kerja mendapat kepenuhan di sini.

Urgensitas paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial ialah penempatan

masyarakat sebagai subyek pembangunan. Sebab, pembangunan di Indonesia selama beberapa dasawarsa sering menempatkan manusia sebagai obyek.

Di sana, pembangunan kesejahteraan sosial akan lebih responsif dan adaptif. Dengan begitu, beragam masalah sosial bisa dengan mudah diatasi tanpa perlu lagi menunggu perintah dari pusat.

Varian Paradigma

Banyak varian model pembangunan kesejahteraan sosial yang dibuat para ahli. Seperti model, dibuat pula pendekatan pembangunan yang menjadi landasan konseptual bagi para pemangku kepentingan di lapangan dalam bertindak.

Sebagai gambaran, Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006) membuat peta konseptual pembangunan kesejahteraan sosial menjadi empat yakni model universal, institusional, residual, dan model minimal. Pada bagian lain, terdapat dua jenis pendekatan yang dipakai dalam pembangunan kesejahteraan sosial yakni pendekatan residual dan developmental.

Pendekatan residual dicirikan pemberian bantuan sosial diberikan hanya pada saat kebutuhan masyarakat tidak dipenuhi oleh lembaga keluarga, sosial, keagamaan dan pasar; sebagai jarring pengaman; bersifat temporer; ada stigmatisasi dan bersifat kuratif; orang miskin dipandang tidak kompeten, obyek, warga ‘kelas-dua’ dan karena itu menyediakan pelayanan level ‘kelas dua’ (Bessant, Watts, Dalton, dan Smith, 2006).

Di spektrum yang lain, terdapat model pendekatan pendekatan developmental. Pendekatan ini lebih mengutamakan partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan kesejahteraan sosial.

Pada pendekatan developmental, kesejahteraan sosial ditempatkan sebagai garda depan dari masyarakat industri modern. Model kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang demikian tentu sejalan dengan tujuan setiap pembangunan yakni peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sebagai garda terdepan, kesejahteraan sosial dianggap sebagai sesuatu yang normal dan karena itu dapat dipakai sebagai cara memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan sosial dalam konteks ini tidak dapat dibaca secara sederhana. Seolah-olah kesejahteraan sosial adalah sebuah wilayah yang dapat menyerap tenaga kerja.

Cara pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dimaksudkan di sini ialah bahwa dengan pendekatan ini, kebutuhan masyarakat dari subyek kesejahteraan perlu dipenuhi oleh lembaga yang memang difungsikan untuk itu.

Dalam pendekatan ini, terminologi stigma menjadi sesuatu yang tidak perlu diangkat. Usaha preventif atau pencegahan menjadi langkah utama dalam setiap penanganan masalah kesejahteraan sosial. Karena itu, pelayanan sosial ditujukan untuk memelihara standar hidup yang laik dan baik.

Kebijakan Sosial ala *State Care*: Logika Hirarkis Negara

Sejauh ini, sepanjang pengamatan penulis nampak bahwa pelayanan rehabilitasi yang berbasis pada institusi/panti masih menjadi pendekatan dominan dalam kebijakan dan pelayanan kesejahteraan sosial. Terlepas bahwa skema semacam ini berpotensi menghasilkan inefisiensi, inefektifitas dan dugaan penyimpangan, model ini secara konseptual sebetulnya memiliki problem yang perlu dibedah. Kebijakan sosial ala *state care* ini memang menempatkan negara (pemerintah)

menjadi aktor utama dalam kebijakan sosial di Indonesia.

State Care yang menempatkan negara sebagai aktor utama berakar pada gagasan konseptual publik dalam skema institusi pemerintah (institusional model). Publik dan persoalannya adalah defenisi pemerintah yang ditandai dengan kehadiran institusi pemerintah untuk mengurus hal tersebut. Jadi persoalan publik (sosial) kemudian identitik dengan kehadiran lembaga pemerintah. Atau dalam formulasi lain, kehadiran lembaga pemerintah adalah tanda “ ada masalah sosial” begitupun sebaliknya. Dengan demikian, publik dalam konteks ini tidak lebih adalah client semata yaitu orang atau warga yang secara posisi lebih lemah yang membutuhkan negara (bdk, Denhardt dan Dendhardt, 2007). Skema relasinya adalah skema ketergantungan. Ketergantungan itu nampak pada kepasrahan publik sebagai klien dalam konstruksi kebijakan sosial yang dikonstruksi negara. Konsep kesejahteraan misalnya, sebagaimana yang dikatakan Schiler,2008 (Sustiawan, 2009) bahwa perumusan tentang sejahtera adalah dominasi kepentingan penyelenggaraan layanan bantuan sosial dari luas masyarakat yang dilayani, sedang masyarakat sendiri menempati posisi subordinasi dalam merumuskan apakah dirinya sejahtera atau tidak. Oleh karenanya, perilaku sejahtera seperti inilah menjadi solusi sistem kesejahteraan yang dilakukan oleh organisasi formal, termasuk negara.

Kerangka konseptual semacam ini secara fundamental mengandung karakter hirarkis yang kuat antara negara (pemerintah) dengan publik terkait dengan isu kesejahteraan sosial. Suatu isu kesejahteraan sosial akan menjadi agenda kebijakan jika hal tersebut telah didefenisikan negara (pemerintah) yang dalam prakteknya direduksi lebih dalam lagi yaitu kompatibel dengan kelembagaan pemerintah. Dengan

kuasa teknokrasi yang berbasis administratif, isu kesejahteraan sosial dapat dikeluarkan secara institusional dari agenda kebijakan.

Bersamaan dengan itu skema akuntabilitas yang terbangun adalah akuntabilitas yang berbasis pada otoritas birokrasi yang orientasinya internal. Hal itu yang menjelaskan isu kesejahteraan sosial model institusi *state care* cenderung tidak menjadi konsumsi dan perhatian publik yang luas.

Implikasinya adalah penanganan isu kesejahteraan sosial yang nampak pada skema *state care* yang selama ini berkembang justru berkembang menjadi birokratis bahkan teknokrasi pelayanan sosial yang berujung pada inefisiensi, inefektifitas sebagaimana yang sudah disinyalir sebelumnya.

Dalam batasan yang lebih fokus, Susantyo (2008) menyebutkan bahwa dalam kategori perencanaan kebijakan, pembangunan sejatinya mengikuti basis pembangunan masyarakat(*community development*). Model pembangunan yang demikian menempatkan partisipasi pemangku kepentingan sebagai ciri utama. Itulah yang disebut pembangunan partisipatif (Susantyo, 2007).

Democratic Governance: Menakar Daya Kolaborasi

Model *Deveplomental Model of Social Welfare State* yang bertumpu pada *prevention service* di level *family* dan *community* sejatinya memang tidak akan tumbuh secara memadai dalam skema dominasi otoritas negara (pemerintah) dalam kebijakan sosial. Kemandekan terutama disebabkan oleh kapasitas pemerintah sebagai aktor utama mesti didesain ulang dalam skema *colaborative* yang menekankan pada penciptaan struktur kesempatan bagi aktor lain selain negara terutama komunitas.

Gagasan kolaborasi adalah gagasan yang bersandar pada konsep *democratic governance* dalam memecahkan persoalan publik termasuk isu kesejahteraan sosial. Gouth (dalam Tiwibowo dan Subono, 2009) misalnya, mengajukan argumen penting bahwa kebijakan sosial akan lebih efektif melayani pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial dalam sebuah rezim pemerintahan demokratis. Gagasan ini berakar dari paradigma layanan publik yang baru sebagaimana digagas oleh Denhardt dan Denhardt (2007). Bagi Denhardt dan Denhardt, kolaborasi dimungkin atau didorong terjadi dalam skema pemerintahan yang bertumpu tata kelola pemerintahan demokratis yang ditopang oleh menguatnya perilaku kewargaan. Dalam skema ini, persoalan publik hanya akan efektif jika dipecahkan melalui mekanisme kolaborasi (Ansel dan Gash, 2008; Emerson, 2012).

Dalam skema ini, transformasi *Deveplomental Model of Social Welfare State* dalam kebijakan sosial dimungkinkan karena beberapa hal: *Pertama*, basis relasi antar aktor dalam kebijakan sosial yang tidak bersifat hirarkis ala *state care*, namun bertumpu pada *resources exchange*. Selama ini *resources exchange* tidak tumbuh karena memang seluruh potensi “kebijakan komunitas” dalam mencegah, memproteksi dan bahkan berbagi problem sosial di tingkat komunitas dimarginalkan karena tidak kompatibel dengan rezim birokrasi kebijakan kesejahteraan sosial.

Kedua, *resources exchange* juga dimungkinkan karena dalam skema *democratic governance*, dimensi *trust* (kepercayaan) menjadi faktor kunci yang memicu partisipasi komunitas dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Kepercayaan dalam konteks ini tentu berlangsung berbagai aktor terutama sejauhmana kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sebaliknya kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas sosial publik dalam mengembangkan

social care di tingkat komunitas.

Ketiga, itu artinya *degree of depedence* antar pemerintah dengan komunitas adalah *interdependence* sehingga perlu ada reposisi peran pemerintah yang tidak boleh cenderung *dependence* terhadap komunitas karena bertumpu semata-mata pada otoritas birokrasi untuk menjalankan kebijakan kesejahteraan sosial. *Keempat*, diujung semua itu, kultur kebijakan sosial secara fundamental memang harus ditransformasi menjadi *culture reciprocity* bukan subordinasi.

Tabel 1. Perbandingan Model Hirarkis dan *Democratic Governance* dalam Kebijakan Sosial

Aspek	Hierarchies	Democratic Governance
<i>Basis of relationship</i>	<i>Employment relationship</i>	<i>Resource exchange</i>
<i>Degree of dependence</i>	<i>Dependence</i>	<i>Interdependence</i>
<i>Medium of exchange</i>	<i>Authority</i>	<i>Trust</i>
<i>Means of conflict resolution</i>	<i>Rules and command</i>	<i>Diplomacy/ Negosiasi</i>
<i>Culture</i>	<i>Subordination</i>	<i>Reciprocity</i>

Sumber: Diolah dari Kjaer, 2012

Tabel ini menunjukkan bagaimana transformasi orientasi dan strategi kebijakan sosial yang tidak sepenuhnya bertumpu pada mekanisme negara yang cenderung bias menjadi model institusional yang tidak adaptif. Pada batas tertentu, skema hirarkis akan menciptakan situasi “parabolic birocratic” yaitu tercapainya titik optimum birokratisasi kebijakan sosial dan kemudian berubah menjadi kontraproduktif. Dalam perspektif yang lain, dominasi negara dalam kebijakan sosial yang tidak diimbangi kapasitas yang memadai justru menjebak negara dalam situasi yang oleh beberapa ilmuwan seperti Bell, 1975; Corizier, 1975 (Etzioni-Halevy, 2011) sebagai “government overload”. Kesemua ini nampak dalam bentuk inefektifitas,

inefisiensi dan tidak adaptif negara (negara) dalam merespon dinamika isu kesejahteraan sosial yang semakin kompleks.

Bagian berikut ini, berbasiskan kajian penulis di NTT, situasi ketidakmampuan adaptif dari kebijakan sosial pemerintah akan coba ditunjukkan secara ringkas.

METODE

Kajian ini menggunakan metode kualitatif. Data diambil dari kajian lapangan. Data diambil dengan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Informan penelitian ini ialah elemen masyarakat sipil di Kota Kupang. Pemilihan informan dilakukan dengan teknis sampel bertujuan. Dengan demikian, yang dijadikan informan ialah elemen yang memahami kebijakan migrasi, tenaga kerja dan sektor informal di Kota Kupang. Data juga diperoleh melalui kajian literatur. Secara empiris, riset ini dilakukan di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Kasus Nusa Tenggara Timur: Ragam Soal Minus *Democratic Governance*

Isu Migrasi, Tenaga Kerja dan Sektor Informal Perkotaan

Di NTT, migrasi adalah isu krusial yang mungkin tidak banyak disadari oleh banyak orang termasuk oleh pemerintah. Padahal migrasi di wilayah ini adalah kompleksitas sosial dan ekonomi yang terindikasi pada maraknya kasus pekerja migran Indonesia (PMI) hingga munculnya sektor informal perkotaan terutama di Kota Kupang. Namun demikian, kebijakan sosial yang diarahkan ke persoalan ini terasa sangat terbatas.

Untuk isu *human trafficking* misalnya, masalah ini adalah problem krusial yang belum menampakkan titik terang yang memadai. Dalam empat tahun terakhir, buruh migran NTT yang meninggal terus meningkat. Pada

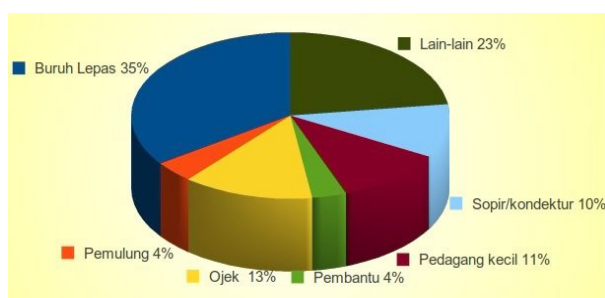
tahun 2015, diketahui ada 28 orang, 46 orang di tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 62 orang di tahun 2017. Pada tahun 2018, hingga bulan desember tercatat ada 101 orang (Media Indonesia, 18 Desember 2018). Di tahun 2019 ini, sejauh ini bahkan sudah ada 13 orang PMI yang pulang dalam rupa jenazah ke NTT (Pos Kupang, 4 Februari 2019).

Sejauh ini pilihan kebijakan pemerintah termasuk pemerintah daerah terhadap permasalahan ini cenderung masih reaktif. Saat ini kebijakan yang hendak diambil pemerintah Propinsi NTT adalah dengan melakukan moratorium TKI ke luar negeri. Meskipun masih banyak polemik tentang kebijakan ini, di sisi yang lain memang pendekatan kolaborasi antar sektor dan aktor dalam berbagai level dan posisi nyaris belum terkonsolidasi secara memadai. Alhasil, persoalan ini terus mencuat nyaris tidak terkendali.

Isu lain terkait migrasi adalah tumbuhnya sektor informal perkotaan. Kota Kupang sebagai ibu kota Propinsi NTT dan pusat kegiatan sosial, ekonomi telah memicu proses migrasi yang tinggi. Percepatan jumlah penduduk saat ini (BPS, 2017) mencapai 2,92 persen (2015-2016) di atas rata-rata pertumbuhan penduduk NTT sebesar 1,63 persen juga dibarengi dengan tingkat pengangguran yang mencapai 14,25 % (Adiningtyas, dkk, 2010, BPS, 2017 dalam Sayrani, 2018a,b). Kajian Pikul (2018) memperjelas bahwa sebagian besar orang yang datang di Kupang berasal dari kabupaten-kabupaten pedesaan di NTT (93,9 persen) dan sisanya datang dari luar NTT. Dengan demikian, karakter populasi berbasis wilayah etnis nampak sangat beragam di kota ini, dimana etnik Timor adalah populasi terbesar yaitu 33,1 persen, Rote 16,7 persen, Sawu 16 persen, Flores sebesar 4,6 persen dan beberapa kelompok etnik lainnya.

Situasi semacam ini kemudian berujung

pada isu kebijakan sosial (ketenagakerjaan) dan ekonomi (pengangguran) di Kota Kupang saat ini untuk memanfaatkan kelimpahan tenaga kerja (termasuk tidak terlatih) sehingga produktif bagi pembangunan Kota Kupang dan tidak sebaliknya (beban pembangunan perkotaan). Sejauh ini, populasi ini tercover dalam skema atau jenis pekerjaan sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Jenis Pekerjaan Kelompok Migran Pada Sektor Informal di Kota Kupang

Sumber: Adiningtyas, Wahyu. Torry Kuswardono, Margareth Heo, dan Ody Messakh (dalam Sayrani, 2018a,b)

Namun demikian, karena minimnya kebijakan sosial bagi populasi migrasi perkotaan, komposisi pekerjaan semacam ini justru dibentuk karena munculnya skema “jaringan sosial” perkotaan terutama berbasis kelompok etnis yang memfasilitasi dan memperluas akses atas berbagai jenis pekerjaan perkotaan.

Kajian Sayrani (2018) terhadap sektor informal menunjukkan setidaknya ada 3 (tiga) aspek utama yang mendorong tumbuhnya sektor ini: a) adanya sebagian warga Kupang yang memiliki daya akses yang terbatas kepada sektor formal. b) namun bersamaan dengan itu, dalam kelompok ini berkembang kemampuan mencoba usaha baru yang menjadi peluang di kota ini (rasionalitas ekonomi). c) selain itu, sektor informal juga tumbuh dalam skema “rasionalitas sosial” dimana sektor ini pada batas tertentu didukung jejaring perkawanan dan dukungan keluarga. Seorang informan yang

yang memiliki usaha jahit keluarga seperti ibu Marlince misalnya mengatakan bahwa usahanya berkembang karena ditopang oleh relasi sosial informal. Ibu Marlince mengatakan demikian: “...*kalau modal awal itu dari usaha menjahit baju keluarga. Dari mulut kemulut dan berkembang sampe sekarang...*”. Itu artinya sektor usaha informal yang berkembang di Kota Kupang nampaknya memiliki fungsi sosial-ekonomis sebagai penyangga ekonomi ketenagakerjaan yang parsial sekaligus berhubungan.

Sektor informal juga berperan sebagai “lokasi ekonomis” terutama bagi segmen tenaga kerja yang karena alasan tertentu tidak tertampung lagi di sektor formal”. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian Sayrani (2018), pekerja di sektor informal di Kota Kupang pada umumnya adalah mereka yang tidak memiliki keterampilan (62 %) dan di saat yang bersamaan akses mereka terhadap program (pelatihan) dari pemerintah juga sangat terbatas yaitu hanya 7,4 %. Sebagian besar yaitu 64,8 % harus belajar secara mandiri dengan cara mencoba-coba, meniru bahkan mengeluarkan biaya sendiri untuk mengikuti pelatihan atau kursus yang sesuai dengan kebutuhannya (3,3 %).

Khususnya tenaga kerja yang sejak awal tidak tertampung di dalam usaha sektor formal, sektor informal juga berperan sebagai penampung yang penting. Kelompok usia kerja yang karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan adalah segmen yang paling merasakan manfaat sektor informal. 45,5 % responden yang diteliti Sayrani (2018) menunjukkan bahwa mereka yang tertampung di sektor ini adalah penduduk yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan atau hanya sebatas bekerja serabutan (21,6%). Kondisi ini sejalan dengan pernyataan ibu Magdalena yang sehari-harinya berjualan kue di seputaran rumahnya. Terkait dengan alasannya mengeluti

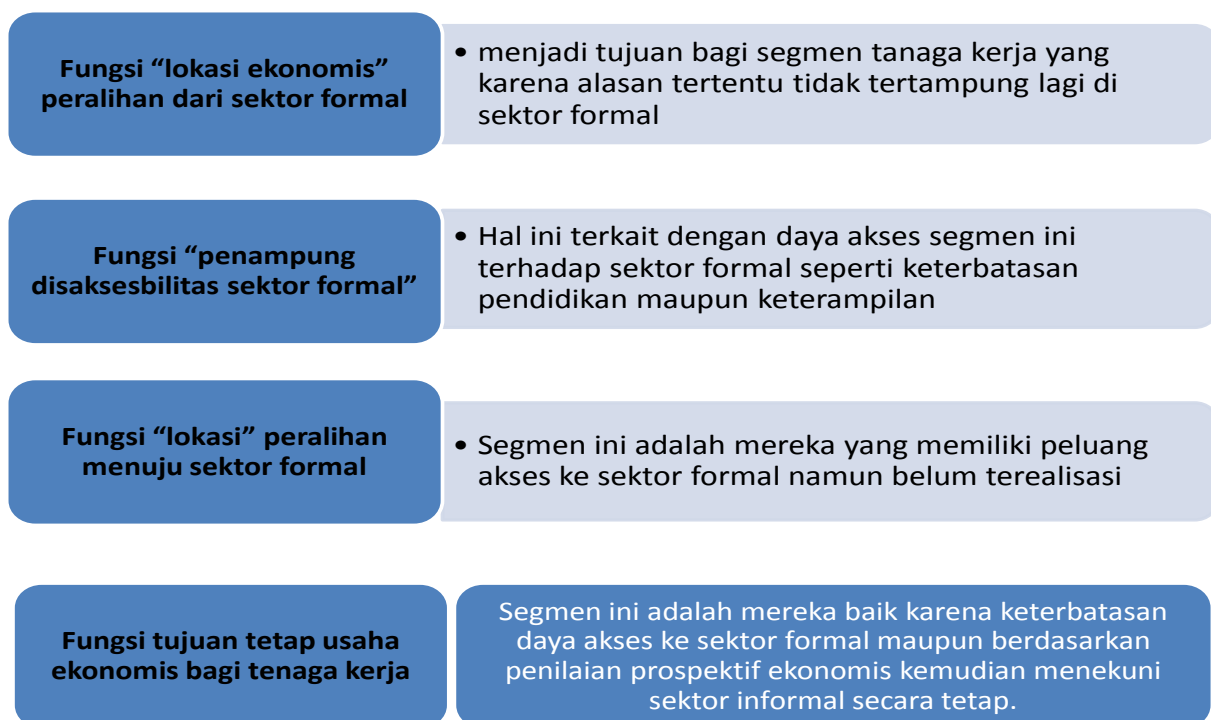
usaha ini, berikut pernyataannya: “...*alasannya karena mama memang tidak memiliki pekerjaan to, mama hanya ibu rumah tangga jadi mama berfikir cara bagaimana mama bisa menambah penghasilan dirumah ini. Jadi mama mau membuat pekerjaan sampingan kan lumayan bisa beli sayur, sabun, dan kebutuhan lain...*”

Pada batas tertentu, bagi mereka yang memiliki peluang ke sektor formal, maka sektor informal berfungsi sebagai “lokasi” peralihan menuju sektor formal. Namun di ujung semua itu, hal penting dari keberadaan sektor informal lainnya adalah justru sektor ini adalah tujuan tetap usaha ekonomis bagi tenaga kerja. 53 % responden yang diteliti Sayrani (2018) bahkan sudah mengeluti secara serius sektor informal lebih dari 4 (empat) tahun. Pada titik ini, sektor informal justru dilihat sebagai usaha yang menjanjikan. Herdinus Banu misalnya, seorang yang sudah sejak tahun 2014 menekuni usaha pangkas rambut di Kota Kupang justru menilai usaha dengan skala informal menjadi sesuatu

yang menjanjikan. Terhadap hal ini, Herdinus menjelaskan “...*karena dulu pernah memulai gunting rambut teman atau sahabat semua, dari situ saya terfikir bahwa, ternyata saya punya ketrampilan untuk memangkas rambut, dari situ saya berfikir bagaimana untuk saya membuka usaha pangkas rambut dengan menggunakan ketrampilan yang saya miliki untuk mendatangkan berkat...*”.

Secara umum, kontribusi sektor informal di Kota Kupang dapat dilihat pada skema Gambar 2.

Berbagai hal ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor informal di perkotaan dengan demikian mesti dilihat sebagai dimensi penting dalam kebijakan sosial wilayah perkotaan. Perannya sebagai penyangga ekonomi perkotaan ketika kapasitas sektor ekonomi formal tidak cukup memadai menampung kelebihan tenaga kerja ataupun *misalokasi* tenaga kerja dalam struktur ekonomi



Gambar 2. Kontribusi Sektor Informal di Kota Kupang

Sumber: Sayrani (2018a,b)

Tabel 2. Pilihan Kebijakan Sektor Informal

No.	Jenis Aset	Potensi	Pilihan Kebijakan
1	Modal Sosial Usaha	Kepercayaan (trust) antar warga/pelaku usaha informal Saling mendukung dalam usaha Usaha “komunal”	◦ Mengurangi program karikatif langsung ke masyarakat sehingga tidak mereduksi modal sosial warga ◦ Mengembangkan program bantuan baik modal, manajemen, skill berbasiskan pada organisasi yang berkarakter “warga dengan modal sosial”.
2	Skill	Meskipun masih terbatas, keterampilan khas usaha kecil yang diperoleh dan ditingkatkan secara otodidak “bakat usaha/bisnis” yang dapat dikembangkan	◦ Mengembangkan sistem “<i>sharing skill</i>” antarwarga namun bukan melalui mekanisme birokratis

Sumber: Sayrani (2018a,b)

dapat dikembangkan dalam kebijakan dengan cara pikir dan kerja berbasiskan pemberdayaan. Jika kerangka pikir ini dipakai, maka pemetaan modal sosial sebagai modal khas sektor informal perlu dipetakan dan alternatif kebijakan penguatannya. Secara umum, pemetaan kebijakannya dapat dilihat pada matriks Tabel 2.

Pilihan kebijakan sosial berbasis pemberdayaan di wilayah perkotaan khususnya terkait dengan pengembangan sektor informal dengan jelas menghendaki adanya kebijakan meminimalkan karikatif. Hal ini penting untuk dipikirkan untuk memastikan sekaligus mendorong modal sosial sebagai basis kehidupan sosial dan ekonomi. Skema relasi peran pemerintah sebagai “pemberi” dan warga sebagai “penerima” mesti didekonstruksi dalam kebijakan sosial agar daya kapasitas warga tidak hilang dalam menyelesaikan persoalan sosial mereka.

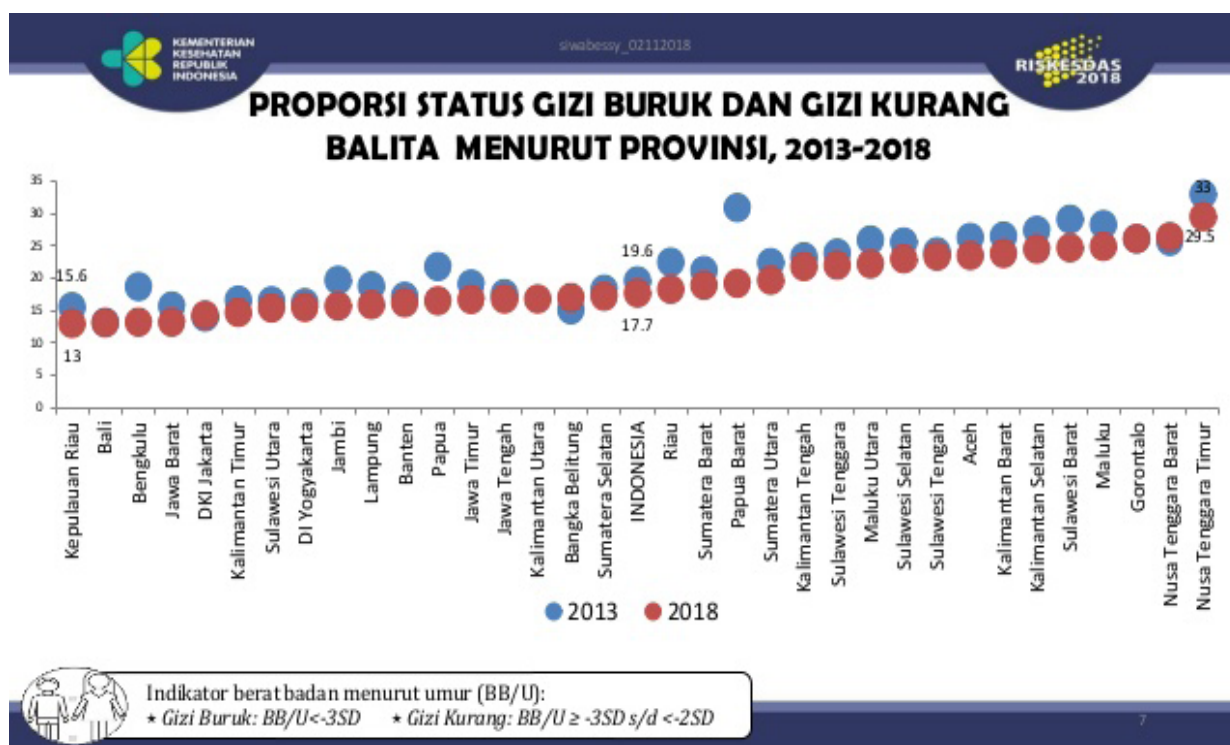
Isu Kesehatan: Stunting, Pangan dan Gizi

Lemahnya *democratic governance* di NTT juga nampak pada mencuatnya kasus stunting di wilayah ini sebagai indikasi tidak memadainya kebijakan sosial terkait penyediaan, proteksi akses bagi sebagian warga NTT terhadap pangan khususnya di pedesaan.

Paling tidak di 5 (lima) tahun terakhir, di NTT stunting menjadi tema pembicaraan penting di banyak kalangan. Di tahun 2013 misalnya, berdasarkan data Riskesdes 2013, ada sekitar 50,7 persen anak NTT yang mengalami stunting. Meskipun di tahun 2018, melalui survey yang sama, angka stunting NTT turun menjadi 42,6 persen, hal ini tetap menjadi kondisi yang memprihatinkan. Persoalan ini semakin serius jika dihubungkan dengan dengan angka kemiskinan NTT yang mencapai 21,35 persen (BPS,2017). Kondisi ini bermakna bahwa anak NTT adalah anak yang dilingkupi banyak persoalan baik itu kesehatan, kemiskinan dan bahkan masa depan mereka.

Oleh karenanya memerangi stunting menjadi pilihan kebijakan yang masuk skala prioritas tinggi. Hal ini karena stunting memiliki implikasi serius pada kesehatan yaitu gagal tumbuh anak, gagal kembang dan gangguan metabolik jangka panjang. Bersamaan dengan itu, dapat dibayangkan bahwa dimana 15 tahun ke depan, anak-anak sekarang akan memasuki usia produktif sehingga berpotensi menghasilkan produktifitas penduduk yang rendah sehingga bonus demografi yang tidak termanfaatkan.

Pada sisi yang lain, percepatan pencegahan



Gambar 3. Hasil Riskesdes 2013-2018

Sumber: Kemenkes, 2018

stunting masih belum memadai dengan strategi yang tepat. Kebijakan pemerintah masih belum diformulasikan dalam skema “care policy” yang mampu menjangkau problem dasar yang memproduksi persoalan stunting di NTT. Persoalan seperti daya akses warga miskin terhadap pangan sebagai implikasi penguasaan lahan (produktif) yang terbatas, produktivitas pertanian yang cenderung rendah tidak disentuh secara komprehensif dalam penanganan isu ini.

Penelitian Sayrani bersama Bengkel APeK (2018) tentang stunting dan pangan di Desa Oelnasi Kabupaten Kupang misalnya menunjukkan bagaimana persoalan dasar dan struktural menyangkut pangan, akses lahan, pola pertanian dan konsumsi belum sepenuhnya menjadi basis pemecahan masalah stunting. Padahal sejatinya persoalan stunting berasal dari persoalan ini.

Di desa ini, sektor pertanian menjadi penyangga utama ekonomi. Namun situasi ini justru ditopang oleh tingkat penguasaan lahan

rerata seluas 0,5-4 ha. Bersamaan dengan itu, dari 562 KK, ternyata sebagian besarnya masih berkategori keluarga sejahtera I yang mencapai 361 keluarga bahkan yang prasejahtera mencapai 181 keluarga. Hanya ada sekitar 20 keluarga yang berkategori keluarga sejahtera 2.

Lebih lanjut penelitian Sayrani ini juga memperlihatkan beberapa hal penting. Makanan pokok warga di desa ini adalah beras ditambah jagung, kacang-kacangan, ubi-ubian dan sayuran termasuk kelor yang cenderung dianggap sebagai pangan sekunder. Seorang warga dalam diskusi terfokus mengatakan demikian: “...Kalau kita sebenarnya padi pak, tetap itu menjadi makanan pokok. Jagung ini betul memang, kita kerja mencari jagung tapi mungkin kita makan jagung 1 minggu 1 kali, ada juga yang 1 hari 1 kali tapi nasi paling banyak...” Namun demikian, beras (padi) justru diproduksi hanya sekitar 20% warga yakni mereka yang memiliki sawah serta ditopang oleh sekitar 40% warga yang menjadi

penggarap sawah. Bagi warga yang memiliki sawah, produksi mereka rata-rata mencapai 40-50 blek yang dapat dilakukan 1-2 kali setahun. Di sisi yang lain, jagung justru diproduksi oleh hampir 90% warga Desa Oelnasi dengan rata-rata jumlah produksi sekali panen mencapai 400-500 puler.

Khusus untuk lahan kering (ladang), lahan hanya dimanfaatkan pada musim tanam, setelah panen akan dibiarkan saja sampai musim tanam berikut. Keterbatasan air (lahan yang kering) menjadi alasan pola pemanfaatan lahan seperti ini. Tidak hanya itu, bahkan untuk kebutuhan air bersih pun masih menjadi persoalan. Terkait hal ini, seorang petani di desa ini, Bapak Adi misalnya mengeluhkan demikian: *“...Karena tidak ada air, tadi waktu lewat ko ada jergen banyak – banyak itu antri air dari jam 5 pagi, kalau tidak dapat berarti besok mereka giliran dapat pertama sedangkan yang tadi itu sudah dari tadi malam tidak dapat begitu – begitu sudah...”*

Pada bulan desember hingga maret, sebagian warga akan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan pokok beras. Tidak hanya itu, jagung juga dianggap sulit untuk dikonsumsi pada bulan-bulan ini. Oleh karena itu, pada musim ini, strategi konsumsi warga akan berubah (penyesuaian) dengan cara mengurangi jumlah cakupan konsumsi maupun jenisnya.

Cara yang lain adalah warga akan melakukan pekerjaan tambahan diluar pekerjaan pokok (sebagai petani) seperti menjadi tukang ojek bagi yang memiliki kendaraan, pukul batu untuk membeli beras, iris tuak dan sebagainya. Selain itu, upaya meminjam beras atau jagung ke tetangga atau keluarga adalah mekanisme lain yang sering dilakukan warga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pinjaman ini akan dikembalikan lagi dalam bentuk dan jumlah yang sama

pada musim panen berikutnya. Sedangkan makanan yang mengandung protein seperti ikan, telur dan daging jarang dikonsumsi secara rutin. Hanya ada sekitar 10-20 persen warga yang mengkonsumsi daging terutama ikan secara rutin. Daging (terutama daging ayam) dikonsumsi terutama pada saat ada tamu saja. Sedangkan daging (sapi dan babi) dikonsumsi terutama pada acara pesta (nikah), natal dan tahun baru. Khusus untuk ikan, ketiadaan pasar yang menjual ikan di desa ini dan mengharapkan penjual ikan keliling dengan harga yang lebih mahal juga menjadi faktor sehingga warga juga jarang mengkonsumsi ikan secara rutin.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian sebagai sektor utama masyarakat pedesaan pada umumnya di NTT belum mampu menjadi penopang tingkat kesejahteraan mereka secara memadai yang memiliki banyak implikasi termasuk isu pangan dan gizi. Pada aras tertentu, upaya mandiri masyarakat melalui strategi bertani, pola konsumsi di tengah keterbatasan sumber daya cukup nampak meski pada cakupan yang mungkin terbatas. Di saat yang sama, kebijakan penanganan stunting berbasis pada intervensi situasi struktural semacam ini belum dilakukan secara memadai. Tanpa perspektif “policy care” yang kuat, persoalan stunting kemudian terjebak menjadi persoalan spesifik kesehatan, peran dan porsi pemerintah yang dominatif melalui skema kebijakan penanganan di pusat-pusat pelayanan kesehatan.

KESIMPULAN

Beberapa isu khas NTT ini semisal PMI dan stunting adalah cerita tentang mandeknya daya kolaborasi antar aktor dalam menyelesaikan persoalan ini. Kungkungan kelembagaan yang kaku mendorong rendahnya daya responsif terhadap isu ini secara komprehensif. Disisi lain, sektor informal justru menjadi mekanisme

sosial yang menjadi “katub pengaman” terhadap kecenderungan migrasi perkotaan yang justru belum direspon secara memadai oleh pilihan kebijakan sosial yang ada.

Berbagai uraian ini bermula pada penjelasan bahwa transformasi model *Residual Institutional Dichotomy* menjadi *Develomental Model of Social Welfare State* memang membutuhkan perubahan struktural posisi dan kapasitas kebijakan pemerintah.

Melalui strategi ini, kebijakan sosial adalah kebijakan yang tereduksi dalam skema konstruksi negara yang institusionalist yang pada gilirannya justru menjebak negara dalam situasi “parabolic birokratik” dan “government overload” yang semakin parah. Tulisan ini menawarkan ide *democratic governance* sebagai strategi transformasi yang relevan.

SARAN

Desain arah baru pembangunan kesejahteraan sosial dapat berhasil jika semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang model dan cora paradigmatic pembangunan kesejahteraan sosial. Skema itu berjalan baik jika dilalui melalui kajian ilmiah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Beragam masalah sosial menuntut perubahan paradigma pembangunan sosial. Memposisikan masyarakat sebagai subyek tidak saja bernilai humanis eksistensial tetapi juga praksis sosial. Efek partisipatif akan jelas terlihat di sana. Bahwa sebagai agen dan entitas subyek, masyarakat menjadi eksekutor penyelesaian masalah sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Bengkel APPEK Kupang, Litbang Kota Kupang, para informan dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian dan

laporan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningtyas, W., Kuswardono, T., Heo, M., & Messakh, O. (2010). *Migran Miskin Tak Ber-Aset di Kota Kupang*. PIKUL.
- Ansel, C. & Alison, G. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol.18, No. 4. Publish by Oxford University Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/25096384>, diunduh 6 April 2018.
- Bessant, J., Watts, R., Tony, D., & Smith, P., (2006). *Talking Policy: How Social Policy is Made*, Crows Nest: Allen and Unwin.
- Denhardt & Denhardt, R. (2007). *The New Public Service. Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe. London
- Emerson, K., Nabatchi, T. & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol.22, No.1. Publish by Oxford University Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/41342607>.
- Helevy, E. T. (2011). *Demokrasi dan Birokrasi: Sebuah Dilema Politik*. Total Media, Yogyakarta.
- Kjaer, A.M.. (2004). *Governance*. Polity Press.
- Pikul, (2018). Kota-kota Kecil, Kabupaten Urban di Indonesia: Garis Depan Tantangan Ketenagakerjaan, Migrasi dan Urbanisasi. *Laporan Riset*. Just Jobs, Pikul, Center Policy Research.
- Sayrani, L.P. (2018a), *Dinamika Sektor Informal di Kota Kupang*. Litbang Kota

Kupang.

- Sayrani, L.P. (2018b). Dinamika Sektor Informal di Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, Vol 3 No 1 (2018). <http://jurnalinovkebijakan.com/index.php/JIK/issue/view/4>
- Sayrani, L.P (2008). Situasi Pangan dan Gizi Daerah Pedesaan: Studi Kasus di Desa Oelnasi, Kabupaten Kupang. Bengkel APPeK
- Susetiawan, (2009). *Pembangunan dan Kesejahteraan Yang Terpasung: Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme*. Working Paper. Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Susantyo, B.(2007). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Pedesaan. *Jurnal Informasi*.(12) 3, 177-198.
- Susantyo, B. (2008). *Community Development dalam Praktik Pekerjaan Sosial*. Bandung: STKS Press.
- Triwibowo, D.& Subono, N.I. (Ed.).(2009). *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia: Lebih dari Sekedar Pengurangan Kemiskinan*. Prakarsa dan LP3ES. Jakarta.
- Media Indonesia, 18 Desember 2018.
- Pos Kupang, 4 Februari 2019.

PEDOMAN BAGI PENULIS

Redaksi menerima kiriman artikel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Artikel berupa hasil penelitian lapangan, bidang kesejahteraan sosial maksimal 3 tahun terakhir, dan belum pernah dipublikasikan oleh media lain.
2. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12 poin, 1,5 spasi, 15 - 25 halaman (A4), dan diserahkan dalam bentuk *soft copy* ke www.ejournal.kemsos.go.id
3. Sistematika artikel disusun tanpa penomoran sub judul (lihat *journal template*), dengan urutan sebagai berikut:
 - a). Judul (huruf besar) dan nama penulis (tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel), disertai lembaga, alamat dan email penulis. Jika penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan adalah nama penulis utama, nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah (dengan melampirkan identitas penulis);
 - b). Abstrak terdiri dari 150 - 200 kata, huruf Times New Roman dalam 1 (satu) paragraf berisi latar belakang (1-2 kalimat), tujuan, metode, hasil penelitian, dan kata kunci (*keywords*) maksimal 3 kata.
 - c). Pendahuluan (huruf besar); berisi narasi tentang latar belakang, tinjauan daftar pustaka, tujuan penelitian, dan metode;
 - d). Hasil dan Pembahasan (huruf besar);
 - e). Kesimpulan;
 - f). Saran;
 - g). Ucapan Terima Kasih;
 - h). Daftar Pustaka (huruf besar): Berasal dari Jurnal (diutamakan Jurnal Kesejahteraan Sosial/Pekerja Sosial), hasil-hasil penelitian, dan buku.
4. Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris
5. Kutipan yang langsung dan panjang (lebih dari tiga baris) diketik dengan jarak baris satu dengan bentuk indented style (bentuk berinden). Semua kutipan dan rujukan yang digunakan oleh penulis harus tercantum dalam daftar pustaka.
6. Penggunaan singkatan, harus dituliskan secara lengkap pada saat pertama kali disebutkan lalu dibubuhkan singkatannya dalam kurung. Istilah/kata asing atau daerah ditulis dengan *Italic* (dimiringkan). Simbol/lambang ditulis dengan jelas dan dapat dibedakan, seperti penggunaan angka 1 dan huruf I (juga angka 0 dan huruf O).
7. Tabel dan gambar dan judul tabel dan gambar ditulis dengan Times New Roman berukuran 10. Penomoran tabel menggunakan angka Arab (ikuti format APA). Tabel/gambar maksimal 3.
8. Penulisan daftar pustaka mengikuti format APA (*American Psychological Association*). Daftar pustaka sedapat mungkin menggunakan sumber primer (buku atau jurnal), diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama keluarga/penulis. Minimal 80% rujukan berasal dari sumber yang up to date (diterbitkan tidak lebih dari 10 tahun terakhir). Rujukan dari internet mencantumkan tanggal diakses.
 - a) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku dengan pengarang tunggal:
Arikunto, S. (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
 - b) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku dengan 2 pengarang:
Wijaya, C. & Rusyan, T. (1992). Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
 - c) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku lebih dari 2 pengarang:
Suharto, E., Suradi, Luhpuri, D., Sudrajat, A., Koswara, A., Marbun, J., Masngudin & Sabeni. (2003). Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial, Studi Kasus Rumah Tangga Miskin Indonesia. Bandung: STKS Bandung Press.
 - d) Bila daftar pustaka dirujuk dari jurnal:
Mujiyadi, B & Gunawan, (2000). Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Suatu Kajian terhadap Masyarakat di Sekitar Kawasan Industri, Informasi Vol.5 No. 1, Januari 2000. Jakarta: Balitbang Depsos RI,
 - e) Bila daftar pustaka dirujuk dari website:
Hamidah, (2000). Dampak Pelecehan Seksual, <http://Viking-Trisna.Blogspot.com/2010/04/Dampak-Pelecehan-seksual.html>, diakses 23 Juli 2012
 - f) Bila daftar daftar pustaka dirujuk dari Lembaga:
Kementerian Sosial RI. (2000). Pedoman Panti Sosial Bina Remaja, Jakarta: Direktorat Rehsos
 - g) Bila daftar pustaka dirujuk dari media massa:
Surbakti R. (2012). Otonomi daerah dari Presiden, Kompas 31 Juli 2012:6
 - h) Bila daftar daftar pustaka dirujuk dari Undang-Undang:
Republik Indonesia, (2002). Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kementerian Sosial

